

DAMPAK PAHAM SEKULER *LAÏCITÉ*
PADA SISTEM PENDIDIKAN DI PRANCIS



Helen Patricia

2315081496

Skripsi yang diajukan kepada Universitas Negeri Jakarta untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

JURUSAN BAHASA PRANCIS
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi berjudul *Dampak Paham Sekuler Laïcité Pada Sistem Pendidikan di Prancis* ini telah disetujui untuk diuji.

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Dr.Asti Purbarini, M.Pd</u> NIP. 19560407 198210 2001	-----	<u>5 Juli 2013</u>
2.	<u>Yusi Asnidar, S.Pd, M.Hum</u> NIP. 19780821 200312 2002	-----	<u>5 Juli 2013</u>

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama Lengkap : Helen Patricia
No. Registrasi : 2315081496
Program Studi : Pendidikan Bahasa Prancis
Jurusan : Bahasa Prancis
Judul Skripsi : Dampak Paham Sekuler *Laïcité* Pada Sistem Pendidikan Di Prancis

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I

Dr. Asti Purbarini, M.Pd
NIP. 19560407 198210 2001

Pembimbing II

Yusi Asnidar, S.Pd, M.Hum
NIP. 19780821 200312 2002

Penguji I

Dr. Ninuk Lustyantie, M.Pd
NIP. 19580621 198511 2001

Penguji II

Subur Ismail, M.Pd
NIP. 19680507 199903 1002

Ketua Penguji

Dr. Ninuk Lustyantie, M.Pd
NIP. 19580621 198511 2001

Jakarta, 16 Juli 2013
Dekan Fakultas Bahasa & Seni

Dr. Aceng Rahmat, M.Pd
NIP. 19571214 199003 1001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Helen Patricia

No. Registrasi : 2315081496

Program Studi : Pendidikan Bahasa Prancis

Jurusan : Bahasa Prancis

Fakultas : Bahasa dan Seni

Judul Skripsi : Dampak Paham Sekuler *Laïcité* Pada Sistem Pendidikan
di Prancis

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila saya mengutip dari hasil karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, apabila terbukti saya melakukan tindakan plagiat. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 16 Juli 2013

Materai Rp 6.000,-

Helen Patricia

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA TULIS ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Helen Patricia
No. Registrasi : 2315081496
Jurusan : Bahasa Prancis
Fakultas : Bahasa dan Seni
Judul Skripsi : Dampak Paham Sekuler *Laïcité* Pada Sistem Pendidikan di Prancis

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royaltie Free Right*) kepada Universitas Negeri Jakarta atas karya ilmiah saya. Dengan hak tersebut, Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengubah format, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan, dan menampilkan karya ilmiah ini di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik Hak Cipta. Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 16 Juli 2013

Yang menyatakan,

Helen Patricia

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, untuk seluruh dosen jurusan bahasa Prancis Universitas Negeri Jakarta yang sangat saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa jurusan bahasa Prancis yang sedang berupaya menyelesaikan studinya.

KATA PENGANTAR

Tout est fini qui bien fini. Itulah kata-kata yang paling tepat untuk menggambarkan kelegaan saya karena berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul *Dampak Paham Sekuler Laïcité pada Sistem Pendidikan di Prancis* ini. Untuk itu, ucapan terima kasih yang setulusnya saya sampaikan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kesehatan dan kemampuan yang dibutuhkan sehingga saya mampu mengerjakan skripsi saya ini hingga selesai.
2. Pria dan wanita terbaik dalam hidup saya yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan moril selama saya menjalani 5 tahun masa perkuliahan di Jurusan Bahasa Prancis Universitas Negeri Jakarta. *Mes parents, je vous aime vraiment !*
3. Adik-adik saya yang terkasih, Peter dan Brenda, yang juga selalu memberi support ketika saya kelelahan dan jenuh dalam mengerjakan skripsi ini. *Je vous affectionne.*
4. Kedua dosen pembimbing skripsi saya, madame Dr. Asti Purbarini, M.Pd dan madame Yusi Asnidar, S.Pd, M.Hum. Di tengah kesibukan yang tiada kunjung berakhir, mereka selalu menyempatkan waktu untuk memberikan saran, bimbingan, dan arahan agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semua itu sangat berharga bagi saya dan tidak akan pernah saya lupakan. Tanpa bantuan mereka, mustahil skripsi ini akan selesai.

5. Madame Dra. Amalia Saleh, M.Pd, yang memberikan saya pencerahan, semangat dan motivasi yang luar biasa ketika waktu pengumpulan skripsi hampir berakhir tetapi saya belum dapat menyelesaikannya. Kata-katanya saat itu benar-benar menjadi pembangkit semangat saya.
6. Monsieur Drs. Jimmy, Ph, Paat, DEA, DEA, selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah membantu mengevaluasi kemajuan belajar saya selama menjalani pendidikan di Jurusan Bahasa Prancis Universitas Negeri Jakarta. *Vous êtes excellent, monsieur.*
7. Untuk semua dosen Jurusan Bahasa Prancis Universitas Negeri Jakarta, *ce mémoire est dédié à vous.*
8. Mbak Tuti, selaku tata usaha Jurusan Bahasa Prancis Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih banyak telah membantu saya selama 5 tahun dalam urusan-urusan administrasi di jurusan ini.
9. Teman-teman seperjuangan saya Jurusan Bahasa Prancis angkatan 2008, terima kasih untuk tahun-tahun yang telah kita jalani bersama-sama dalam usaha menjadi pribadi yang berhasil dan berguna di masa depan kelak. *Vous êtes tous les meilleurs.* Terkhusus untuk Anggi Juliadina, Nur Anisyah, Irma Latika, Galuh Ariestiara, Hotriris Mutiara, dan Fitria Rahmi, terima kasih untuk dukungan dan semangat yang diberikan.
10. Semua mahasiswa Jurusan Bahasa Prancis Universitas Negeri Jakarta. Sungguh bangga dan menyenangkan bisa menjadi bagian dari kalian. *Vive le département de français !*

11. Fandi Achmad Shofwan, S.Pd, yang sudah banyak membantu dan memberi saran selama saya mengerjakan skripsi ini, *je te remercie infinement.*

12. Andry Reagan Toelle, ST. Terima kasih untuk semangat dan dukungan yang diberikan hingga kehadirannya pada hari saya menjalani ujian skripsi. *Merci pour ta gentillesse, mon chéri !*

Akhir kata, semoga skripsi yang saya kerjakan ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya terutama bagi Jurusan Bahasa Prancis Universitas Negeri Jakarta, tempat saya menjalani pendidikan yang sangat memberikan kesan mendalam. Amin.

Jakarta, 16 Juli 2013

HP

ABSTRAK

HELEN PATRICIA. 2013. Dampak Paham Sekuler *Laïcité* pada Sistem Pendidikan di Prancis. Skripsi. Jurusan Bahasa Prancis. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak paham sekuler *laïcité* pada sistem pendidikan di Prancis, serta memaparkan alasan pemerintah Prancis tetap mempertahankan paham tersebut hingga saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis studi pustaka menurut teori Miles dan Huberman (1992).

Sumber data utama yang dijadikan referensi dalam penelitian ini terdiri dari buku *Un œil sur La Laïcité* (André, 2004), dan *Histoire de la Laïcité à la Française* (Bruley, 2005). Sementara itu, sumber data tambahan yang digunakan adalah beberapa artikel yang diambil dari situs *le monde.fr* dan *le figaro.fr*.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan reduksi data, yaitu pemilihan dan penggolongan data. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk tabel dan dibahas dalam bentuk teks naratif. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan atau membuat verifikasi dari data yang diperoleh. Data dalam penelitian berupa kalimat-kalimat dalam paragraf yang mencerminkan karakter *laïcité* dalam sistem pendidikan di Prancis.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa *laïcité* pada sistem pendidikan di Prancis diterapkan dengan dihapuskannya pengajaran agama dari kurikulum sekolah yang digantikan dengan pendidikan moral sekuler (*morale laïque*), dilarangnya penggunaan atribut keagamaan di lingkungan sekolah, dan ditetapkan bahwa para guru yang mengajar bukanlah golongan rohaniwan agama.

Pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi mahasiswa Jurusan Bahasa Prancis terutama dalam mempelajari mata kuliah *Civilisation Française*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang perkembangan yang terjadi di Prancis khususnya fenomena budaya sekuler dalam sistem pendidikan di Prancis serta membantu mengembangkan sikap saling menerima dan menghormati budaya Prancis sebagai negara yang dipelajari bahasanya.

Kata Kunci : Dampak *laïcité*, *École laïque*, *Enseignement laïque*

RÉSUMÉ

HELEN PATRICIA. 2013. *Les Impacts de la Laïcité sur Le Système Éducatif en France.* Le Mémoire. Le Département de Français. La Faculté des Arts et des Lettres. L'Université d'État de Jakarta.

Cette recherche est rédigé pour obtenir le Diplôme de l'Éducation (S1) au Département de Français, Faculté des Arts et des Lettres, Université d'État de Jakarta. Son objectif est de décrire les impacts de la *laïcité* sur le système éducatif en France et la raison pour laquelle que le gouvernement français reste à conserver l'application de ce concept jusqu'à nos jours.

Comme nous savons, autrefois la France était un pays Catholique. La majorité des français est composé par les fervents catholiques. Au moment où la France était sous le règne *des rois très chrétiens*, les français pratiquent régulièrement les activités rituelles qui démontrent leur foi chrétienne. La puissance de catholique est tellement forte que le système de gouvernement français est sous le pouvoir de l'Église catholique. La domination de l'Église sur la vie de la société française est particulièrement visible dans le domaine de l'éducation. Avant la création de concept de la *laïcité*, le système éducatif est une sphère la plus attentive pour l'Église catholique. En ce moment là, l'éducation pour les enfants était une préoccupation importante pour les catholiques. Selon les clergés, l'enseignement religieux est une chose la plus essentielle à donner aux enfants. Dans le même temps, les clergés catholiques ont le droit d'organiser l'enseignement primaire. De plus, l'Église catholique tient une surveillance étroite

dans les écoles en France. Cette surveillance est appliqué principalement aux enseignants. À l'autre côté, l'Église a également une abondance de richesses qu'elle permet de créer *les écoles confessionnelles* et de monopoliser le système éducatif en France. Cependant, depuis l'adoption de la loi de séparation entre l'Église et l'État en 1905, la France libère officiellement son système de gouvernement hors de la pression de l'Église. Le principe de la séparation entre l'Église et l'État en France s'appelle *laïcité*. De plus, par les constitutions de 1946 et 1958, la France a été déclaré comme une république *laïque*. La notion de *laïcité* est également restauré le système politique français à l'État. C'est-à-dire l'Église n'a plus le droit d'intervenir dans les décisions déterminés par l'État, et l'État n'a aucun pouvoir religieux. En outre, il est ainsi déterminé que le pratique gouvernemental français est basé sur la constitution et la loi. Le catholique n'est plus la religion de l'État ou la religion nationale. Les caractéristiques de la *laïcité* se composent des trois principes. Le premier est l'État garantit la liberté de conscience, le deuxième est l'État ne reconnaît, ni salarie, ni subvention aucun culte, ainsi que le troisième est l'État assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de leur origine, leur race ou leur religion. Ces trois principes sont les fondements pour tous les secteurs dans la vie de la société française, particulièrement dans le domaine de l'éducation.

Les principales sources de données utilisées dans cette recherche sont les livres *Histoire de la laïcité à la française* (Yves, 2005), et *Un œil Sur La laïcité* (André, 2004). Alors que les sources de données supplémentaires sont les 6 articles sont tirés sur les sites *le monde.fr* *Figaro.fr*. Ce sont *L'Ouverture d'un*

lycée musulman autorisée à Lille (publié en Juillet 2003), *Ouverture d'un collège musulman à Vitry* (publié en Mars 2008), *Laïcité: proposition de loi du PG* (publié en Avril 2011), *Une étudiante voilée brièvement exclue* (publié en Janvier 2013), *L'Opinion contre le foulard dans le privé* (publié en Mars 2013), et le dernier, *Morale à l'école: retour prévu en 2015* (publié en Avril 2013). La méthodologie utilisée dans cette recherche est *l'analyse du qualicative* par Miles et Huberman. Ces deux hommes expriment dans leur livre que l'analyse du qualicative se compose de trois étapes. Elles sont *reduksi data*, *penyajian data*, et *penarikan kesimpulan/verifikasi* (1992 : 16).

Reduksi data est un processus de la sélection, la simplification, et la transformation des données présentés sur le terrain. Reduksi data est effectuée sur l'une des principales sources de données, *Un œil sur la laïcité*, qui commence par la sélection des phrases dans un paragraphe qui se réfère au caractère de la *laïcité*. Par exemple, à la page 39 de cette source, la chercheuse trouve la phrase suivante: "*La loi du mars 1882 décide de la neutralité de l'école publique et l'abandon de l'éducation religieuse*". Cette expression montre la neutralité des écoles publiques en France. La suppression de l'éducation religieuse fait partie des données codées et dirigé par la suite comme une forme de l'impact de la *laïcité* sur le système éducatif en France. La décision du gouvernement par cette loi est classée comme l'un de caractères *laïcité*, c'est l'absence de reconnaissance de l'État à aucun culte.

Miles et Huberman (1992: 17) interprètent *penyajian data* comme un ensemble d'informations structurées qui donne la possibilité de tirer des conclusions et prendre des mesures. La présentation plus couramment utilisée

dans la recherche qualitative est sous la forme d'un texte narratif. Dans cette recherche, les données obtenues sont présentées sous forme de la table. La chercheuse dresse une table. Les colonnes de la table contiennent le numéro, l'année, les événements, les caractéristiques de la *laïcité* et l'explication. Les caractéristiques de la *laïcité* sont encore divisées en 3 sous-colonnes. La dernière étape est tirer la conclusion/la vérification. Au point de vue de Miles et Huberman (1992: 19), les conclusions sont également vérifiées pendant le processus de la recherche. Cette vérification peut être aussi courte comme la relecture de la chercheuse ou la révision des notes de terrain. En bref, les significations qui se présentent des données doivent être vérifiables, pertinentes et valides.

Le résultat de cette recherche montre que l'impact de la *laïcité* est très marquée dans la vie scolaire en France avec la création d'une *école laïque*. *L'école laïque* ne signifie pas "école sans Dieu" ou "école d'athée", mais plutôt une école indépendante de supervision religieuse du clergé comme Pasteur. Elle est ouverte à tous les enfants sans distinction de leur origine ou de leur croyance religieuse. *L'école laïque* présente des activités éducatives et morales. *École laïque* a pour but de former les enfants français en tant que les citoyens capables de développer la France comme un pays démocratique libérale, renforcer la connaissance juridique, l'égalité, l'esprit critique, et refléter les caractéristiques de la *laïcité*. Conformément au caractère de la *laïcité* qu'aucune religion est considérée en position supérieure ou inférieure, *école laïque* ne montre aucun élément spirituel de n'importe quelle identité religieuse. La création de *l'école laïque* dans la république française est compensée aussi par le principe de *gratuite*

et *obligatoire*. L'éducation devient une obligation pour être suivi ainsi que le droit pour tous les enfants français. Cela montre l'égalité garantit par le gouvernement français pour tous ses citoyens.

La sécularisation dans les *écoles publiques* est notamment appliqué par la suppression de l'enseignement religieux dans les programmes scolaires, et remplacé par *l'enseignement de morale laïque*. *L'enseignement de morale laïque* est un ensemble de connaissances et de réflexions sur les valeurs, les principes et les règles qui permettent, dans la République, de vivre ensemble selon notre idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. Il transmette aux enfants les principes universels de la république française. Cet enseignement est également souhaité en tant qu'un moyen pour les enfants pour être les adultes indépendants, et non les partisans de l'Église.

Par la suite, le concept de la *laïcité* dans le domaine éducatif en France ne sécularise que les écoles et les programmes d'enseignement, mais aussi les enseignants. Par conséquent, la France a l'obligation de fournir une *école laïque* dans toutes les régions du pays, soient des rurales, soient des urbaines. Ceci est déclaré par la préambule de la constitution en 1946 sous le règne de la IV-ème république. Cette affirmation révèle également que dans le domaine éducatif, le gouvernement traite tous les citoyens de l'égalité. De plus, l'éducation est une priorité nationale pour le gouvernement français. L'application de la *laïcité* en France a créé le double de système éducatif. Il existe *l'école publique* et *l'école privée*. En conséquence, la *laïcité* n'est que appliquée dans les *écoles publiques*, tandis que *les écoles privées* ont le droit pour l'appliquer ou non.

Aujourd'hui, l'application de *laïcité* est souvent heurté à la difficulté. Le problème majeur qui se passe souvent dans *les écoles publiques* est sur le port des attributs religieux, par exemple le port du *hijab* par les élèves musulmanes. D'autre part, certaines d'entre elles qui sont des immigrants ont refusé de suivre quelques matières qu'elles se sentent contradictoire avec leur idéologie ou leur conscience, ou celle que leur "forcer" d'enlever l'attribut religieux ce qu'elles portent. Cette controverse a causé les diverses protestations par des immigrants qui sont beaucoup commencé en 1989 jusqu'au début des années de 1990.

Après avoir passé un long débat au milieu de cet enjeu, le gouvernement français a promulgué une loi du 15 Mars 2004. Cette loi fixe une interdiction le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans *les écoles publiques* en France, soit école primaire, collège, et lycée. Ces signes religieux comprennent *le hijab* (islam), *la croix* (chrétien), *le turban* (sikh) et *la kippa* (juive). Les articles dans cette loi expriment le caractère de la *laïcité*, c'est l'absence de reconnaissance de l'État à n'importe quelle religion. L'application de cette loi s'est concentré sur *les écoles publiques* parce que ces écoles sont les entourages de l'acculturation. Les élèves dans ces écoles ne se composent que des autochtones, mais aussi les immigrés et les étrangers de divers pays et nation.

Par ailleurs, le conseil de l'éducation français a permis l'ouverture d'un lycée pour les musulmans français en 2003 et un collège en 2008. Cet accord indique que le gouvernement ne néglige pas l'existence et la liberté de conscience des musulmans en France. La création de ces deux écoles est indépendamment

financé par le secteur privé sans intervention de l'État. Bien que ces deux écoles soient fondés à l'association religieuse, elles s'ouvrent à accepter tous les élèves sans aucune distinction. Son projet propose le développement de l'attitude tolérante et du respect aux autres. Ces faits montrent que la formation de ces deux écoles est basée sur les caractères de la *laïcité*, ce sont la garantie de la liberté de conscience et l'absence de subventions d'État à l'institution religieuse.

L'application de la *laïcité* sur le système éducatif en France est souvent devenue un point d'interrogation et reçu beaucoup d'attirants du public. Les cas qui se passent à certaines communautés religieuses en France au nom de la neutralité de l'État ont provoqué des diverses réactions de la société internationale. Cela se produit parce que la France est connue comme un pays qui défend la liberté de tous les citoyens avec sa devise de *Liberté, Égalité, Fraternité*. En conséquence, beaucoup de gens considèrent la *laïcité* comme une doctrine anti-religieuse (*athéisme*). Les autres se demandent quel est le sens réel de la liberté et égalité qui glorifié par la devise française.

Malgré ces protestations du monde entier, le gouvernement français conserve néanmoins la *laïcité* jusqu'à maintenant. Il vise à maintenir l'idéologie et la culture française. La constitution L'AN III en 1795 et la loi de séparation entre l'Église et l'État en 1905 ont déterminé que l'idéologie et la culture français sont *laïque*. Le gouvernement français souhaite que cette idéologie soit devenue une idéologie pour tous les citoyens, soient des autochtones, soient des immigrants qui se sont installés en France. Il espère aussi que tous ses citoyens s'adaptent à cette culture *laïque* dans leur façon de vivre.

Donc, les politiques qui ont été mentionnés ci-dessus ne signifient pas la volonté de gouvernement français pour opprimer la communauté immigrante là, soient les musulmans, soient les autres religions. Ces politiques ne constituent pas une injustice dans la forme de discrimination contre les immigrants français, surtout dans le domaine éducatif. En revanche, la *laïcité* est l'identité de la France qui a pour but de protéger tous ses citoyens. Comme un pays multiculturel, la France a la diversité qui se caractérise par une grande variété en termes de religion et de culture. Cette situation déclenche potentiellement le conflit et désunir la France. Dans de telles conditions, la *laïcité* joue un rôle de créer l'intégration et de rendre toute la société mélange en entier. Cette intégration peut être réalisée à partir des enfants par l'éducation qu'ils reçoivent.

Le résultat de cette recherche pourra devenir la référence supplémentaire pour les étudiants du département de français surtout dans le cadre de la *Civilisation française*. Cette recherche s'agit des phénomènes réels dans la vie de la société française, surtout sur le système éducatif sous le concept de la *laïcité*. Finalement, cette recherche sera utile pour aider les étudiants à évaluer et interpréter la *laïcité* elle-même. La *laïcité* n'est pas un concept anti-religieuse (*athéisme*), mais plutôt une identité, tradition, et une partie de la culture française.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
RÉSUMÉ	xi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR BAGAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	7
I.3 Tujuan Penelitian.....	7
I.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
II.1 Analisis Teori.....	9
A.Hakikat Sekularisme.....	9

A.1 Sejarah Munculnya Sekularisme.....	13
A.2 Periode Sekularisme.....	15
A.3 Teologi Negara Sekuler.....	17
B. Hakikat <i>Laïcité</i>	19
B.1 Sejarah <i>Laïcité</i> di Prancis.....	25
C. Hakikat Sistem Pendidikan di Prancis.....	30
II.2 Sintesis Teori.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN.....	42
III.1 Interpretasi.....	42
Tabel Korpus.....	50
III.2 Pembahasan.....	75
A.Masa Awal Terbentuknya Konsep <i>Laïcité</i>	75
B. <i>Laïcité</i> di Zaman Modern.....	79
BAB IV PENUTUP.....	88
IV.1 Kesimpulan.....	88
IV.2 Implikasi.....	92
IV.3 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :

Dampak Paham Sekuler *Laïcité* pada Sistem Pendidikan di Prancis.....50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : L'Ouverture d'un Lycée musulman autorisée à Lille.....	97
Lampiran 2 : Ouverture d'un college musulman à Vitry.....	97
Lampiran 3 : Laïcité : proposition de loi du PG.....	98
Lampiran 4 : Une étudiante voilée brièvement exclue.....	98
Lampiran 5 : L'Opinion contre le foulard dans le privé.....	99
Lampiran 6 : Morale à l'école : retour prévu en 2015.....	100
Lampiran 7 : La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.....	101
Lampiran 8 : La Loi du 16 Juin 1881.....	102
Lampiran 9 : La Loi du 29 Mars 1882.....	104
Lampiran 10 : La Loi du 30 Octobre 1886.....	107
Lampiran 11 : La Constitution de L'AN III 1795.....	114
Lampiran 12 : La Loi du 9 Décembre 1905	117
Lampiran 13 : La Constitution du 27 Octobre 1946.....	127
Lampiran 14 : La Constitution du 4 Octobre 1958	129
Lampiran 15 : La Loi n° 2004-228 du 15 Mars 2004.....	130

DAFTAR BAKAN

Bagan 1 : Le Système Éducatif en France.....	34
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Bagi beberapa negara di benua Eropa seperti Italia, Polonia, Belgia, Swedia, Austria dan Prancis, paham sekuler adalah sebuah prinsip yang penting. Hal ini diungkapkan oleh André (2004 : 81), dalam bukunya *Un œil sur La Laïcité*. Negara-negara tersebut merupakan negara-negara multikultural, yaitu keadaan di mana terdapat berbagai macam budaya yang hidup dan bertahan di dalamnya. Keadaan multikultural ini muncul sebagai dampak dari migrasi yang terjadi di seluruh dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa keragaman yang terdapat dalam sebuah negara multikultural berpotensi untuk menimbulkan konflik karena tidak semua anggota masyarakat memiliki perspektif yang sama terhadap suatu nilai atau budaya tertentu.

Alasan diatas membuat banyak negara multikultural tersebut berpendapat bahwa untuk mewujudkan persatuan dan kerukunan di tengah keragaman yang ada, harus diciptakan suatu konsep hidup yang bersifat sekuler yang mengikat semua anggota masyarakat guna menghindari mencoloknya perbedaan. Paham sekuler ini dianggap mampu untuk memperkecil resiko munculnya ketegangan sosial akibat perbedaan pandangan dalam suatu kelompok masyarakat. Dengan kata lain, paham sekuler dalam suatu negara tidak selalu berarti ancaman bagi agama-agama. Dalam taraf tertentu, paham sekuler justru menjadi penyelamat khususnya bagi agama-agama yang dianut oleh golongan minoritas. Prinsip paham sekuler pada dasarnya menjunjung tinggi netralitas suatu negara tertentu

dalam pengelolaan sosial-politik kenegaraan, sehingga agama dan umat dari agama apapun diperkenankan untuk mengekspresikan keagamaan mereka selama dalam batas-batas yang wajar. Dengan begitu, identitas keagamaan justru mendapatkan tempat yang cukup layak dan mereka tidak merasa terancam.

Namun, André (2004 : 78) mengatakan bahwa sejauh mana paham sekuler diterapkan dalam tiap-tiap negara di Eropa dapat bervariasi, bergantung kepada sejarah nasional dari masing-masing bangsa serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam negara yang bersangkutan. Salah satu negara multikultural di benua Eropa yang menerapkan paham sekuler dengan teguh dan nyata adalah Prancis, yang dikenal dengan sebutan *laïcité* (Lazar, 2003 : 32). Secara umum *laïcité* merupakan sebuah prinsip yang menetapkan bahwa kekuasaan negara dan agama dipisahkan. Negara tidak memiliki kuasa atas agama, demikian pula sebaliknya, agama tidak berhak mencampuri urusan negara. Berdasarkan konsep *laïcité*, kehidupan agama merupakan wilayah pribadi. Agama tidak boleh masuk ke dalam wilayah publik.

Di sisi lain, pemerintah Prancis juga melarang warga negaranya untuk menggunakan simbol-simbol berbau keagamaan (religius) di tempat-tempat umum, salah satunya di sekolah-sekolah. Dalam pandangan pemerintah Prancis, penggunaan simbol-simbol semacam itu bisa menimbulkan aksi kekerasan, serta membahayakan rakyat dan negara yang berdasarkan kepada paham sekuler *laïcité*. Seseorang yang menggunakan simbol-simbol dari suatu identitas agama tertentu di tempat-tempat umum dapat memicu munculnya beragam interpretasi dari orang-orang yang melihatnya. Perbedaan interpretasi ini bisa memancing rasa

tidak suka bahkan kebencian misalnya bagi orang-orang yang tidak mengakui adanya Ketuhanan ataupun yang memiliki suatu kepercayaan tetapi tidak suka terhadap bentuk kepercayaan lain yang berbeda dengan dirinya. Oleh karena itu, Prancis harus netral dari semua unsur-unsur agama yang ada, tidak terkecuali agama Katolik yang sebelumnya begitu menguasai sistem politiknya.

Upaya pemerintah Prancis dalam menegakkan konsep *laïcité* di Prancis melalui pelarangan penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam lingkup pendidikan telah dimulai sejak tahun 1989, yaitu pada masa pemerintahan presiden François Mitterand. Pada tahun tersebut, pecah kontroversi mengenai jilbab, dimana tiga orang gadis muslim mengenakan jilbab ke sekolah mereka. Kepala sekolah tersebut meminta ketiga gadis ini untuk melepas jilbab yang mereka kenakan dan memakai “pakaian biasa” seperti murid-murid perempuan lainnya. Ketiga gadis tersebut beserta orang tua mereka menolak perintah sang kepala sekolah, dengan alasan bahwa memakai jilbab adalah bagian dari ibadah menurut agama yang mereka anut. Akibatnya, mereka dikeluarkan dari sekolah tempat mereka belajar, yaitu “*Collège de Creil*” di Osie, Prancis Utara (Lazar, 2003 : 32).

Contoh kasus tersebut hanyalah gambaran kecil dari dampak paham *laïcité* dalam dunia pendidikan di negara tersebut. Sangat disayangkan, contoh tersebut dan contoh-contoh serupa lainnya yang terjadi di negara Prancis terutama dalam lingkup pendidikan telah mengaburkan makna dari konsep *laïcité* yang sesungguhnya dalam pandangan masyarakat luas.

Padahal, Prancis merupakan salah satu negara pelopor demokrasi di dunia. Di negara inilah kebebasan rakyatnya dijunjung tinggi melalui semboyan “*Liberté, Égalité, Fraternité*”, yang dalam bahasa Indonesia berarti kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Semboyan tersebut dianggap mencerminkan suatu bentuk pemerintahan yang ideal bagi negara Prancis. Jika mengacu pada semboyan ini, contoh kasus di atas dapat dipandang sebagai ancaman terhadap kebebasan identitas beragama dan persamaan hak dari rakyat Prancis serta tidak sesuai dengan makna semboyan itu sendiri. Dengan terjadinya kasus tersebut dan berbagai kasus serupa lainnya dalam sektor pendidikan, maka khususnya makna kata “*Liberté*” dan “*Égalité*” seolah-olah tidak lagi mencerminkan kebebasan dan persamaan hak yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Prancis tanpa terkecuali.

Pengesahan “*La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen*” (Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara) pada tahun 1789 juga mengindikasikan bahwa seluruh masyarakat Prancis memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam pandangan hukum. Hak-hak yang diakui dan dilindungi dalam deklarasi tersebut mencakup hak atas kemerdekaan pribadi, hak untuk dilindungi secara fisik, hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, hak kebebasan untuk bertempat tinggal, hak atas milik pribadi, hak untuk membela diri, hak kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, hak untuk memiliki suatu keyakinan tertentu, serta hak untuk memeluk maupun tidak memeluk suatu agama tertentu.

Bagi mereka yang memeluk suatu agama tertentu, maka hak untuk menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan maupun hal lain yang sifatnya merupakan bagian dari ibadah mereka juga dijamin dan dilindungi. Deklarasi tersebut juga menjamin hak seluruh masyarakat Prancis untuk ikut serta dalam politik, hak untuk bergabung dan menjadi bagian dalam sebuah organisasi, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan menjalankan kegiatan ekonomi, hak untuk menjadi bagian dari masyarakat sosial maupun sebagai individu yang merdeka, serta hak untuk mengembangkan diri dengan memperoleh dan mengikuti pendidikan yang disediakan oleh negara.

Ditinjau dari isi deklarasi tersebut, sangat masuk akal untuk mengatakan bahwa hak asasi manusia lahir sedemikian rupa di Prancis. Deklarasi hak-hak asasi manusia juga berkaitan erat dengan hasil Revolusi Prancis yang harus mengutamakan pengembangan tiap-tiap individu dan menjamin proses pengembangan tersebut. Bertentangan dengan prinsip tersebut, berbagai kasus yang ditimbulkan oleh penerapan konsep *laïcité* dalam bidang pendidikan membentuk pola pikir masyarakat umum bahwa pemerintah Prancis telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dari masyarakatnya.

Dengan demikian, merupakan hal yang wajar jika apa yang terjadi di Prancis ini mengejutkan masyarakat Internasional dan mengundang banyak pertanyaan semenjak kemunculan paham *laïcité* pertama kali sampai dengan saat ini. Prancis menjadi kasus yang cukup mencolok sekaligus menimbulkan keingintahuan banyak pihak karena menerapkan paham *laïcité* dengan begitu keras, khususnya dalam dunia pendidikan. Sekolah selalu menjadi pusat

perdebatan utama masyarakat Prancis dalam konsep *laïcité*. Isu dalam dunia pendidikan di Prancis ini memunculkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran.

Selain itu, keteguhan Prancis dalam menerapkan *laïcité* membuat paham tersebut sering kali disalahgambarkan dan dipandang sebagai suatu konsep yang anti-agama. Tidak mengherankan jika Prancis sering kali dicap sebagai negara ateis. Beberapa pendapat lain menganggap bahwa kebijakan pemerintah Prancis ini diberlakukan untuk menekan kaum imigran yang tinggal di sana. Dengan kata lain konsep *laïcité* masih sering dianggap sebagai bentuk ketidakadilan berupa pendiskriminasian terhadap kaum imigran Prancis, khususnya umat muslim. Faktanya, hingga saat ini perkembangan konsep *laïcité* telah memberikan dampak yang sangat meluas terhadap berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat Prancis, khususnya bidang pendidikan.

Maka berdasarkan data-data dan fakta diatas, serta untuk mengetahui lebih mendalam mengenai hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji dampak paham sekuler *laïcité* pada sistem pendidikan di Prancis. Sebagai mahasiswa jurusan bahasa Prancis tentu dituntut untuk tidak hanya mampu menguasai bahasa Prancis tetapi juga perlu mengenal sejarah peradaban, kebudayaan dan fenomena yang terjadi dalam negara tersebut. Dalam penelitian ini, dampak dari paham sekuler *laïcité* yang akan dikaji dalam bidang pendidikan dimulai sejak pemisahan pertama gereja dan negara tahun 1795 sampai dengan yang terjadi di zaman modern ini. Berbagai dampak tersebut mencakup undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Prancis dalam menerapkan *laïcité* pada sistem pendidikannya serta reaksi yang muncul dari masyarakat luas sebagai implikasi dari bentuk-bentuk

kebijakan tersebut. Penelitian tentang *laïcité* sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2012 oleh Rahajeng Restu Tania, mahasiswi jurusan bahasa Prancis Universitas Negeri Jakarta. Namun, tujuan penelitian beliau adalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur *laïcité* dalam majalah *Marianne*.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dibentuk dalam dua pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa saja dampak paham sekuler *laïcité* pada sistem pendidikan di Prancis ?
2. Mengapa pemerintah Prancis tetap mempertahankan paham sekuler *laïcité* pada sistem pendidikannya hingga saat ini meskipun telah menuai protes dari masyarakat Internasional ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dampak paham sekuler *laïcité* pada sistem pendidikan di Prancis dan memaparkan alasan pemerintah Prancis tetap mempertahankan paham tersebut hingga saat ini.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai wahana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan tentang dampak paham sekuler *laïcité* pada sistem pendidikan di Prancis.

2. Bagi Pembaca

Menjadi wawasan baru tentang interpretasi dan pengertian paham *laïcité* yang sesungguhnya di Prancis, sehingga dapat membentuk sikap saling menerima dan menghormati budaya lain. Penelitian ini diharapkan juga bisa memberikan pemahaman mendalam dan perspektif yang lebih terbuka kepada pembaca tentang kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Prancis dalam menerapkan konsep *laïcité* pada sistem pendidikan di negara tersebut.

3. Bagi Jurusan Bahasa Prancis UNJ

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi pustaka khususnya untuk mata kuliah *Civilisation Française* dalam memberikan informasi tentang situasi yang terjadi di kehidupan masyarakat Prancis khususnya dalam fenomena budaya sekuler pada sistem pendidikan di negara tersebut. Manfaat lainnya adalah untuk mengembangkan sikap semakin saling menerima dan menghormati budaya Prancis sebagai negara yang dipelajari bahasanya. Selain itu, penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai sumber data penelitian atau contoh bagi mahasiswa yang juga akan mengadakan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II. 1 Analisis Teori

Dalam bab ini dijelaskan landasan teori yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan tersebut adalah sekularisme, *laïcité*, dan sistem pendidikan di Prancis.

A. Hakikat Sekularisme

Istilah *sekuler*, *sekularisasi*, dan *sekularisme* secara sekilas tampaknya hampir sama, namun sebenarnya tiap-tiap kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Secara leksikologis, istilah sekuler berasal dari bahasa latin *saeculum* yang memiliki arti ganda, yaitu *ruang* dan *waktu*. *Ruang* menunjuk pada pengertian duniawi, sedangkan *waktu* menunjuk pada pengertian sekarang atau zaman kini. Jadi, kata *saeculum* berarti masa kini atau zaman kini, atau juga berarti peristiwa zaman kini. Bisa juga dikatakan bahwa makna kata sekuler lebih ditekankan pada waktu atau periode tertentu di dunia yang dipandang sebagai proses sejarah.

Dalam kaitan ini, pengertian sekularisasi sering diartikan sebagai proses pemisahan antara urusan negara (politik) dengan urusan agama, atau pemisahan antara urusan duniawi dengan urusan akhirat. Landis, seorang pengamat sosial politik Barat, menulis tentang sekularisasi dalam Pardoyo (1993 : 20) sebagai berikut : “Suatu kecenderungan mengenai cara melakukan interpretasi yang

bersifat sekuler dan rasional”. Pernyataan Landis tersebut mengisyaratkan bahwa sekularisasi dapat didefinisikan sebagai pembebasan manusia dari agama. Artinya, terlepasnya dunia dari pengertian-pengertian religius yang suci, dari pandangan dunia yang semu, atau dari semua mitos supranatural. Kemudian manusia mengalihkan perhatiannya lepas dari dunia tersebut ke arah dunia masa kini.

Poepowardojo dalam Pardoyo (1993 : 20) mengatakan bahwa pada hakikatnya sekularisasi menginginkan adanya pembebasan tajam antara agama dan ilmu pengetahuan, dan memandang ilmu pengetahuan otonom dalam dirinya. Atas dasar pengertian ini, maka sekularisasi dapat didefinisikan sebagai proses pembebasan manusia dari agama. Melalui ilmu pengetahuan, manusia terus berusaha untuk menemukan hal-hal baru dengan berbagai metode ilmiah yang terus berkembang. Dengan demikian, manusia mempunyai otonomi, sehingga ia dapat berbuat bebas sesuai dengan apa yang ia kehendaki berdasarkan rasio.

Kemudian, Al-Bahy dalam Januar Ali (2000 : 98) menerangkan bahwa sekularisasi adalah cara hidup yang memisahkan urusan agama dari urusan negara, dan sekularis adalah orang yang berpegang kepada ajaran sekularisme dan mempraktekkan sekularisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari rumusannya tersebut dijumpai bahwa sekularisasi dapat dimaknai sebagai suatu kecenderungan atau suatu cara hidup dimana urusan agama dipisahkan dari urusan negara. Hal ini dapat didasari pada pemikiran yang bersifat rasional maupun kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin canggih.

Sementara itu, istilah sekularisme pertama kali diperkenalkan oleh Holyoake pada tahun 1846. Dikutip oleh Pardoyo (1993 : 21), Holyoake menyatakan : “Sekularisme adalah suatu sistem etik yang didasarkan pada prinsip moral alamiah dan terlepas dari agama, wahyu atau supernaturalisme“.

Seperti dikatakan oleh Holyoake sebagai pelopor sekularisme itu sendiri, sekularisme pada awalnya tidak lain merupakan suatu sistem etika. Sistem etika merupakan sistem yang mengandung prinsip-prinsip yang mengajarkan kepada manusia tentang kehidupan, bagaimana seharusnya manusia menjalani hidup, atau bagaimana seharusnya manusia bertindak dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai suatu sistem etika, maka sekularisme dapat dikategorikan pada sistem ajaran moral yang didasarkan dan berpijak pada prinsip daya guna atau manfaat. Sekularisme mengajarkan kepada manusia untuk terus meningkatkan taraf hidupnya yang bermanfaat dengan cara mencari kemampuan di dunia melalui kemampuan manusiawi dirinya maupun ilmu pengetahuan yang terus berkembang, tanpa perlu terikat atau bergantung pada suatu agama atau kepercayaan tertentu.

Manusia atau kelompok masyarakat yang menganut paham sekularisme berusaha menikmati kehidupan dan kemajuan yang ada seolah-olah tanpa campur tangan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak perlu lagi. Karena itu, tempat Tuhan diganti oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dianggap sebagai dewa penyelamat. Menurut Weizsacher dalam Pardoyo (1993 : 22), ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah mengambil tempat yang dulunya ditempati oleh

agama dan gereja. Bukan zamannya lagi manusia harus bergantung kepada Tuhan. Pemahaman seperti inilah yang ia katakan sebagai sekularisme.

Pendapat lain dikemukakan oleh Bakry, yang dikutip oleh Pardoyo (1993 : 21). Bakry menulis tentang sekularisme sebagai berikut : “Sekularisme merupakan suatu pandangan bahwa organisasi agama harus dikurangi sejauh mungkin, dan bahwa moral dan pendidikan harus dipisahkan dari agama”. Berpijak pada pernyataannya tersebut, maka sekularisme dapat diartikan sebagai suatu pemikiran bahwa peranan agama harus dijauhkan dari sistem pemerintahan suatu negara, termasuk di dalamnya pengaturan moral dan pendidikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata sekuler berkaitan dengan suatu keadaan atau peristiwa di masa kini, atau bisa juga suatu periode tertentu yang dianggap sebagai bagian dari sejarah. Sementara sekularisme adalah suatu paham atau ideologi di mana agama tidak lagi ditempatkan sebagai hal yang utama dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa terjadi akibat berbagai faktor, seperti misalnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga membentuk pola pikir manusia yang rasional. Akibatnya, urusan agama dengan urusan negara dipisahkan. Sedangkan sekularisasi adalah proses dari terbentuknya paham sekularisme. Sekularisasi juga dapat dipahami sebagai proses perubahan cara pandang dan perilaku, dari yang tadinya mencampurkan urusan agama dengan urusan politik menjadi memisahkan keduanya.

A.1 Sejarah Munculnya Sekularisme

Jika ditinjau dari latar belakang sejarah, peradaban Barat pernah mengalami masa pahit, yang mereka sebut sebagai '*masa kegelapan*'. Al-Kilany (1992 : 116) menjelaskan bahwa sejarah sekularisme dimulai dari kekecewaan bangsa barat terhadap dominasi gereja dalam segala segi kehidupan masyarakat, terutama dalam pemerintahan politik. Perpecahan orang-orang Kristen menjadi dua kelompok, yaitu umat Katolik dan Protestan memicu pecahnya perang agama. Perang tersebut melibatkan hampir seluruh rakyat Eropa dan menyebabkan ribuan orang terbunuh. Peperangan ini pula yang sangat berperan besar dalam memisahkan agama dari negara, yang lazim disebut sebagai "kebebasan individu dalam memilih sekte yang dikehendakinya". Proses sekularisme juga dipicu oleh pergolakan pemikiran dan pertarungan gagasan, seperti dalam kasus Copernicus, Galileo, dan para scientist lainnya yang menentang gereja. Para tokoh ini mengedepankan ilmu pengetahuan dan mulai menempatkan individu manusia dengan akal sehat dan kebebasan mutlak untuk menemukan pemecahan dari berbagai masalah. Sekularisme juga dianggap sebagai proses modernisasi, seperti perubahan masyarakat dari agraris ke industri, dari kehidupan pedesaan ke perkotaan, dan dari kebiadaban menjadi peradaban.

Teologi Kristen juga disebut-sebut sebagai penggagas munculnya sekularisme. Pardoyo (1993 : 26) menyebutkan bahwa beberapa teolog dan filsuf seperti Maritain dan Nietzsche berkeinginan agar agama Kristen tetap sejalan dengan peristiwa-peristiwa masa kini di Barat, dan mereka bahkan menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa sekularisme mempunyai akar-akarnya dalam

kepercayaan kitab Injil dan merupakan buah dari ajaran Injil. Dalam injil Kristen sendiri ditunjukkan bahwa urusan agama tidak dapat dicampur-adukkan dengan urusan negara, seperti misalnya :

Yesus Mengatakan : “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah“. (Matius 22:21)

Yesus Mengatakan : “Kerajaan-Ku bukan bagian dari dunia ini“. (Yohanes 18:36)

Kedua hukum tersebut menandakan bahwa pengikut Yesus (umat Kristen dan Katolik) diperintahkan untuk memisahkan urusan agama dengan urusan negara (memberi kepada Kaisar, dalam hal ini pemerintah atau pemimpin negara, apa yang menjadi haknya dan memberi kepada Allah apa yang menjadi hak-Nya juga). Selain itu Yesus sendiri mengatakan bahwa kerajaan yang diperintah oleh-Nya tidak berasal dari dunia (bukan bagian dari dunia). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan (kerajaan) yang dipimpin Yesus tidak dicampuri dengan pemerintahan (kerajaan dunia). Kedua hukum ini menjadi dasar bagi umat Kristen dan Katolik untuk diikuti sehingga para ahli mengatakan bahwa mereka (umat Kristen dan Katolik) adalah pencetus paham sekularisme.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa latar belakang munculnya sekularisme di Barat didasari atas dua hal utama, yaitu perebutan kekuasaan antara negara dan gereja, dimana pada saat gereja mendominasi sistem pemerintahan justru membawa masalah bagi negara sehingga menyengsarakan kehidupan masyarakat dan menimbulkan kekecewaan. Dari pengalaman buruk tersebut, peran agama dalam kehidupan bernegara menjadi semakin kecil, dan

dirasa perlu untuk menciptakan suatu revolusi baru demi menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, terlepas dari peran agama dalam urusan negara.

Dalam hal ini teologi agama Kristen juga dianggap sebagai akar dari paham sekularisme, dimana Yesus Kristus memerintahkan kepada para pengikutnya untuk memberikan apa yang menjadi hak negara kepada negara, dan hak Tuhan kepada Tuhan. Perintah tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan gereja dan negara memang harus dipisahkan.

A.2 Periode Sekularisme

Untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai perkembangan permasalahan tentang sekularisasi dalam kerangka pemikiran kefilosofan di Eropa, Al-Bahy dalam Pardoyo (2003 : 32) secara garis besar membagi sekularisme dalam dua periode yaitu sekularisme moderat dan sekularisme ekstrem. Pada periode sekularisme moderat, agama dianggap sebagai urusan individu yang tidak ada hubungannya dengan negara. Meskipun demikian, negara masih berkewajiban untuk memelihara gereja, khususnya dalam bidang upeti atau pajak. Periode pertama ini terjadi antara abad ke-17 dan 18. Beberapa filsuf yang termasuk dalam periode sekularisme moderat antara lain Voltaire (1694-1778), yaitu seorang filsuf Prancis yang juga digolongkan sebagai penganut agama alami. Filsuf Prancis lainnya adalah Rousseau (1712-1778), yang sekaligus seorang humanis non-materialis. Rousseau memfokuskan alam sebagai faktor pemisah sebagaimana ia menjadikan agama dalam pendidikan sebagai suatu hal yang bertentangan dengan alam.

Berbeda dengan periode sekularisme moderat, pada periode sekularisme ekstrem, agama tidak hanya menjadi urusan pribadi seseorang, akan tetapi justru negara memusuhi agama dan orang-orang yang beragama. Periode kedua ini terjadi antara abad ke-19 dan 20, dan ini disebut juga dengan periode materialisme atau *Revolusi Sekuler*. Beberapa filsuf yang termasuk dalam periode sekularisme ekstrem antara lain Feuerbach (1804-1872), yaitu seorang filsuf Jerman dan termasuk pencetus revolusi sekuler terpenting pada abad ke-19. Menurut pendapatnya, manusia merupakan wujud Tuhan tetapi bukan Allah, dan agama yang baru adalah politik, bukan agama Masehi. Karena itulah politik harus dijadikan agama. Dasar negara bukanlah Allah dan agama, melainkan manusia dan kebutuhannya. Filsuf lainnya adalah Lenin (1870-1924). Menurut Lenin, agama itu adalah candu rakyat, yang menutup kemajuan berpikir. Meskipun Lenin setuju dengan pendapat bahwa “agama itu urusan perorangan”, akan tetapi untuk partai (golongan), anggotanya harus anti-Tuhan, karena anggotanya yang masih beragama menjadi musuh bebuyutan bangsa. Negara harus netral, dalam arti negara tidak memperhatikan agama, dan tidak ada hubungannya dengan agama. Agama tidak ada nilainya bagi penduduk, maka tidak perlu menanyakan aliran agama, dan kenetralan terhadap agama itulah pemisahan sempurna antara negara dan gereja.

Dari kedua periodisasi sekularisme tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sekularisme di Barat terbagi dalam dua periode, yaitu periode sekularisme moderat, yang terjadi pada abad ke-17 dan 18, serta periode sekularisme ekstrem, yang terjadi pada abad ke-19 dan 20. Pada periode sekularisme moderat, agama

dianggap sebagai masalah pribadi bagi tiap-tiap warga negara, dan tidak ada kaitannya dengan negara. Periode ini menekankan pada pemisahan kekuasaan negara atas gereja, namun tidak merampas agama dan nilai-nilai yang dikandung dalam ajarannya. Sementara itu, bertolak belakang dengan periode sekularisme moderat, periode sekularisme ekstrem tidak hanya menganggap agama sebagai urusan individu setiap warga negara, tetapi bahkan memusuhi agama dan orang-orang yang menganut suatu agama tertentu.

A.3 Teologi Negara Sekuler

Mortimer dalam Januar Ali (2000 : 18) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan negara sekuler adalah negara yang memisahkan diri dengan agama, sehingga negara tidak menjadi instrumen suatu agama tertentu. Dengan kata lain, negara tidak memberikan perlakuan khusus atau istimewa kepada agama atau kepada interpretasi agama tertentu. Dari pernyataan Mortimer tersebut, dapat dipahami bahwa dalam sebuah negara yang berbentuk sekuler, urusan negara dengan urusan agama dipisahkan. Namun, negara tetap bersifat netral dalam arti tidak memberikan hak istimewa tertentu atau mengutamakan sebuah agama maupun kepercayaan yang ada dalam negara tersebut. Prinsip kesamaan atas hak-hak seluruh warga negara akan sulit dicapai jika negara memainkan perlakuan istimewa atas agama tertentu.

Sementara itu menurut Januar Ali (2000 : 6), agar dapat netral atas keberagaman agama dan keyakinan, suatu negara memang tidak diharapkan menjadi instrumen atas agama tertentu dan tidak disakralkan. Dengan kata lain,

suatu negara yang menaungi komunitas yang beragam memang harus dibuat sekuler. Selanjutnya, perlu dihindari politisasi agama yang memanipulasi sentimen agama dalam rangka kekuasaan dan agamanisasi politik atau mengagamakan politik. Politisasi agama adalah memindahkan agama yang seharusnya ada pada wilayah komunitas ke wilayah negara.

Secara ringkas, yang membuat sebuah negara disebut sekuler adalah jika negara tersebut tidak menjadikan kitab suci agama tertentu sebagai konstitusinya dan tidak menjadikan hukum agama tertentu sebagai hukum nasional. Negara dinetralkan terhadap agama, karena memang negara itu dibentuk untuk melayani warga negara yang bukan hanya memiliki agama yang berbeda, tetapi juga pandangan atau interpretasi yang berbeda-beda tentang agama. Lebih lanjut, tidak benar jika negara sekuler adalah negara yang ingin bebas dari agama. Sebaliknya, negara sekuler jelas sangat peduli dengan kehadiran agama, tetapi bukan dominasi terhadap satu agama tertentu. Di sisi lain, jika ada seorang warga negara yang karena kesadaran pribadinya tidak ingin menganut suatu agama tertentu, itu sudah di luar kekuasaan negara untuk ikut campur. Hal ini merupakan tugas dari komunitas agama yang terdapat di negara tersebut. Bukan berarti negara tidak peduli, tetapi karena negara memiliki kekuasaan yang memang harus dibatasi terhadap agama. Dalam negara sekuler yang demokratis, apapun identitas dan agama dari seorang warga negara, ia layak untuk mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum, sama seperti warga negara lainnya. Menganut suatu agama tertentu tidak membuat seorang warga negara harus didiskriminasi, baik dari hak-hak sosial maupun kedudukan hukumnya. Negara sekuler yang

demokrasi bukanlah negara yang anti-agama, melainkan negara yang memberikan perlakuan yang sama kepada pluralitas agama, dan tetap melindungi hak warga negaranya untuk menjalankan kegiatan agama mereka masing-masing.

B. Hakikat *Laïcité*

Di Prancis, *laïcité* adalah sebuah konsep masyarakat sekuler. Pada masyarakat tersebut, urusan agama dipisahkan dari urusan negara. Selama abad ke-20, konsep ini berkembang menjadi penyetaraan semua agama, tetapi pada dasarnya konsep ini merupakan prinsip pemisahan agama dari negara. Dalam bahasa Prancis muncul pula 6 kata lain yang memiliki hubungan makna yang dekat dengan *laïcité* yaitu *laïc*, *laïcité*, *laïcisation*, *laïciser*, *laïcisme*, dan *laïque*. Secara etimologis, kata-kata ini berasal dari bahasa Yunani *laos*, yang berarti orang-orang dan *laikos* yang berarti sesuatu yang umum/biasa. Maka secara sederhana kata-kata tersebut memiliki makna yang berarti “orang-orang biasa”.

Pertama-tama, kata *laïc* muncul pada abad pertengahan (*Moyen Âge*) dan menunjuk kepada seseorang yang telah dibaptis dalam Katolik tetapi bukan seorang pendeta atau imam. Selanjutnya, istilah *laïcité* mengacu kepada golongan umat yang beriman, sedangkan istilah *laïque* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang bersifat awam, atau yang terbebas dari agama apapun. Kemudian, kata *laïcisme* yang muncul pada tahun 1842 mengacu pada doktrin yang bertujuan untuk membentuk lembaga non-agama. Sementara itu kata *laïcisation* merupakan kata yang terakhir muncul, yaitu di akhir abad ke-19. Kata ini menunjukkan perkembangan konsep *laïcité* di negara Prancis, baik dalam lembaga institusi

maupun pendidikan. Kata ini sekaligus menunjukkan proses penterjemahan dari kata kerja *laïciser*, yang berarti membuat sesuatu menjadi bersifat sekuler.

Kata *laïcité* itu sendiri muncul pertama kali pada tahun 1871. Kata tersebut menunjukkan pemisahan dan kemandirian negara dalam kaitannya dengan gereja dan agama. *Laïcité* juga dianggap sebagai sikap yang ideal, yang didirikan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai kebangsaan, sekaligus merupakan filsafat negara Prancis. Ini juga merupakan bentuk organisasi politik. Secara historis, istilah *laïcité* pertama-tama berlaku dalam sekolah negeri (*école publique*) di Prancis (André, 2004 : 5).

Bedouelle dan Costa (1998 : 11) mendefinisikan *laïcité* sebagai berikut : “*Le principe de séparation de la société civile et de la société religieuse, l’État n’exerçant aucun pouvoir religieux et les Églises aucun pouvoir politique*”. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa *laïcité* merupakan sebuah prinsip pemisahan masyarakat sipil dengan masyarakat beragama, atau dengan kata lain, pemisahan antara kekuasaan negara dengan agama atau gereja. Dengan demikian, negara tidak menggunakan wewenangnya untuk menguasai agama dan juga sebaliknya, gereja tidak memiliki kekuasaan terhadap politik.

Sekilas, makna dari kata *laïcité* dapat terkesan negatif karena pengertian dari teologi kata tersebut hanya berpusat pada “pemisahan” antara urusan agama dengan urusan negara. Itulah sebabnya Renan membuat upaya untuk memberikan makna yang lebih luas dan positif. Dikutip oleh Bedouelle, Renan (1998 : 11) mengatakan bahwa *laïcité* adalah : “*La neutralité de l’État, en tolérant pour tous les cultes et forçant l’Église à lui obéir sur ce point capital*”. Pernyataan Renan

tersebut menyiratkan bahwa *laïcité* bukanlah kondisi ketidakpedulian negara terhadap kehidupan beragama. Sebaliknya, negara mempertunjukkan sikap yang netral dan bertoleransi terhadap semua agama yang ada. Bahkan, negara mengharuskan gereja untuk menghormati dan melaksanakan kebijakan tersebut.

Makna lain dari kata *laïcité* dikemukakan oleh Bayet dalam Bedouelle (1998 : 14) sebagai berikut :

“La laïcité XIX-ème siècle née sous le signe de la tolérance, enseignait essentiellement l'égal respect de toutes les croyances, et de toutes les opinions. Elle voulait qu'entre les catholiques, les protestants, les israélites, les musulmans, les rationalistes, l'État fût neutre, mais cette neutralité signifiait que, ne favorisant personne, il ne brimerait non plus personne, qu'il assurerait la liberté à tous”.

Dari pemahaman Bayet tersebut, makna kata *laïcité* berkembang menjadi lebih luas lagi dan tidak hanya mengacu pada pemisahan antara kekuasaan negara dan gereja. *Laïcité* di Prancis mengidentifikasikan sikap negara yang tetap netral di hadapan agama, termasuk agama Katolik yang pada awalnya merupakan agama nasional Prancis. Bahkan menurut pendapat Bayet, prinsip *laïcité* merupakan bentuk toleransi negara yang diharapkan dapat tetap menjaga perdamaian dan rasa saling menghormati antar agama atau kepercayaan apapun yang ada di Prancis. Negara dituntut untuk tetap bersikap netral dalam dua pengertian, yaitu tidak mengistimewakan siapapun namun juga tidak menekan siapapun. Prinsip *laïcité* mengharapkan kenetralan negara dan jaminan bagi setiap warga negara akan kebebasan yang mereka miliki, termasuk kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan. Soetedjo (1991 : 8) mengatakan bahwa kenetralan sikap negara ini penting untuk menjaga kesatuan nasional Prancis.

Sementara itu, Lazar (2003 : 88) memberikan interpretasinya tentang *laïcité* sebagai berikut :

“La laïcité renvoie au principe de séparation des Églises et de l’État. Cette interprétation est, en particulier, implicitement porteuse d’une liberté essentielle à laquelle nombreux sont ceux qui ne veulent à aucun prix renoncer : ne pas devoir afficher individuellement une religion (fût-elle non pratiquée)”.

Ungkapan Lazar tersebut menunjukkan bahwa interpretasi konsep *laïcité* sebagai pemisahan gereja dan negara mengusung sebuah kebebasan penting bagi banyak pihak. Kebebasan ini berupa pilihan sikap moral khususnya bagi mereka yang tidak mau memberikan sumbangan atau bantuan dana kepada kegiatan agama apapun. Konsep *laïcité* juga membuat warga negara tidak “diwajibkan” dalam menampilkan identitas keagamaan pribadi mereka, baik yang dipraktikkan maupun tidak dipraktikkan dalam kegiatan ibadah. Lazar selanjutnya mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk membatasi interpretasi yang sempit dan murni terkesan negatif atas konsep *laïcité*, yaitu “pemisahan”. Kata pemisahan tersebut dikaitkan dengan makna dari kata *laïque*, kata yang berperan penting dalam kemunculannya sebagai unsur kualifikasi kedua yang disebutkan dalam Konstitusi Prancis, setelah menegaskan bahwa Prancis adalah negara republik yang bersatu dan tidak terpisah-pisah (*indivisible*). Posisi yang istimewa ini penting bagi Prancis untuk memberikan arti *laïcité* yang lebih luas kepada warga negaranya, yaitu hak mereka untuk percaya atau tidak percaya terhadap ajaran agama tertentu, dan akhirnya mempertimbangkan apakah diri mereka telah beradaptasi dalam mayoritas budaya sekuler di negara Prancis.

Oleh karena itu dalam pandangan Lazar, *laïcité* adalah sebuah konsep yang harus memberikan aturan yang benar dan berdasar, dan yang sedang

berusaha untuk mendapatkan pengakuan secara penuh di Republik Prancis. Di masa depan, *laïcité* diharapkan dapat mewujudkan persatuan tidak hanya bagi warga negara Prancis, tetapi semua warga negara Eropa, serta merealisasikan keterpaduan masyarakat yang terdiri dari kekayaan keragaman budaya.

Dari beberapa teori yang diungkapkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *laïcité* adalah konsep yang menjadikan negara Prancis sebagai negara yang sekuler, yaitu negara yang memisahkan antara urusan-urusan politik kenegaraan dengan organisasi-organisasi keagamaan. Maka negara tidak turut campur, atau tidak ikut mengurus kegiatan-kegiatan keagamaan yang dijalankan oleh warganya. Negara bersikap tetap netral. Tetapi tidak sampai disitu saja, konsep *laïcité* mengindikasikan bahwa negara mendukung kebebasan setiap individu untuk melaksanakan kegiatan ibadat dalam ruang pribadi (Tania, 2012 : 55). Prancis menjamin kebebasan peribadatan, artinya tetap merespek kegiatan keagamaan kalangan umum. Prancis juga seharusnya secara tegas menjamin kebebasan dari kepercayaan setiap individu, tidak soal jenis kepercayaan apa yang mereka anut. Selaras dengan prinsip *égalité* dalam semboyan negara Prancis, yang berarti persamaan atau kesetaraan, maka semua warga negara memiliki hak yang sama, dan dijamin oleh hukum.

Di sisi lain, konsep *laïcité* juga telah menghindarkan Prancis dari berbagai peperangan dan konflik. Catatan sejarah membuktikan bahwa kebanyakan konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Eropa diakibatkan oleh intoleransi antar agama atau ras. (André, 2004 : 68). *Laïcité* berupaya memerangi konflik-konflik semacam itu, karena konsep dasarnya adalah menghargai perbedaan yang ada

serta mencegah keragaman agama dan ideologi menjadi dalih untuk terjadinya konflik. "Pengakuan atas martabat yang melekat dari semua manusia dan hak mereka yang sama adalah landasan dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia" (Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Bangsa Eropa banyak terlibat dalam peperangan besar sehingga warganya sangat menghargai pentingnya kedamaian dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Konsep *laïcité* merupakan sikap netralitas yang dibangun oleh negara Prancis berupa tindakan toleransi untuk menghapus dominasi suatu golongan tertentu. Sebagai sebuah tindakan toleransi, *laïcité* tidak memaksakan suatu dogma, ajaran, maupun keyakinan tertentu (André, 2004 : 67). Sebaliknya, konsep ini memberikan kebebasan kepada setiap orang pilihan dalam kehidupan spiritualnya, baik beragama, agnostik (memiliki agama tetapi ragu akan adanya Tuhan karena segala sesuatu hanya diakui keberadaannya melalui bukti nyata) atau bahkan ateisme (tidak mempercayai adanya Tuhan). Semua orang yang memiliki maupun tidak memiliki agama sama-sama dihormati. Keyakinan agama tidak menjadi persoalan dalam menentukan status, hak, dan kebebasan seseorang.

Laïcité menegaskan kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum, menerima segala perbedaan yang ada, serta mengakui adanya pluralisme (keanekaragaman). Hal ini penting karena Prancis merupakan sebuah negara multikultural. Karena banyaknya keragaman itu, maka di bidang keyakinan pribadi, *laïcité* tidak mengenal istilah superioritas (keunggulan/kedudukan yang lebih tinggi) maupun inferioritas (kedudukan yang lebih rendah). Bersifat *laïque* berarti mengatakan atas nama kebebasan hati nurani bahwa keragaman yang ada

harus diterima dan diakui sebagai hak, karena itu adalah manifestasi dari berbagai cara bahwa pemikiran manusia diperlukan untuk memberi arti bagi hidupnya.

Laïcité sering kali disamakan dengan prinsip sekularisme. Secara umum sekularisme dan *laïcité* memang sama-sama merupakan sebuah konsep peletakan urusan agama ke dalam wilayah pribadi dari kehidupan seseorang. Namun, letak perbedaan di antara kedua istilah tersebut adalah bahwa konsep *laïcité* memisahkan setiap unsur agama dalam urusan dan kepentingan negara. Sementara sekularisme lebih condong kepada pemisahan unsur agama dari setiap kepentingan seseorang, baik di ranah pribadi maupun publik (Arviani, 2010 : 27). Maka dapat dikatakan bahwa *laïcité* merupakan sebuah sistem yang lebih menyangkut kepada kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi seseorang dalam penerapannya.

B.1 Sejarah *Laïcité* di Prancis

Negara Prancis mempunyai sejarah pahit akibat dari pencampuran antara kekuasaan politik dengan kekuasaan agama. Pencampuran kedua kekuasaan tersebut berarti para pemimpin gereja memegang peranan penting dalam struktur pemerintahan negara. *Laïcité* di Prancis lahir akibat penderitaan yang dialami masyarakat Prancis pada saat sistem pemerintahannya begitu dikuasai oleh agama Katolik. Pada saat itu, masyarakat Prancis diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh para pemimpin politik yang juga menjabat sebagai rohaniwan agama. Dalam sejarahnya, agama Katolik yang benar-benar menjadi keyakinan bulat semua masyarakat Prancis sudah berurat berakar sejak zaman dahulu kala. Bahkan

agama Katolik sempat ditetapkan sebagai agama negara atau agama nasional Prancis melalui Perjanjian Bologna yang disahkan pada tahun 1516 (Bruley, 2005 : 24). Namun, kemunculan agama Protestan yang pada mulanya tumbuh dengan subur di Jerman mulai berkembang di negara-negara Eropa lainnya, termasuk Prancis. Dalam waktu singkat, agama Protestan memperoleh banyak pengikut sehingga agama tersebut juga menjadi agama resmi dalam Kekaisaran Romawi.

Sebagai akibatnya, agama Katolik bukanlah lagi satu-satunya agama yang diakui secara resmi oleh negara Prancis. Perkembangan pesat agama Protestan menimbulkan pertikaian yang semakin serius antara agama Katolik dan Protestan. Kondisi ini berpengaruh pada sistem politik Prancis. Persatuan negara Prancis pada saat itu berada dalam bahaya ketika kekuasaan politik menjadi tidak berdaya, dan tunduk kepada tekanan Katolik. Maka pecahlah perang agama yang melibatkan kerajaan-kerajaan di Prancis. Peristiwa tragis lainnya juga terjadi di Saint- Barthélemy. Saat itu, ribuan umat Protestan di Prancis dibunuh akibat konflik yang memanas atas nama kekuasaan agama (Carpentier & Lebrun, 2000 : 184). Abad ke-14 dan 15 merupakan masa penuh tantangan bagi Prancis karena terus-menerus diliputi peperangan. Di tengah berkecamuknya prahara tersebut, gereja Katolik mengalami krisis intern yang parah.

Keterikatan antara kekuasaan politik dengan agama yang masih sangat erat terus berlangsung hingga abad ke-17 sehingga mengakibatkan tragedi yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Prancis. Gereja Katolik mempertahankan monopoli agama terhadap urusan negara, termasuk dalam bidang pendidikan bagi

anak-anak. Meskipun tetap setia kepada agama Katolik, masyarakat Prancis terus menggerutu akibat beratnya beban yang harus mereka tanggung. Mereka diharuskan untuk membayar persepuluhan dan pajak yang lebih tinggi nilainya akibat keserakahan para imam. Namun, masyarakat Prancis kala itu menganggap raja sebagai perpanjangan tangan paus dan sebagai perantara antara Tuhan dan umat-Nya di bumi. Oleh sebab itu, mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh kerajaan melalui gereja adalah hal yang wajar, bahkan merupakan tuntutan dari Tuhan.

Memasuki abad ke-18 yang lebih dikenal sebagai abad pencerahan (*Renaissance*), rasa ingin tahu manusia dan semangat untuk belajar semakin berkembang. Abad ke-18 diawali dengan munculnya ide-ide cara bernalar yang kritis sebagai bentuk semakin berkembangnya pola pikir manusia. Abad ke-18 muncul sebagai waktu pembebasan bagi masyarakat Prancis (André, 2004 : 17). Kekuasaan raja mulai melemah dan raja tidak lagi dilindungi karena agama dan kepercayaan serta hal-hal yang bersifat spiritual mulai diragukan. Karena kekuasaan raja tidak lagi dilindungi oleh gereja, hal ini membuka peluang bagi masyarakat Prancis untuk mendapatkan hak kebebasan mereka serta melepaskan diri dari kekuasaan gereja.

Hasil pemikiran para filsuf pada saat itu juga turut mempengaruhi proses pemisahan antara urusan negara dengan agama. Sebagian besar filsuf abad ke-18 yang merupakan penganut déisme menyatakan bahwa bagi mereka, Allah adalah penggerak utama dari alam semesta. Oleh karena itu, untuk mengatur urusan negara, mereka menganggap doa dan imam tidaklah ada hubungannya. Mereka

menolak paus dan pendeta yang disebut-sebut berbicara atas nama Allah. Mereka menentang keras pemimpin gereja untuk campur tangan dalam keputusan yang dibuat negara, untuk memimpin masyarakat, menetapkan adat dan sopan santun, ataupun untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak (Carpentier & Lebrun, 2000 : 223).

Abad Pencerahan juga membuka kesempatan untuk membentuk suatu pemerintahan demokratis yang mengutamakan kesetaraan warga negara di hadapan hukum dan pendidikan untuk seluruh masyarakat Prancis. Dimulai pada tahun 1789, Revolusi Prancis membawa banyak perubahan penting. Persamaan hak diberikan kepada seluruh masyarakat dari kalangan agama manapun. Tetapi, agar negara netral terhadap semua agama maupun kepercayaan, maka negara tidak menetapkan suatu agama atau kepercayaan nasional. Dasar kekuasaan negara adalah politik, bukan agama atau suatu kitab suci. Melalui Revolusi Prancis, kekuasaan pemerintah diserahkan kepada negara, dan agama tidak berhak lagi untuk ikut campur didalamnya.

Dalam pemerintahan Prancis yang baru setelah munculnya revolusi 1789, ditetapkan juga bahwa segala jenis keterikatan antara agama dengan urusan politik harus diputuskan. Namun karena belum ada konstitusi yang secara resmi menetapkan pemisahan tersebut, maka pada tahun 1795 dewan eksekutif di wilayah kota Paris mengesahkan konstitusi pertama yang secara tegas memisahkan urusan agama dengan urusan negara (Bruley, 2005 : 37). Konstitusi tersebut berisi dua pernyataan utama tentang prinsip pemisahan gereja dan negara, sebagai berikut : “*L’Église est séparée de l’État*” (pasal pertama), *Le budget des*

cultes est supprimé” (pasal kedua). Pernyataan dalam kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa gereja ditempatkan dalam posisi yang terpisah dari negara, dan negara menunjukkan sikap kenetralannya terhadap agama. Kenetralan ini dibuktikan dengan dihapuskannya pemberian subsidi atau bantuan finansial dari pemerintah terhadap bentuk kegiatan agama apapun.

Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak imigran dan pendatang yang menetap di Prancis. Para imigran yang awalnya datang ke Prancis dengan niat untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan pada akhirnya memilih untuk menetap di Prancis. Para pendatang dari berbagai macam negeri dan daerah ini membawa ideologi dan kebudayaan mereka masing-masing sehingga cukup menimbulkan masalah nasional. Karena masalah ini terus berlangsung dan menyebabkan konflik dan ketegangan yang berkepanjangan maka parlemen Prancis memberlakukan undang-undang pemisahan gereja dan negara (*La loi de séparation des Églises et de l'État*) pada tahun 1905 (Bruley, 2005 : 111)

Pasal pertama dari undang-undang tersebut menyatakan : “*La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public*”. Sementara itu pasal kedua berbunyi : “ *La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte*”. Dua pasal dari bab pertama tersebut dengan jelas menyatakan bahwa netralitas negara bersifat penuh. Maka agama ditempatkan dalam wilayah pribadi, baik secara individual maupun kolektif. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut juga menyiratkan bahwa sebagai sebuah negara republik *laïque*, Prancis tidak turut campur dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh warga

negaranya. Hal tersebut juga mencakup tidak membiayai atau memberikan subsidi atau dukungan finansial dalam rangka membantu pemeliharaan tempat ibadat maupun mendukung kegiatan ibadat umum.

Kedudukan negara Prancis sebagai sebuah republik *laïque* dan penekanan kembali prinsip *laïcité* juga tercantum dalam konstitusi negara Prancis pada republik keempat (1946) yang menyatakan “*La France est une République laïque*”. Pengertian ini ditandaskan kembali dalam konstitusi pada republik kelima (1958) pasal 2 yang menyatakan : “*La France est une République indivisible, laïque, démocratique, et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion* (André, 2004 : 57). Pasal tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa sejak saat itu Prancis ditetapkan sebagai sebuah negara republik *laïque*. Hal ini juga menunjukkan pentingnya prinsip *laïcité* bagi kehidupan masyarakat Prancis yang sebelumnya sempat diwarnai dengan berbagai konflik akibat perebutan kekuasaan antara gereja dan pemerintah.

C. Hakikat Sistem Pendidikan di Prancis

Sistem pendidikan merupakan komponen pokok dari kehidupan masyarakat Prancis. Dalam sejarahnya, sistem pendidikan di Prancis telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Hal ini dijelaskan secara rinci oleh Léon & Roche (2003) dalam buku mereka *Histoire de l’Enseignement en France*. Dimulai dari peradaban Yunani-Romawi (*Gallo-Romain*), yaitu sepanjang abad ke-1 sampai ke-5. Pada saat itu sistem pendidikan di Prancis

terdiri dari 3 tingkatan, yaitu *école primaire* (sekolah dasar), *école secondaire* (sekolah menengah), dan *école supérieure* (sekolah tinggi). Pada masa ini kekuasaan gereja atas sistem pendidikan sangat dominan dan diakui oleh undang-undang. Sekolah-sekolah Kristen pertama mulai muncul dalam pengembangan universitas selama Abad Pertengahan (*Moyen Âge*), yaitu abad ke-6 sampai ke-15. Sekolah-sekolah tersebut adalah *les écoles monastiques ou claustrales* (sekolah-sekolah biara atau monastik), *les écoles épiscopales ou cathédrales* (sekolah keuskupan atau katedral), dan *les écoles presbytériales ou paroissiales* (sekolah pendeta atau paroki). Di akhir abad pertengahan, universitas pertama didirikan di Prancis. Sistem pendidikan selama abad pertengahan tetap dikuasai dan diawasi oleh keuskupan gereja Katolik karena gereja Katolik memiliki kekayaan yang berlimpah.

Selanjutnya, pengembangan pendidikan menengah terjadi pada masa pemerintahan Rezim lama (*Ancien Régime*), yaitu selama abad ke-16 sampai ke-18. Selama masa ini terbentuk pula *les collèges des facultés des arts* (perguruan tinggi fakultas seni), dan *les collèges des congrégations* (sekolah tinggi jemaat). Selain itu, gerakan pendirian universitas dan *écoles techniques* (politeknik) dimulai pada abad ke-12, dan berlanjut selama pemerintahan rezim lama.

Proses sekularisasi pendidikan dan pembentukan kekuasaan Napoleon atas pendidikan mulai terjadi selama periode tahun 1789-1815. Hal ini ditandai dengan penghapusan monopoli Gereja atas sekolah-sekolah. Administrasi pendidikan dipercayakan kepada Komisi Jenderal Pendidikan yang anggotanya ditunjuk oleh raja. Kebebasan untuk bersekolah diakui oleh undang-undang dan terbuka untuk

semua warga negara. Prinsip pembebasan biaya ditujukan untuk sekolah tingkat dasar, tetapi belum disertai dengan prinsip wajib belajar maupun prinsip sekuler. Sebagian besar staf pengajar terdiri dari kaum rohaniwan. Ada 4 jenis tingkat pendidikan yang disediakan oleh negara, yaitu *écoles primaire* (sekolah dasar), *école secondaire* (sekolah menengah), *lycée* (sekolah lanjutan), dan *école spéciale* (sekolah khusus). Sekularisasi sekolah-sekolah dan kemajuan pendidikan populer khususnya terlihat di abad ke-19, yaitu sepanjang tahun 1815-1875. Selama tahun-tahun terakhir dari masa kekaisaran kedua (*Second Empire*) dan fase konservatif selama republik ketiga, *La Ligue de l'enseignement* (Liga Pendidikan) didirikan pada tahun 1866 oleh J.Mace. Lembaga ini berupaya memelihara situasi yang kondusif dan mengutamakan pendidikan yang bebas biaya, wajib, dan bersifat sekuler (*laïque*), sehingga mempersiapkan perumusan berbagai undang-undang yang penting selama tahun 1880-an.

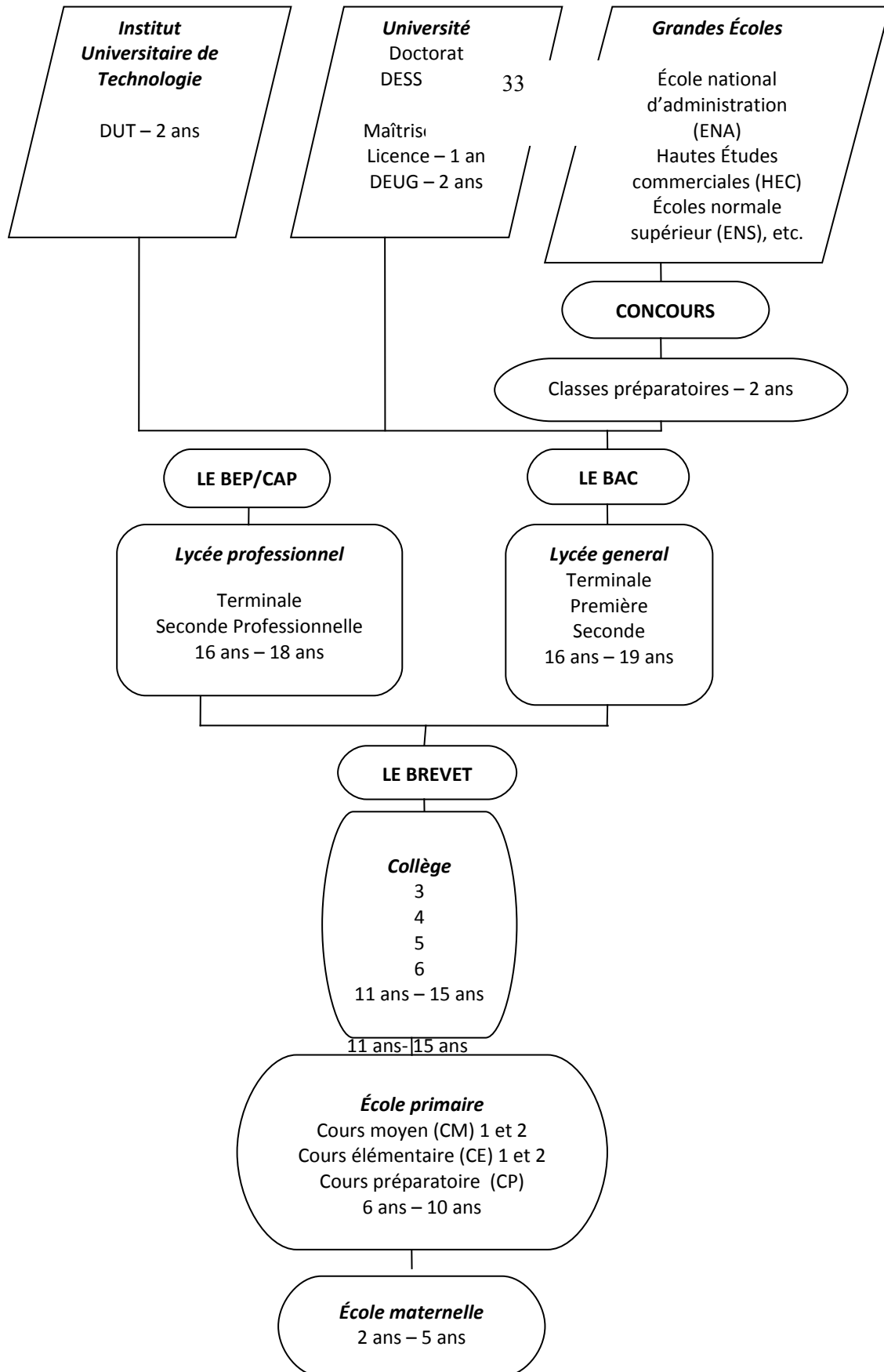
Motivasi yang mendorong para orang tua mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah swasta sudah sangat berubah. Sampai tahun 50-an, orang tua memilih pendidikan swasta dengan alasan permusuhan terhadap sekolah sekuler negara. Tetapi lama kelamaan faktor agama ini cenderung memudar. Pada kenyataannya kebanyakan sekolah swasta justru tidak menyediakan pengajaran agama. Pendidikan agama yang sewajarnya diberikan oleh lembaga swasta malah ditugaskan ke paroki-paroki gereja, yaitu kediaman pastor atau pendeta Katolik (Vasconcellos, 1993 : 18). Selain itu, alasan agama tidak lagi memainkan peran penting karena dalam kehidupan masyarakat Prancis, agama bukan lagi merupakan faktor esensial. Menurut sebuah survei yang diadakan oleh IFOP

(*Institut français d'opinion publique*) pada tahun 1982, hal ini berkaitan dengan alasan pedagogis. Survei ini dilakukan ketika para orang tua memilih sekolah swasta untuk anak-anak mereka. Hasil survei menunjukkan bahwa alasan para orang tua memilih program pendidikan swasta bagi anak-anak mereka menyangkut pada kemungkinan sistem pengajaran dengan pemantauan yang tinggi, disiplin, kualitas guru, hubungan baik antara orangtua dan guru, serta metode pengajaran original yang digunakan. Sekolah swasta dianggap mampu untuk mengadakan pengawasan dan disiplin yang ketat terhadap anak-anak karena dipimpin oleh para rohaniwan agama. Dalam hasil survei tersebut dikutip juga bahwa sekolah swasta dianggap sebagai pembentuk karakter kemanusiaan dan moral terbaik bagi anak-anak. Saat ini di Prancis, sekolah bersifat wajib bagi seluruh warga negara sampai usia 16 tahun dan bebas biaya dimulai dari taman kanak-kanak hingga universitas (biaya universitas sangat rendah). Sekolah adalah bentuk pelayanan publik yang mencakup sekolah negeri (*école publique*) dan sekolah swasta (*école privée*) di bawah kontrak dengan negara. Sekolah bersifat sekuler (*laïque*), dan sistem pendidikan di Prancis sekarang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu :

- A. Tingkat pertama terdiri dari *école maternelle* (taman kanak-kanak, tidak diwajibkan) dan *école primaire* (sekolah dasar).
- B. Tingkat kedua terdiri dari *collège* (sekolah menengah) dan *lycée* (sekolah lanjutan).

C. Pendidikan Tinggi (Universitas) dan *grandes écoles* (sekolah tinggi).

Le Système Éducatif en France



II.2 Sintesis Teori

34

Berdasarkan teo

lah

Source : Steele, Ross. (2002 : 113). *Civilisation Progressive du Français- Niveau intermédiaire*. CLE International / VUEF.

penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa sekularisme adalah suatu paham atau ideologi dimana agama tidak lagi ditempatkan sebagai hal yang utama dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa terjadi akibat berbagai faktor, seperti misalnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga membentuk pola pikir manusia yang rasional. Faktor lainnya adalah terjadinya kondisi atau sejarah di masa lampau yang tidak menyenangkan akibat pencampuran antara kekuasaan agama dan negara. Selaras dengan hal tersebut, paham *laïcité* merupakan sebuah konsep sekuler yang menjadikan Prancis sebagai negara yang memisahkan antara urusan politik kenegaraan dengan urusan keagamaan.

Laïcité di Prancis terbentuk karena pengalaman traumatik masa lalu Prancis saat struktur pemerintahannya berada di bawah wewenang gereja. Gereja Katolik mendominasi kehidupan masyarakat Prancis pada umumnya dan terutama dalam bidang pendidikan. Konsep ini terkadang menimbulkan dua nilai yang tampaknya bertentangan dalam pengaplikasiannya di masyarakat. Di satu sisi, Prancis tidak ikut campur dalam kegiatan-kegiatan agama yang dijalankan oleh warganya. Di sisi lain, Prancis terkesan memposisikan diri sebagai negara yang anti-agama. Namun pada dasarnya, prinsip umum *laïcité* adalah kebebasan dan rasa menghargai segala perbedaan yang ada. Prinsip *laïcité* yang telah menjadi tradisi dan identitas negara Prancis didasari oleh kebebasan hati nurani, kesetaraan

antara pria dan wanita, kesetaraan kesempatan, persamaan hak dan kewajiban, serta rasa persaudaraan antar sesama warga negara tanpa melihat latar belakang tiap-tiap individu. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak ada pengecualian untuk alasan apapun.

Kenetralan Prancis sebagai sebuah negara republik *laïque* berarti bahwa Prancis tidak memberikan hak istimewa atau mengutamakan sebuah agama maupun kepercayaan tertentu yang dianut oleh warga negaranya. Di Prancis, penegasan prinsip *laïcité* dengan aplikasi nyatanya merupakan dua hal yang sejalan, yaitu pemisahan antara gereja dan negara serta penolakan untuk mengadaptasi budaya agama apapun dalam sistem pemerintahan. Dalam hal ini khususnya adalah budaya Katolik yang sempat menjalankan kekuasaannya atas sistem pemerintahan Prancis. Pada awalnya istilah *laïcité* itu sendiri dipahami hanya dalam dimensi kegiatan ibadat suatu agama. Namun, istilah tersebut berkembang artinya dalam lingkup budaya. Perkembangan ini tidak hanya memperluas makna *laïcité* dalam lingkup ibadat kepada lingkup budaya tetapi juga mengubah definisi negatif (pemisahan) ke ekspresi yang lebih positif (persamaan).

Karakter *laïcité* yang dianut negara Prancis pada dasarnya mencakup tiga prinsip utama. Ketiga prinsip tersebut adalah jaminan atas kebebasan hati nurani setiap orang, tidak adanya pengakuan dari negara atas agama atau interpretasi agama apapun serta subsidi atau bantuan finansial dari pemerintah untuk bentuk kegiatan agama apapun yang dijalankan oleh warga negara, serta jaminan atas persamaan hak dan kedudukan seluruh warga negara Prancis di hadapan hukum

tanpa adanya perbedaan dalam hal suku, ras, maupun agama. Prinsip pertama dan kedua dilandasi oleh kedua pasal pertama dari undang-undang pemisahan gereja dan negara yang disahkan di Prancis pada tahun 1905. Sementara prinsip ketiga didasarkan pada kalimat dalam pasal pertama dari konstitusi Prancis yang disahkan di bawah pemerintahan republik kelima tahun 1958. Ketiga prinsip ini akan digunakan sebagai dasar empiris yang menjadi acuan dalam menganalisis data-data, baik berupa pernyataan maupun kalimat dalam paragraf. Hingga saat ini konsep *laïcité* telah banyak berdampak terhadap kehidupan masyarakat Prancis khususnya dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat Prancis. Hal ini dibuktikan dengan besarnya peran dan perhatian pemerintah terhadap segi pendidikan. Sebagai sebuah negara multikultural, penerapan konsep *laïcité* di Prancis mendapat reaksi yang berbeda-beda terutama dari kaum pendatang, baik itu imigran maupun warga negara asing.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen tertulis dari 2 buku yaitu *Histoire de la Laïcité à la Française* (Yves, 2005), dan *Un œil Sur La Laïcité* (André, 2004). Sementara itu sumber data tambahan yang digunakan adalah 6 artikel yang diambil dari situs *le monde.fr* dan *le Figaro.fr*. Artikel-artikel tersebut berjudul *L'Ouverture d'un lycée musulman autorisée à Lille* (diterbitkan pada Juli 2003), *Ouverture d'un collège musulman à Vitry* (diterbitkan pada Maret 2008), *Laïcité : proposition de loi du PG* (diterbitkan pada April 2011), *Une étudiante voilée brièvement exclue* (diterbitkan pada Januari 2013), *L'Opinion contre le foulard dans le privé* (diterbitkan pada Maret 2013), dan yang terakhir *Morale à l'école : retour prévu en 2015* (diterbitkan

pada April 2013). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman. Kedua tokoh ini mengemukakan dalam buku mereka bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu *reduksi data*, *penyajian data*, dan *penarikan kesimpulan/verifikasi* (1992 : 16).

Tahap pertama, yaitu *reduksi data*, merupakan sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, serta menulis memo. Reduksi data/ proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Proses reduksi data yang dilakukan terhadap salah satu sumber data utama yaitu *Un œil sur La Laïcité* dimulai dengan pemilihan kalimat-kalimat dalam paragraf yang mengacu pada karakter *laïcité* yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai contoh, pada halaman 39 dari sumber data tersebut, ditemukan kalimat sebagai berikut : “*La loi du mars 1882 décide la neutralité de l’école publique et l’abandon de l’éducation religieuse*”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa undang-undang menetapkan kenetralan sekolah-sekolah negeri di Prancis melalui

penghapusan pendidikan agama. Pernyataan bahwa *pendidikan agama dihapus* merupakan bagian data yang dikode dan selanjutnya diarahkan sebagai bentuk dampak paham sekuler *laïcité* pada sistem pendidikan di Prancis. Keputusan pemerintah melalui undang-undang ini digolongkan sebagai karakter *laïcité* yang salah satunya adalah tidak adanya pengakuan negara terhadap agama apapun.

Langkah kedua adalah *penyajian data*. Miles dan Huberman (1992 : 17) memaknai penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif. Penyajian data dalam penelitian kualitatif juga meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semua ini dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk terpadu yang mudah dipahami. Sebagaimana halnya reduksi data, penciptaan dan penggunaan penyajian data tidaklah terpisah dari analisis. Penyajian data merupakan bagian dari analisis.

Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel. Untuk itu, peneliti menyusun sebuah tabel. Kolom-kolom dalam tabel tersebut berisi nomor, tahun, peristiwa, karakteristik *laïcité*, dan keterangan. Kolom karakteristik *laïcité* dibagi kembali menjadi 3 sub-kolom, yaitu menjamin kebebasan hati nurani, tidak adanya pengakuan, bayaran, subsidi, atau bantuan finansial terhadap kegiatan agama apapun, serta menjamin persamaan hak dan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum tanpa membedakan suku, ras, atau agama mereka.

Untuk memperjelas proses penyajian data, peneliti kembali menggunakan sumber data utama *Un œil sur La Laïcité* sebagai contoh. Pada halaman 39 dari dokumen tertulis tersebut, terdapat kalimat : “*L’enseignement du catéchisme peut être donné au jour de repos, le jeudi, en dehors de l’école*”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pengajaran ³⁹ (gama Kristen), dapat diberikan kepada anak-anak pada hari istirahat, yaitu hari Kamis, namun berlokasi di luar sekolah. Pada kolom tahun, peneliti mencantumkan tahun 1882 karena pada tahun itulah keputusan tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, peneliti menempatkan tanda ceklis (√) pada subkolom karakter *laïcité* yaitu menjamin kebebasan hati nurani. Pada kolom keterangan, dijelaskan bahwa hal ini cocok karena anak-anak di Prancis tetap bisa mendapatkan pengajaran agama sesuai dengan keyakinan agama mereka masing-masing, meskipun pemerintah menghapuskan pendidikan agama dari kurikulum sekolah negeri.

Tahap yang terakhir adalah *penarikan kesimpulan/verifikasi*. Dalam pandangan Miles dan Huberman (1992 : 19), kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Verifikasi tersebut mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Secara singkat, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya, atau yang disebut sebagai validitas data.

Dari awal permulaan pengumpulan data, peneliti selalu mengacu pada tiga karakter utama *laïcité* yang menjadi acuan dalam menganalisis data. Acuan yang

kelas ini membantu peneliti untuk membuat kesimpulan yang tepat dan melakukan verifikasi terhadap data-data yang diperoleh. Sebagai contoh, dalam sumber data utama *Un œil sur La Laïcité* halaman 39, ditemukan kalimat sebagai berikut :
“*Dans les programmes scolaires, l’enseignement du catéchisme est remplacé par celui d’une morale laïque basée sur les valeurs universelles de respect des autres et de soi-même, des droits et des devoirs du citoyen*”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa dalam kurikulum sekolah, pengajaran agama digantikan oleh *moral laïque* yang didasarkan pada nilai-nilai universal untuk menghormati orang lain dan diri sendiri, serta pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara.

Untuk melakukan verifikasi data, peneliti mengambil sebuah artikel dari situs *le figaro.fr* yang berjudul *Morale à l’école : retour prévu en 2015*. Dalam artikel tersebut terdapat sebuah kalimat sebagai berikut : “*L’enseignement de la morale laïque devrait faire son retour à l’école en France, du CP à la terminale, à la rentrée de Septembre 2012, annonce le ministre de l’éducation nationale, Vincent Peillon*”. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa Vincent Peillon sebagai menteri pendidikan nasional Prancis mengumumkan rencana pengembangan ajaran *moral laïque* dari sekolah tingkat dasar hingga lanjutan. Mengacu pada keputusan pemerintah Prancis di tahun 1882 tentang digantikannya pendidikan agama dengan pendidikan *moral laïque*, maka proyek yang diajukan Peillon menjadi bukti kebenaran data tersebut. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan pemerintah Prancis dalam menggantikan pendidikan agama dengan pengajaran *moral laïque* mencerminkan salah satu karakter *laïcité* yaitu tidak adanya pengakuan negara terhadap agama apapun. Dengan kata lain, tidak

ada agama yang dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada agama lainnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN

III.1 Interpretasi

Untuk memahami karakteristik sesungguhnya dari *laïcité* dan sekaligus memudahkan dalam melakukan analisis data, pernyataan dalam dua pasal pertama dari undang-undang pemisahan gereja dan negara (*La loi de séparation des Églises et de l'État*) 1905 serta kalimat dalam pasal kedua dari konstitusi 1958 akan dijadikan acuan. Pasal pertama dalam undang-undang tersebut menyatakan : “*La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public*” (Republik menjamin kebebasan hati nurani. Republik juga menjamin kebebasan beribadah, selama hal tersebut selaras dengan ketentuan pembatasan yang diberlakukan demi ketertiban umum).

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa karakter dasar yang terutama dari konsep *laïcité* adalah jaminan akan kebebasan hati nurani. Kebebasan hati nurani mencakup kebebasan setiap warga negara Prancis untuk percaya ataupun tidak percaya akan suatu agama. Kebebasan ini bukan sekedar kebebasan untuk menjalankan kegiatan agama melainkan termasuk juga kebebasan bagi setiap individu untuk menentukan pilihan dalam kehidupan spiritualnya, entah itu beragama, beribadah, bentuk keyakinan, bahkan ateis dan agnostik sekalipun. Negara melindungi kebebasan masyarakat dalam soal agama bukan karena nilai

metafisik dari agama tersebut melainkan demi menghormati kebebasan hati nurani mereka. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak serta-merta menjadi tanpa kendali, melainkan tetap dibatasi oleh undang-undang yang berlaku demi kepentingan umum. Maka dalam hal pendidikan, setiap siswa berhak menjalankan kegiatan ibadat atau mendapat pengajaran sesuai dengan agama yang mereka anut, selama hal tersebut selaras dengan undang-undang dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Selanjutnya pasal kedua dalam undang-undang 1905 tersebut berbunyi demikian : *“La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1^{er} janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons”* (Republik tidak mengakui, membayar atau mensubsidi kegiatan agama apapun. Sebagai konsekuensi, mulai tanggal 1 Januari setelah undang-undang ini disahkan, pengeluaran untuk kegiatan yang bersifat keagamaan akan dihapus dari anggaran pengeluaran negara, departemen, dan kotamadya. Termasuk juga dalam daftar anggaran belanja negara untuk pelayanan kerohanian serta memastikan kebebasan beribadat di lembaga publik seperti sekolah lanjutan, sekolah menengah, sekolah dasar, rumah sakit, panti-panti dan penjara).

Kalimat bahwa Republik tidak mengakui agama apapun, bukan berarti bahwa Prancis adalah negara yang anti-agama (ateis) atau menganggap bahwa agama-agama yang ada di Prancis sebenarnya “tidak ada”. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa negara Prancis bukanlah negara yang berdasarkan pada sistem keagamaan dalam struktur p⁴³ Prancis tidak mengunggulkan kepercayaan atau agama apapun. Tidak ada agama yang dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah dibanding agama lainnya. Prancis juga tidak lagi menganggap kegiatan agama sebagai bentuk pelayanan publik. Selain itu, kekuatan politik tidak bisa campur tangan dalam bidang spiritual. Demikian pula sebaliknya, gereja tidak memiliki wewenang untuk menangani hal-hal duniawi, termasuk dalam mengatur dan menyediakan sistem pendidikan bagi anak-anak. Maka sistem pendidikan di Prancis tidak mencerminkan atau merepresentasikan suatu kepercayaan atau agama tertentu karena hal ini dapat mengarah kepada bentuk diskriminasi. Dengan kata lain, dalam bentuk apapun, unsur-unsur religius tidak ditampilkan dalam dunia pendidikan.

Lebih lanjut, pernyataan dalam pasal kedua tersebut juga menyebutkan bahwa Prancis tidak mendanai atau memberikan subsidi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh warga negaranya. Hal ini juga mencakup kegiatan yang diadakan oleh lembaga keagamaan seperti misalnya sekolah swasta (*école privée*). Dalam sistem pendidikan swasta, pengajaran agama diberikan dan bahkan beberapa sekolah swasta merupakan sekolah yang berdiri di bawah naungan agama tertentu. Perlu diingat bahwa sebelum terbentuknya konsep *laïcité*, gereja Katolik sangat mendominasi struktur kehidupan masyarakat

Prancis, khususnya dalam bidang pendidikan. Pada saat itu, pendidikan bagi anak-anak menjadi perhatian penting bagi umat Katolik. Dalam pandangan kaum rohaniwan, pendidikan agama merupakan hal yang paling utama untuk diberikan kepada anak-anak. Pada saat itu pula kaum rohaniwan Katolik berhak untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dan bahkan gereja Katolik mengadakan pengawasan yang ketat dalam sekolah-sekolah di Prancis. Pengawasan tersebut dilakukan terutama kepada para pengajar di sekolah-sekolah. Alasan lain mengapa gereja Katolik menguasai dan mengawasi sistem pendidikan pada saat itu adalah karena memiliki kekayaan yang berlimpah yang berasal dari pajak bernilai tinggi yang dibayarkan warga negara sehingga mampu untuk mendirikan berbagai sekolah keagamaan selain dari sekolah umum.

Situasi pendidikan di Prancis pada saat itu sangat menguntungkan bagi kaum rohaniwan Katolik. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa jumlah kaum rohaniwan meningkat seiring dengan meningkatnya pula jumlah sekolah-sekolah Katolik yang mereka kelola. Dengan meningkatnya jumlah murid mereka dan meningkatnya kaum rohaniwan Katolik yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut, maka persentase praktek keagamaan di dalam masyarakat Prancis pun mengalami peningkatan dan tentu saja kondisi ini menambah kekayaan gereja. Kontras dengan situasi tersebut, para pendukung republik merasa bahwa dominasi gereja Katolik dalam bidang pendidikan sangat membahayakan karena melalui pendidikan, gereja dapat membentuk anak-anak Prancis menjadi pendukung gereja dan kaum Katolik yang konservatif (Soetedjo, 1991 : 22).

Bagi para pendukung republik, tingginya pengaruh kaum rohaniwan dalam pendidikan merupakan hambatan utama dalam tujuan membentuk Prancis sebagai negara demokrasi liberal yang menjunjung tinggi kebebasan masyarakatnya. Kaum rohaniwan yang mempunyai cara pandang yang berbeda dengan para pendukung republik tentu saja akan mengajarkan cara berpikir dan sudut pandang yang berbeda pula kepada anak-anak⁴⁵ konsep-konsep pemikiran dan doktrin agama sehingga membentuk pola pikir yang sempit dan bahkan menutup kemajuan berpikir. Menurut para pendukung republik, sekolah merupakan media untuk menyampaikan pengajaran tentang kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Mereka beranggapan demikian karena untuk membentuk sebuah negara demokrasi liberal diperlukan pemimpin rakyat yang memiliki kesadaran dan kecerdasan politik yang tinggi, bukan pengetahuan agama. Dengan demikian para pendukung republik merasa bahwa pengaruh gereja Katolik dalam pendidikan harus dilemahkan atau bahkan dihilangkan. Sebagai implikasi dari karakter ini, pendidikan swasta menjalankan seluruh kegiatannya dengan dana pribadi dan terlepas dari bantuan pemerintah. Karena tidak mendapat subsidi negara, maka biaya pendidikan pada lembaga swasta jauh lebih tinggi dibanding biaya pada sekolah negeri.

Karakter *laïcité* yang dianut oleh republik Prancis juga diidentifikasi dalam konstitusi republik kelima yang disahkan pada tahun 1958. Pasal pertama dalam konstitusi tersebut menyatakan : *“La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte*

toutes les croyances” (Prancis adalah sebuah republik yang bersatu, *laïque*, demokrasi, dan sosial. Prancis menjamin persamaan seluruh warga negaranya di hadapan umum tanpa membedakan suku, ras, atau agama mereka. Prancis merespek semua bentuk keyakinan). Berpijak pada pernyataan tersebut maka karakter ketiga dari konsep *laïcité* di Prancis adalah kesetaraan. Sebagai sebuah republik *laïque*, Prancis menegaskan kesetaraan yang ketat bagi semua warga negaranya karena kesetaraan yang sesungguhnya tidak akan tercapai apabila hukum tidak diterapkan dengan sama bagi seluruh warga negara.

Prancis menempatkan seluruh warga negaranya dalam posisi yang sama di hadapan umum, menerima segala perbedaan yang ada, serta mengakui adanya pluralisme (keanekaragaman). Perbedaan tersebut mencakup keragaman pilihan spiritual dalam kehidupan setiap orang. Maka dalam hal pendidikan, seluruh warga negara Prancis berhak memperoleh dan mengikuti pendidikan yang disediakan oleh negara tanpa adanya pembedaan dalam hal suku, ras, maupun agama yang mereka anut. Negara menyediakan sistem pendidikan dengan prinsip-prinsip dan aturan yang sama yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa tanpa pengecualian apapun. Inti dari karakter *laïcité* dalam point ini adalah wujud nyata prinsip *égalité* yang dijunjung tinggi oleh negara Prancis dalam semboyannya. Konsep tersebut penting bagi kedudukan Prancis sebagai sebuah negara multikultural.

Prinsip kesetaraan ini diperkuat dalam pasal yang ke-10 dari deklarasi hak-hak manusia dan warga negara (*La déclaration des droits de l'homme et du citoyen*). Pasal tersebut menyatakan : “*Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,*

même religieuse, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi". Kalimat tersebut menyiratkan bahwa tidak seorang pun dari masyarakat Prancis yang perlu merasa khawatir karena pendapatnya, atau bahkan agamanya, asalkan manifestasi mereka tidak mengganggu ketertiban umum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Nilai-nilai karakter yang mengidentifikasi konsep *laïcité* yang dianut oleh negara Prancis tersebut akan digunakan dalam melakukan analisis terhadap setiap data yang diperoleh. Sesuai dengan tujuan penelitian, dalam bab ini ditampilkan hasil data-data berupa kalimat-kalimat yang telah diperoleh, yaitu dampak dari paham sekuler *laïcité* pada sistem pendidikan di Prancis dari awal terbentuknya paham tersebut sampai dengan di zaman modern ini. Berbagai dampak tersebut bukan hanya berupa kebijakan-kebijakan pemerintah Prancis yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, melainkan termasuk reaksi-reaksi yang timbul dari masyarakat Prancis baik itu penduduk asli maupun kaum pendatang terhadap keputusan pemerintah. Reaksi-reaksi yang muncul dari masyarakat tersebut mencerminkan pemahaman mereka akan makna karakter *laïcité* di Prancis sehingga mereka mereka menuntut, mempertanyakan, atau bahkan mendukung wujud nyata dari penerapan prinsip tersebut dalam ruang pendidikan.

Sejumlah kelompok masyarakat di Prancis meminta pemerintah untuk mengubah kebijakannya dan bersikap lebih bersahabat dengan membiarkan agama dan kebudayaan tertentu berjalan dan berkembang di Prancis sebagai refleksi dari ciri khas republik Prancis yang menerima dan menghargai adanya

perbedaan. Di sisi lain, ada juga golongan masyarakat yang mendukung penerapan konsep *laïcité* ini dan bahkan menginginkan agar pemerintah lebih memperketatnya lagi.

Dengan demikian setiap hasil data yang ditampilkan merepresentasikan karakteristik *laïcité* dalam sistem pendidikan di Prancis. Pada kalimat-kalimat tersebut akan dilakukan inferensi sesuai dengan konteks yang telah ditetapkan melalui metode analisis isi. Data-data yang telah diperoleh ditampilkan dengan langsung mencantumkan sumber rujukannya. Untuk itu, dalam penelitian ini ditentukan daftar istilah untuk setiap sumber data. Daftar istilah tersebut adalah **HLF** untuk sumber data *Histoire de La Laïcité à la Française*, dan **LL** untuk *Un œil sur La Laïcité*. Data yang diperoleh dari artikel yang terdapat pada situs *le monde fr* dan *le Figaro fr* juga dicantumkan sumbernya dan disertai dengan tanggal dari diterbitkannya setiap artikel. Dalam penelitian ini, ditemukan sejumlah 32 data yang dikategorikan sebagai dampak dari paham sekuler *laïcité* pada sistem pendidikan di Prancis. Dari sejumlah data tersebut, dijumpai bahwa prinsip negara tidak mengakui agama apapun adalah karakter terbanyak dari *laïcité* yang memberikan dampak pada kehidupan pendidikan di Prancis.

Selanjutnya, bagian yang merupakan kata kunci dari setiap data yang diperoleh diberi garis bawah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengidentifikasi hasil data sebagai pencapaian dari tujuan penelitian. Untuk lebih jelasnya, hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel di halaman selanjutnya.

TABEL KORPUS

49

Dampak Paham Sekuler *Laïcité* pada Sistem Pendidikan di Prancis

No	Thn	Peristiwa	Karakteristik <i>Laïcité</i>			Keterangan
			Menjamin Kebebasan Hati Nurani	Tidak adanya pengakuan, bayaran, subsidi, atau bantuan finansial terhadap kegiatan agama apapun.	Menjamin persamaan hak dan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum tanpa membedakan suku, ras, atau agama mereka.	
1.	1879	<p>La création d'une <u>école publique, laïque, et obligatoire.</u> (HLF : 65, LL : 40)</p> <p>Pembentukan <u>sekolah republik yang wajib dan bersifat sekuler (laïque).</u></p>		√	√	<p>Karakter <i>laïcité</i> menjamin persamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum serta tidak mengakui agama apapun. Maka sekolah yang bersifat sekuler diciptakan bagi semua anak-anak di</p>

						Prancis tanpa membedakan suku, ras, atau agama mereka.
2.	1881	<p>La loi décide <u>la gratuité de l'enseignement primaire public.</u> (HLF : 65, LL : 38)</p> <p>Undang-undang menetapkan bahwa <u>biaya pendidikan dibebaskan pada sekolah negeri tingkat dasar.</u></p>			√	Karakter <i>laïcité</i> menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Biaya pendidikan dibebaskan bagi semua anak-anak di Prancis tanpa membedakan suku, ras, atau agama mereka.
3.	1882	<p>La loi de <u>laïcisation des écoles primaires publique.</u> (HLF : 65, LL : 38-39)</p> <p>Undang-undang <u>mensekulerkan sekolah negeri tingkat dasar.</u></p>		√		Karakter <i>laïcité</i> tidak mengakui agama apapun. Sekolah sekuler berarti sekolah yang tidak menampilkan unsur kepercayaan atau agama apapun.
4.	1882	La loi impose			√	Karakter

		<p><u>l'obligation scolaire pour les enfants</u> de 6 à 13 ans. (HLF : 65, LL : 38-39)</p> <p>Undang-undang menetapkan <u>program wajib belajar bagi semua anak-anak</u> dari usia 6 tahun sampai 13 tahun.</p>				<p><i>laïcité</i> menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Pendidikan merupakan hal yang wajib untuk diikuti sekaligus merupakan hak bagi seluruh anak-anak di Prancis tanpa membedakan suku, ras, atau agama mereka.</p>
5.	1882	<p>La loi décide également <u>l'abandon de l'éducation religieuse</u>. (HLF : 65, LL : 38-39)</p> <p>Undang-undang menetapkan <u>dihapuskannya pelajaran agama</u> dari kurikulum sekolah.</p>		√		<p>Karakter <i>laïcité</i> tidak mengakui agama apapun. Untuk menghapus unsur-unsur keagamaan dari sistem pendidikan, maka pelajaran agama dihapus dari kurikulum.</p>
6.	1882	<p><u>L'enseignement</u></p>	√			<p>Karakter</p>

		<p><u>du catéchisme peut être donné au jour de repos, le jeudi, en dehors de l'école.</u> (LL : 39)</p> <p><u>Pengajaran katekismus (agama Kristen) dapat diberikan kepada anak-anak pada hari kamis yang adalah hari istirahat, namun berlokasi di luar sekolah.</u></p>				<p><i>laïcité</i> menjamin kebebasan hati nurani. Maka anak-anak di Prancis tetap bisa mendapatkan pengajaran agama sesuai dengan keyakinan agama mereka masing-masing di luar sekolah.</p>
7.	1886	<p>La loi décide que <u>l'ensemble du personnel enseignant devra être laïque.</u> (HLF : 66, LL : 39)</p> <p><u>Undang-undang menetapkan bahwa para pengajar dalam sekolah negeri harus bersifat sekuler.</u></p>		√		<p>Karakter <i>laïcité</i> tidak mengakui agama apapun. Dalam soal para pengajar, mereka harus berasal dari kalangan awam, bukan kalangan rohaniwan agama agar tidak menyampaikan pola pikir berdasarkan doktrin agama pada saat mengajar</p>

						di sekolah-sekolah.
8.	1888	<p><u>Les subventions aux écoles privées sont supprimées.</u> (LL : 39)</p> <p><u>Subsidi negara untuk sekolah swasta (école privée) dihapuskan.</u></p>		√		<p>Karakter <i>laïcité</i> tidak mensubsidi kegiatan agama apapun. Maka pemerintah tidak lagi mensubsidi sekolah swasta karena sekolah tersebut merupakan lembaga yang bersifat keagamaan.</p>
9.	1904	<p>L'enseignement de tout ordre et de toute nature est <u>interdit aux congrégations.</u> (HLF : 86)</p> <p><u>Pengajaran dari segala jenis dan bentuk apapun tidak diizinkan untuk para rohaniwan agama</u></p>		√		<p>Karakter <i>laïcité</i> tidak mengakui agama apapun. Kaum rohaniwan tidak lagi diizinkan mengajar di sekolah-sekolah agar tidak mengajarkan pola pikir yang bersifat agama kepada anak-anak.</p>
10.	1904	Deux mille deux		√		Karakter

		<p><u>cents écoles</u> <u>congréganistes</u> <u>ferment leurs</u> <u>portes.</u> (HLF : 86)</p> <p>Sebanyak 2200 <u>sekolah jemaat</u> <u>ditutup.</u></p>				<p><i>laïcité</i> tidak mengakui agama apapun. Sebagai upaya untuk menghapus unsur-unsur religius dari sistem pendidikan, sekolah-sekolah yang bersifat keagamaan ditutup.</p>
11.	1946	<p>La IV-ème République, a inscrit dans le préambule de sa constitution l'obligation faite à l'État <u>d'assurer un enseignement laïque</u> sur tout le territoire. (HLF : 155)</p> <p>Pemerintahan Republik keempat mencantumkan dalam pembukaan konstitusinya kewajiban Prancis untuk menjamin <u>tersedianya pendidikan sekuler (école laïque)</u> di seluruh <u>wilayah negeri.</u></p>			V	<p>Karakter <i>laïcité</i> menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Kewajiban Prancis untuk menyediakan pendidikan sekuler di seluruh wilayah Prancis menunjukkan bahwa seluruh warga negara memiliki kesetaraan dalam hal pendidikan.</p>

12.	1959	<p>La loi crée un contrat : <u>les établissements privés devront adopter les programmes de l'enseignement public et les enseigner dans des conditions identiques à l'enseignement laïque</u>. Ce régime est contraire par la protestation d'une partie de l'opinion qui juge la loi trop favorable au privé. (HLF : 156-157)</p> <p><u>Undang-undang menciptakan perjanjian bahwa sekolah swasta (école privée) diharuskan mengikuti program pendidikan sekolah negeri (école publique) dalam kondisi sekuler (laïque).</u> Proyek ini ditentang melalui bentuk protes dari pihak-pihak yang menganggap</p>	55	v		<p>Karakter <i>laïcité</i> tidak mengakui agama apapun. Proyek yang diajukan pemerintah dalam mengharuskan sekolah swasta untuk mengikuti program pendidikan sekolah negeri merupakan upaya dalam mempersatukan sistem pendidikan yang terpadu dan sekuler bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.</p>
-----	------	---	----	---	--	---

		bahwa keputusan tersebut terlalu mengutamakan institusi swasta.				
13.	1980	<p>Des jeunes filles, se présentent dans les établissements scolaires portant un foulard qu'elles refusent d'enlever pendant les cours. Certaines refusent d'assister aux cours de biologie ou de disciplines artistiques <u>sous prétexte que les questions abordées présentent un caractère d'immoralité.</u></p> <p>Dans de nombreux cas, elles refusent de fréquenter les cours de natation, voire d'éducation physique, <u>en raison de la nécessité de dévoiler leur corps.</u></p> <p>(LL :83)</p> <p>Para siswi menolak untuk melepaskan jilbab yang mereka</p>	√			<p>Karakter <i>laïcité</i> menjamin kebebasan hati nurani. Pemahaman tentang konsep ini membuat beberapa siswi muslim di Prancis (khususnya yang mengenakan jilbab) menolak untuk mengikuti pelajaran-pelajaran tertentu yang dianggap bertentangan dengan hati nurani mereka atau yang membuat mereka harus melepaskan jilbab mereka selama mengikuti pelajaran di sekolah.</p>

		kenakan selama pelajaran. Beberapa menolak untuk mengikuti kelas biologi atau seni <u>dengan dalih bahwa masalah yang dibahas memiliki karakter yang tidak bermoral</u> . Dalam banyak kasus, mereka menolak untuk menghadiri pelajaran renang atau pendidikan jasmani, <u>dengan alasan bahwa pelajaran-pelajaran tersebut mengekspos tubuh mereka</u> .				
14.	1981	François Mitterand souhaite que cesse en France le dualisme scolaire. Selon lui, <u>il faut mettre en place un grand service public d'éducation unifié, national et laïque</u> . Pour cela, il leur apparaît nécessaire de nationaliser l'enseignement privé et de prévoir		√	√	Karakter <i>laïcité</i> tidak mengakui agama apapun serta menjamin persamaan hak seluruh warga negara di hadapan hukum. Demi mewujudkan sistem pendidikan yang sekuler dan bersatu bagi seluruh

		<p>l'intégration de ses personnels à la fonction publique.</p> <p>(LL : 59)</p> <p>François Mitterand ingin mengakhiri sistem pendidikan ganda di Prancis. Menurutnya, <u>perlu diterapkan sistem pendidikan yang bersatu, nasional dan berifat sekuler (<i>laïque</i>)</u>. Untuk itu, sekolah swasta perlu dinasionalisasikan demi perencanaan integrasi pada sistem pendidikan.</p>				<p>warga negara, François Mitterand mengusulkan untuk menyatukan sekolah negeri dengan sekolah swasta dalam satu lembaga pendidikan.</p>
15.	1984	<p>500.000 personnes manifestent à Versailles <u>contre le projet Savary d'un grand service public <i>laïque</i> unifié de l'enseignement.</u></p> <p>(LL : 61)</p> <p>Tejadi demonstrasi <u>menentang proyek Savary</u></p>	√			<p>Karakter <i>laïcité</i> menjamin kebebasan hati nurani. Para pendukung sekolah swasta menolak pembentukan sistem pendidikan yang bersatu</p>

		<u>dalam</u> <u>pembentukan</u> <u>pendidikan</u> <u>sekuler (laïque)</u> <u>yang terpadu.</u>				dan sekuler karena dianggap melanggar kebebasan hati nurani.
16.	1989	<p>Le Conseil d'État rend un avis selon lequel le foulard n'est pas en lui-même contraire au principe de <i>laïcité</i>, mais que s'il s'agit d'une marque ou d'un moyen de prosélytisme religieux, <u>la direction des établissements scolaires concernés doit prendre des mesures de sanction et d'interdiction.</u> (HLF : 160)</p> <p>Sekolah-sekolah negeri yang menerapkan prinsip <i>laïcité</i> diwajibkan untuk mulai <u>mempertimbangkan larangan yang akan diberlakukan serta sanksi yang akan diberikan kepada mereka</u></p>		√		<p>Karakter <i>laïcité</i> tidak mengakui agama apapun. Penggunaan jilbab dianggap tidak secara langsung bertentangan dengan karakter <i>laïcité</i>, maka sekolah-sekolah negeri diharuskan mempertimbangkan kembali penerapan konsep tersebut.</p>

		<u>yang melanggar.</u>				
17.	1994	<p><u>L'exclusion de jeunes filles voilées du lycée à Mantes-la-Jolie (Yvelines).</u> (LL : 83)</p> <p><u>Beberapa gadis berjilbab dikeluarkan dari sekolah mereka di kota Mantes-la-Jolie, departemen Yvelines.</u></p>		√		<p>Karakter <i>laïcité</i> tidak mengakui agama apapun. Pemerintah Prancis mengeluarkan beberapa siswi berjilbab dari sebuah sekolah negeri.</p>
18.	Okt 1994	<p><u>Manifestation organisée par des associations musulmans à Mantes-la-Jolie (Yvelines), à la suite de l'exclusion de jeunes filles voilées du lycée de la ville. Le Conseil d'État, saisi par les familles, a exigé leur réintégration.</u> (LL : 83)</p> <p><u>Demonstrasi oleh asosiasi umat Muslim di Mantes-la-Jolie (Yvelines), setelah dikeluarkannya siswi- siswi</u></p>	√			<p>Karakter <i>laïcité</i> menjamin kebebasan hati nurani. Sebagai reaksi atas tindakan pemerintah mengeluarkan beberapa gadis berjilbab di Mantes-la-Jolie, terjadi demonstrasi karena tindakan pemerintah tersebut dianggap melanggar kebebasan hati nurani umat muslim.</p>

		berjilbab dari sekolahnya. Dewan Negara dituntut oleh keluarga gadis-gadis tersebut agar mengembalikan hak mereka untuk belajar.				
19.	1994	Une circulaire du ministre de l'Éducation nationale, François Bayrou, tente de concilier les principes de tolérance, de liberté de conscience, et la nécessaire neutralité de l'école : Le port par les élèves de signes discrets, manifestant leur attachement personnel à des convictions notamment religieuses, est admis dans l'établissement. Mais <u>les signes ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination,</u>	√	√		Karakter <i>laïcité</i> tidak mengakui agama apapun. François Bayrou menyatakan bahwa yang dilarang untuk digunakan di sekolah-sekolah adalah atribut keagamaan yang bersifat "mencolok", bukan yang "tidak mencolok". Hal ini dimaksudkan untuk menghormati kebebasan hati nurani yang juga merupakan karakter

		<p><u>sont interdits.</u> (LL : 84)</p> <p>François Bayrou sebagai menteri pendidikan nasional berupaya untuk mendamaikan prinsip-prinsip toleransi, kebebasan hati nurani, dan netralitas dalam sekolah :</p> <p><u>Penggunaan tanda-tanda yang tidak mencolok oleh siswa dalam mengekspresikan keyakinan pribadi mereka atas agama tertentu, diperbolehkan.</u> Tetapi <u>tanda-tanda mencolok yang mengandung diskriminasi dilarang.</u></p>				<i>laïcité.</i>
20.	2000	<p>Dans les années 2000, le port du voile par les élèves <u>oblige à réfléchir le nouveau au principe de <i>laïcité</i> à l'école.</u> (HLF : 149)</p> <p>Penggunaan</p>		√		Karakter <i>laïcité</i> tidak mengakui agama apapun. Penggunaan jilbab oleh para siswi muslim di sekolah-sekolah

		jilbab oleh para siswi di sekolah-sekolah negeri di Prancis membuat <u>pemerintah memikirkan kembali tentang penerapan <i>laïcité</i> dalam bidang pendidikan.</u>				negeri di Prancis menjadi bahan renungan bagi pemerintah.
21.	Juli 2003	Le Conseil Supérieur de l'éducation a autorisé, l'ouverture d'un lycée privé musulman à Lile (Nord), <i>Avernoès</i> . <u>L'établissement privé hors contrat (sans aide de l'État).</u> (Le monde.fr , mis à jour le 12.07.2003) Didirikan sekolah <i>Avernoès</i> , yaitu sekolah lanjutan bagi kaum muslim di Prancis. Sekolah ini <u>dikelola secara pribadi di luar kontrak dengan pemerintah (tanpa bantuan negara).</u>	√	√		Karakter <i>laïcité</i> menjamin kebebasan hati nurani, maka sekolah lanjutan muslim didirikan di Prancis. Sekolah ini didirikan oleh pihak swasta tanpa subsidi dari negara, sesuai dengan karakter <i>laïcité</i> yaitu tidak adanya subsidi terhadap lembaga keagamaan apapun.
22.	Juli 2003	Les multiples épisodes de la question de	√	√		Karakter <i>laïcité</i> tidak mengakui

		<p><i>laïcité</i> ont conduit le président de la république à créer une commission que lui donnent aussitôt les médias, doit <u>réfléchir à l'actualité du principe de laïcité, au-delà de la seule question scolaire, et cerner les difficultés rencontrées pour proposer des solutions au pouvoir politique.</u> (HLF : 160)</p> <p>Dibentuk Komisi Stasi untuk <u>mengidentifikasi kembali prinsip laïcité yang menjadi satu-satunya masalah pada sekolah-sekolah negeri (écoles publiques) di Prancis.</u></p>				<p>agama apapun namun tetap menjamin kebebasan hati nurani. Untuk itu komisi Stasi dibentuk dengan tujuan mempertimbangan kembali konsep <i>laïcité</i> yang menjadi masalah dalam sistem pendidikan di Prancis.</p>
23.	Des 2003	<p>Environ 3000 personnes défilent à Paris, accompagnant des jeunes filles qui déclarent qu'elles sont volontairement voilées et</p>	√		√	<p>Karakter <i>laïcité</i> menjamin kebebasan hati nurani. Berpijak pada prinsip tersebut, ribuan</p>

	<p>contentes de l'être. Elles brandissent des panonceaux sur lesquels on peut lire : "<u>Le voile, ma liberté est là aussi.</u>" Dans le même temps, d'autres jeunes filles <u>dénoncent les intimidations les incitant à porter le voile</u> dont elles sont victims et <u>appellent de leur vœux une loi libératrice pour les femmes.</u></p> <p>(LL : 88)</p> <p>Sekitar 3.000 orang berdemonstrasi di Paris, bersama dengan gadis-gadis berjilbab. Mereka membawa poster yang bertuliskan "<u>jilbab adalah kebebasan saya juga</u>". Pada saat yang sama, gadis-gadis lain <u>mengadukan intimidasi yang mereka alami karena</u></p>				<p>masyarakat Prancis menuntut kebebasan dalam hal penggunaan jilbab ke sekolah. Mereka juga menganggap bahwa penggunaan jilbab adalah hak perempuan, yang juga selaras dengan karakter <i>laïcité</i> yaitu menjamin persamaan hak seluruh warga negara di hadapan hukum.</p>
--	--	--	--	--	--

		<u>mengenakan jilbab</u> . Ini mendorong mereka untuk <u>menyuarakan undang-undang kebebasan bagi kaum perempuan</u> .				
24.	Jan 2004	<u>Manifestation avant le débat parlementaire sur le voile islamique à l'école.</u> (HLF : 157) Terjadi <u>demonstrasi sebelum diselenggarakannya debat parlemen tentang pelarangan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah negeri di Prancis.</u>	√			Karakter <i>laïcité</i> menjamin kebebasan hati nurani. Maka ketika akan diselenggarakan pembicaraan tentang larangan penggunaan jilbab di sekolah, umat muslim melakukan demonstrasi karena menganggap rancangan pemerintah tersebut melanggar kebebasan hati nurani mereka.
25.	Jan 2004	<u>Le débat parlementaire sur le voile islamique à l'école.</u> (HLF : 157)		√		Karakter <i>laïcité</i> tidak mengakui agama apapun.

		<p>Diselenggarakan <u>debat parlemen tentang penggunaan jilbab di sekolah-sekolah negeri</u> di Prancis.</p>				<p>Maka dewan parlemen Prancis mengadakan pembicaraan soal penggunaan jilbab di sekolah yang bertujuan untuk menghapus unsur-unsur keagamaan dari sistem pendidikan</p>
26.	Maret 2004	<p>Manifestation de lycéens, <u>pour la laïcité et pour les droits des femmes</u> (notamment celui du refuser le port du voile à l'école). (LL : 90)</p> <p>Terjadi <u>demonstrasi yang dilakukan oleh para siswa dalam hal laïcité dan hak-hak perempuan</u> (terutama soal penolakan pemerintah Prancis terhadap penggunaan jilbab di sekolah).</p>	√		√	<p>Karakter <i>laïcité</i> menjamin kebebasan hati nurani serta persamaan hak bagi seluruh warga negara. Bagi umat muslim, pelarangan penggunaan jilbab bertentangan dengan hati nurani mereka dan mendiskriminasi hak perempuan sehingga mereka menolak</p>

						proyek pemerintah dalam hal ini.
27.	Maret 2004	<p>La loi promulguée porte que “dans les écoles, les collèges et les lycées publics, <u>le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.</u>”</p> <p>(HLF : 161)</p> <p>Pemerintah Prancis mengesahkan sebuah <u>undang-undang tentang pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah-sekolah negeri.</u></p>		√		<p>Karakter <i>laïcité</i> tidak mengakui agama apapun. Karakter ini diperkuat dalam bidang pendidikan di Prancis melalui pengesahan undang-undang pelarangan penggunaan atribut keagamaan apapun di sekolah-sekolah negeri.</p>
28.	Maret 2008	<p>Un collège privé musulman "ouvert à toutes et à tous" devrait ouvrir , à l'occasion de la rentrée des vacances scolaires, à Vitry-sur-Seine (Val-</p>	√		√	<p>Karakter <i>laïcité</i> menjamin kebebasan hati nurani. Sekolah menengah muslim didirikan demi</p>

	<p>de-Marne). Ce collège privé mixte, "ouvert à toutes et à tous, porte <u>un projet éducatif qui vise la réussite et l'excellence</u>", <u>souligne l'association, qui souhaite inculquer aux élèves "le sens du respect, de la tolérance, de l'ouverture à l'autre et le goût du travail"</u>. (Le Figaro.fr, publié le 04/03/2008)</p> <p>Sekolah menengah swasta muslim yang "terbuka untuk semua" didirikan di Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Sekolah swasta campuran ini memiliki sebuah <u>proyek pendidikan yang bertujuan mencapai sukses dan keunggulan, menanamkan rasa hormat, toleransi, dan keterbukaan dalam diri siswa.</u></p>				<p>kepentingan umat muslim di Prancis. Meskipun demikian, sekolah ini terbuka bagi semua karena menjunjung karakter <i>laïcité</i> dalam menjamin persamaan hak dan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum.</p>
--	---	--	--	--	--

29.	2011	<p>Concernant l'enseignement, le PG <u>souhaite mettre fin aux subventions publiques aux établissements privés</u>", et "assurer un <u>enseignement public gratuit et laïque sur l'ensemble du territoire de la République française</u>", le PG s'indignant du fait qu'il existe aujourd'hui plus de 500 communes sans école publique en France". (Le Figaro.fr, publié le 04/04/2011)</p> <p>Dalam hal pendidikan, para pendukung partai kiri (<i>Parti de Gauche</i>) berusaha untuk <u>mengakhiri subsidi publik kepada pendidikan swasta, dan memastikan tersedianya pendidikan umum yang bersifat gratis dan sekuler</u></p>		√	√	<p>Karakter <i>laïcité</i> tidak mengakui agama apapun. Golongan partai kiri di Prancis berupaya memastikan tersedianya pendidikan sekuler dalam seluruh wilayah di Prancis tanpa kecuali. Proyek lain dari golongan ini adalah mengakhiri pemberian subsidi bagi sekolah swasta, karena sesuai dengan karakter <i>laïcité</i>, tidak ada subsidi yang diberikan kepada lembaga keagamaan apapun.</p>
-----	------	---	--	---	---	---

		<u>(laïque) di seluruh wilayah Republik Prancis. PG gusar karena saat itu ada lebih dari 500 wilayah di Prancis yang tidak memiliki sekolah negeri (école publique).</u>				
30.	Jan 2013	La loi du 15 mars 2004 sur la <i>laïcité</i> interdit le port de signes religieux ostentatoires, toutes confessions confondues, dans les écoles, collèges et lycées publics, mais <u>elle ne s'applique pas aux étudiants à l'université.</u> (Le Figaro.fr, publié le 18/01/2013) Undang-undang pelarangan penggunaan atribut keagamaan di lingkup pendidikan yang disahkan pada tahun 2004 <u>tidak dapat diterapkan bagi mahasiswa.</u>		√		Karakter <i>laïcité</i> tidak mengakui agama apapun. Selaras dengan itu, penggunaan atribut keagamaan apapun dilarang dalam lingkup sekolah-sekolah negeri. Namun undang-undang ini tidak bisa diterapkan di lingkungan universitas bagi para mahasiswa.
31.	Maret 2013	Les Français se déclarent à une		√		Karakter <i>laïcité</i> tidak

	<p> <u>écrasante majorité (84%) opposés au port du voile ou du foulard islamique par des femmes travaillant dans des lieux privés accueillant du public (commerces, supermarchés, cabinets médicaux, crèches, écoles privées), révèle un sondage Ifop à paraître dans Dimanche Ouest France. (Le Figaro.fr, publié le 23/03/2013)</u> </p> <p> Menurut sebuah angket yang diadakan oleh Ifop pada awal tahun 2013, 84 % dari masyarakat Prancis <u>menentang penggunaan jilbab atau kerudung oleh perempuan yang bekerja di lembaga swasta yang terbuka untuk umum, dan ini termasuk sekolah swasta</u> </p>				<p> mengakui agama apapun. Beberapa tahun setelah disahkannya undang-undang pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri, masyarakat Prancis menginginkan agar aturan yang sama diberlakukan juga di lembaga swasta, termasuk sekolah swasta. </p>
--	--	--	--	--	---

		<i>(école privée).</i>				
32.	April 2013	<p><u>L'enseignement de la morale laïque devrait faire son retour à l'école en France,</u> du CP à la terminale, à la rentrée 2015, annonce le ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon. (Le Figaro.fr, publié le 22/04/2013)</p> <p>Menteri pendidikan Prancis, Vincent Peillon mengumumkan rencana <u>pengembangan ajaran moralitas sekuler dari sekolah dasar hingga sekolah lanjutan.</u> Proyek ini rencananya akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2015.</p>		V		<p>Karakter <i>laïcité</i> tidak mengakui agama apapun. Untuk menanamkan karakter ini dengan lebih kuat dalam diri anak-anak Prancis, maka menteri pendidikan nasional, Vincent Peillon merencanakan program pengajaran moralitas sekuler pada sistem pendidikan di Prancis.</p>

III.2 Pembahasan

A. Masa Awal terbentuknya konsep *Laïcité*

Hasil penelitian membuktikan bahwa konsep *laïcité* membawa pengaruh yang sangat besar dalam bidang pendidikan di Prancis. Hal ini didasarkan pada karakteristik *laïcité* sebagai identitas dari negara Prancis. Pengaruh ini mulai terlihat pada masa pemerintahan republik ketiga dengan dibentuknya sekolah republik (*école républicaine*) yang bersifat wajib (*obligatoire*) dan sekuler (*laïque*). Pendidikan menjadi hal yang wajib untuk diikuti sekaligus hak bagi semua anak-anak di Prancis. Ini mencerminkan kesetaraan yang dijamin oleh Prancis bagi seluruh warga negaranya.

Sekolah sekuler (*école laïque*) didirikan pertama kali di bawah pengaturan Jules Ferry yang pada saat itu menjabat sebagai menteri pendidikan umum. Proses sekularisasi dalam sekolah republik terlihat dengan dihapuskannya pengajaran agama dalam kurikulum, dan digantikan dengan pendidikan moral. Meskipun demikian, apabila orang-tua menginginkannya, pengajaran agama dapat diberikan kepada anak-anak mereka di luar jam dan wilayah sekolah. Kebijakan ini merepresentasikan wujud akan jaminan kebebasan hati nurani yang dilindungi oleh pemerintah. Seperti telah dijelaskan sebelumnya pada bagian interpretasi, kebebasan hati nurani merupakan prinsip dasar utama dari karakter *laïcité*.

Selanjutnya sekolah yang bersifat *laïque* ini bukan berarti “tanpa Tuhan” atau seolah-olah menjadi “sekolah ateis”, melainkan terlepas dari pengawasan kaum rohaniwan agama seperti pendeta, serta terbuka bagi semua anak tanpa membedakan latar belakang agama atau kepercayaan yang mereka anut, dan di dalamnya diberlakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik secara moral.

Selaras dengan karakter *laïcité* bahwa tidak ada agama yang dianggap lebih tinggi atau lebih rendah kedudukannya, maka *école laïque* tidak menampilkan unsur-unsur spiritual dari identitas agama apapun di dalamnya. Auduc dalam Arviani (2010 : 4) menyatakan bahwa memasuki pintu masuk sekolah, segala bentuk diskriminasi, baik yang berhubungan dengan budaya ataupun agama tidak boleh ada. Prinsip dari *école laïque* di Prancis adalah bahwa semua siswa, tidak soal apa agama atau keyakinan mereka, harus tunduk pada peraturan yang sama yaitu netralitas dan kehadiran secara tetap tentu di dalam kelas. Negara tidak mengunggulkan suatu komunitas masyarakat tertentu, melainkan seluruh warga memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum termasuk dalam soal pendidikan dan tidak ada pengecualian untuk alasan agama.

Kemudian, belajar dari pengalaman di masa lalu saat sistem pendidikan Prancis diatur oleh gereja Katolik, maka konsep *laïcité* dalam bidang pendidikan di Prancis tidak hanya mensekulerkan sekolah dan kurikulum pengajaran di dalamnya, melainkan juga tenaga pendidik atau guru yang mengajar. Prinsip *laïcité* menetapkan bahwa para guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri tidak boleh berasal dari golongan rohaniwan agama, melainkan harus berasal dari kaum awam. Keseriusan Prancis dalam hal ini terlihat dengan didirikannya sekolah tinggi pada tahun 1879 untuk pelatihan guru dalam masing-masing departemen. Pemerintah Prancis membentuk pula sekolah yang lebih unggul untuk melatih kemampuan para guru (André, 2004 : 40). Dengan demikian para rohaniwan agama tidak lagi diizinkan untuk mengajar meskipun mereka bisa jadi memiliki kemampuan dalam h

Prancis juga menutup ribuan sekolah jemaat yang didirikan oleh gereja-gereja Katolik sebagai upaya untuk menghapus unsur-unsur religius dari sistem pendidikan dan sebagai gantinya, Prancis memiliki kewajiban untuk menyediakan pendidikan sekuler (*école laïque*) di seluruh wilayah negeri, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Hal ini tercantum dalam pembukaan konstitusi yang disahkan pada tahun 1946 di bawah pemerintahan republik keempat. Pernyataan tersebut juga menjadi bukti bahwa Prancis memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh warga negaranya dalam aspek pendidikan dan bahwa pendidikan merupakan prioritas nasional bagi pemerintah Prancis. Pemerintah Prancis terlihat sangat peduli dengan masalah pendidikan. Kualitas individu merupakan hal pokok dengan penyebaran pendidikan yang merata tanpa membedakan latar belakang para siswa di dalamnya.

Pemisahan unsur-unsur agama dari sekolah membuat diberlakukannya sistem edukasi ganda di Prancis. Ada sekolah negeri (*école publique*) dan ada sekolah swasta (*école privée*). Secara umum, konsep sekolah negeri di Prancis adalah tempat belajar milik pemerintah yang disubsidi oleh negara dan diperuntukkan bagi masyarakat luas. Sebagai bentuk refleksi dari *égalité* yang dianut Prancis dalam semboyannya, sekolah negeri terbuka bagi semua anak-anak di Prancis tidak soal latar belakang suku, ras, atau agama mereka. Selain itu, dengan adanya subsidi dan beasiswa pendidikan dari pemerintah maka biaya pendidikan pada sekolah negeri dibebaskan untuk seluruh warga negara. Dalam hal sistem edukasi ganda ini, prinsip *laïcité* hanya diterapkan di sekolah-sekolah

negeri, sedangkan sekolah swasta memiliki kebebasan untuk menerapkan *laïcité* atau tidak.

Pemisahan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta di Prancis menimbulkan konflik di antara keduanya. Dalam situasi ini, perdana menteri pertama di bawah pemerintahan republik kelima, Michel Debré berupaya untuk mengakhiri konflik antara kedua lembaga pendidikan tersebut. Melalui undang-undang Debré yang disahkan pada tahun 1959, diciptakan perjanjian bahwa lembaga pendidikan swasta harus mengikuti program pendidikan di sekolah negeri dan mengajar para siswa dalam kondisi yang sesuai dengan pendidikan sekuler. Mereka harus menghormati kebebasan hati nurani setiap siswa, sambil tetap menjaga karakter mereka. Sebagai timbal balik, lembaga pendidikan swasta bisa memperoleh bantuan secara finansial dari negara untuk menutupi kebutuhan dalam pengeluaran pribadi maupun biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan selama melaksanakan kegiatan pengajaran (Bruley, 2005 : 157). Meskipun proyek ini sempat ditentang oleh golongan yang menganggap bahwa keputusan tersebut terlalu mengutamakan lembaga swasta, pada akhirnya rancangan undang-undang ini disahkan.

Sangat disayangkan bahwa pengesahan undang-undang Debré ternyata tidak juga mengakhiri perselisihan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Perselisihan ini terus berlangsung hingga tahun 1981. Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, presiden François Mitterand mengusulkan untuk memberhentikan sistem pendidikan ganda di tahun 1981, dan menjadikan *école laïque* sebagai satu-satunya sistem pendidikan yang berlaku di Prancis. Usulan

dari Mitterand tidak terealisasi karena mendapat tentangan dari pihak-pihak yang mendukung sekolah swasta (André, 2004 : 59). Proyek serupa juga diajukan kembali pada tahun 1984 oleh menteri pendidikan nasional kala itu, Alain Savary. Namun, rancangannya gagal akibat terjadinya demonstrasi sebagai bentuk protes dari ratusan ribu masyarakat yang menolak pembentukan sistem pendidikan nasional yang bersatu dan sekuler. Dengan terpisahnya sekolah swasta dari pengawasan pemerintah, maka negara tidak lagi memberikan subsidi bagi sekolah-sekolah tersebut. Ketetapan ini merupakan bentuk aplikasi dari karakter *laïcité* dimana negara tidak memberikan subsidi atau dukungan secara finansial kepada lembaga keagamaan apapun. Sekolah swasta digolongkan sebagai salah satu bagian dari lembaga keagamaan karena di dalamnya memberikan pengajaran agama kepada para siswa. Maka, segala kegiatan yang berlangsung dalam sistem pendidikan swasta dilaksanakan secara mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah.

B. *Laïcité* di Zaman Modern (Mulai Abad ke-20- Sekarang)

Seiring dengan berlalunya waktu, refleksi karakter *laïcité* dalam lingkup pendidikan di zaman modern dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan lain, yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh para pencetus sekolah republik. Keterbukaan sekolah-sekolah negeri di Prancis dalam menerima siswa tanpa melihat latar belakang mereka membuat banyak kaum pendatang baik imigran maupun warga negara asing yang menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah negeri. Para pendatang ini masih cenderung memegang kuat budaya dan

ideologi asli mereka masing-masing sehingga memerlukan waktu untuk dapat beradaptasi dalam melaksanakan budaya sekuler negara Prancis.

Salah satu masalah utama yang seringkali terjadi di sekolah-sekolah negeri adalah soal penggunaan atribut keagamaan, misalnya jilbab oleh para siswi muslim. Sisi lain, beberapa dari antara siswi yang merupakan pendatang ini menolak untuk mengikuti mata pelajaran tertentu yang mereka rasa bertentangan dengan ideologi atau hati nurani mereka, atau yang “mengharuskan” mereka melepaskan atribut keagamaan yang mereka kenakan. Polemik ini memunculkan berbagai aksi protes dan demonstrasi yang berkepanjangan dan tak kunjung reda dari kaum imigran yang merasa mendapat perlakuan diskriminasi dalam bidang pendidikan. Kontroversi ini mulai banyak terjadi pada tahun 1989 hingga tahun-tahun awal 90-an.

Atas nama persamaan hak dan kebebasan hati nurani yang dijunjung tinggi oleh negara Prancis, kaum pendatang menuntut agar pemerintah bersikap lebih akomodatif dalam memperlakukan keragaman agama dan budaya yang ada di negara Prancis. Berbagai peristiwa yang mewarnai lika-liku kehidupan pendidikan akibat penerapan prinsip *laïcité* mendorong Dewan Negara Prancis (*Le Conseil d'État*) angkat bicara dalam hal ini. Pada tahun 1989, Dewan Negara menyebutkan bahwa atribut keagamaan itu sendiri memang tidak secara langsung bertentangan dengan karakter *laïcité*, melainkan hanya sebagai tanda atau cara mengekspresikan identitas keagamaan seseorang. Dengan kata lain, penggunaan atribut keagamaan di sekolah diperkenankan hanya sebagai bentuk ekspresi keagamaan dan ketika akan menjalankan kegiatan agama. Sedangkan penggunaan

atribut semacam ini dilarang untuk digunakan jika hanya bertujuan untuk “memamerkan” agama yang dianut oleh para siswa, mengganggu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, serta menimbulkan diskriminasi atau memancing konflik dengan sesama murid di lingkungan sekolah. Oleh karena itu bagi sekolah-sekolah negeri yang menerapkan *laïcité* di dalamnya, diperlukan pertimbangan kembali terhadap kebijakan dalam menetapkan larangan dan sanksi yang akan dijatuhkan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Hal ini khususnya perlu mendapat perhatian dari pemimpin sekolah.

Fenomena penggunaan atribut keagamaan di sekolah-sekolah negeri yang dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap karakter *laïcité* juga telah menarik perhatian Francois Bayrou selaku menteri pendidikan nasional dalam periode tahun 1994. Pada waktu itu, pemerintah mengeluarkan beberapa siswi berjilbab dari sekolah negeri tempat mereka belajar di Mantes-la-Jolie, departemen Yvelines, wilayah regional Île-de-France demi mempertahankan karakter *laïcité* yang tidak mengakui agama apapun, termasuk dalam bidang pendidikan. Tindakan pemerintah ini kembali memicu aksi demonstrasi oleh golongan umat muslim. Untuk itu Bayrou menulis sebuah surat edaran sebagai upaya untuk mendamaikan prinsip-prinsip *laïcité* yaitu bentuk toleransi, kebebasan hati nurani dan kenetralan dari pihak sekolah. Jika ditinjau dari alasannya, keinginan Bayrou ini selaras dengan karakteristik *laïcité*.

Menurut Bayrou, penggunaan atribut yang “tidak mencolok” oleh para siswa dalam mengekspresikan ke... mereka atas agama tertentu

diperbolehkan. Tetapi, atribut “mencolok” yang mengandung bentuk diskriminasi dilarang untuk dikenakan. Sekilas, pernyataan Bayrou tersebut diharapkan dapat melentukkan sikap pemerintah Prancis dalam soal penggunaan atribut keagamaan di sekolah-sekolah negeri. Namun, tidak ada acuan jelas yang dapat menentukan seperti apakah atribut keagamaan yang dikategorikan “mencolok” dan yang “tidak mencolok” tersebut. Akibatnya, polemik tersebut terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Hingga tahun 2003, belum ada ketetapan yang pasti dari pemerintah Prancis mengenai diizinkan atau tidaknya penggunaan atribut keagamaan di sekolah-sekolah negeri.

Menghadapi kondisi demikian dan sebagai tindak lanjut dari pernyataan dewan negara di tahun 1989, maka pada bulan Juli tahun 2003, Jacques Chirac yang pada saat itu menjabat sebagai presiden republik Prancis membentuk sebuah komisi guna mempertimbangkan kembali penerapan karakter *laïcité* yang telah menimbulkan masalah-masalah pada sistem pendidikan di Prancis (Bruley, 2005 : 160). Chirac menunjuk Bernard Stasi, seorang tokoh politik Prancis untuk memimpin komisi tersebut. Setelah melewati diskusi yang panjang, maka panitia komisi membuat laporan yang berfokus pada beberapa hal. Hal-hal tersebut diantaranya adalah perlunya penegasan kembali tentang prinsip-prinsip *laïcité* dan kenetralan yang harus ditunjukkan oleh setiap institusi publik, perlunya pengajaran dan pendidikan agama, perlunya melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap umat muslim di Prancis, perlunya mengadopsi undang-undang tentang *laïcité* yang merinci aturan-aturan dalam pemberlakuan konsep tersebut di wilayah publik dan t

keragaman spiritual masyarakat Prancis, serta perlunya mempertimbangkan acara keagamaan agama-agama besar di Prancis, seperti *Yom Kippur* dan *Aid-El-Kebir*. Arviani (2010 : 41) menjelaskan bahwa *Yom Kippur* adalah hari besar paling penting dalam agama Yahudi yang dirayakan per tanggal 10 bulan Tishri, atau hari ke-10 setelah tahun baru umat Yahudi, *Rosh Hashana* (sekitar bulan September dan Oktober). Pada hari tersebut, umat Yahudi berusaha menebus segala dosa mereka dan kembali mendekatkan diri dengan Tuhan. Sedangkan *Aid-El-Kebir* adalah nama lain untuk *Aid-El-Adha* dalam Bahasa Prancis, atau Idul Adha dalam Bahasa Indonesia.

Point terakhir yang dipertimbangkan secara spesifik berkaitan secara langsung dengan sekolah. Komisi ini menganjurkan pelarangan terhadap penggunaan simbol-simbol yang secara jelas menunjukkan keterikatan siswa dengan suatu sistem kepercayaan atau agama tertentu. Dalam pertimbangan komisi Stasi, penggunaan atribut keagamaan di lingkungan sekolah dapat menciptakan diskriminasi yang berujung konflik. Selain itu, karakter *école laïque* yang bebas dari unsur-unsur agama dapat menjadi tidak jelas jika para siswa menggunakan tanda-tanda semacam itu di lingkungan sekolah negeri. Bersamaan dengan rencana itu, ketua Dewan Nasional Prancis Jean-Louis Debré juga memimpin pekerjaan misi parlemen. Hasil kerjanya tidak jauh berbeda dengan keputusan yang dicapai oleh *La Commission Stasi*, yaitu mendukung penerapan karakter *laïcité* di lembaga pendidikan melalui pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri.

Keputusan yang dihasilkan oleh komisi Stasi dan Dewan Nasional Prancis tersebut disampaikan oleh Jacques Chirac melalui pidato di *l'Élysée* (kediaman presiden republik Prancis) pada akhir tahun 2003. Mengetahui hal ini, para siswi berjilbab di Prancis kembali melakukan demonstrasi. Berpijak pada kesetaraan hak dan kedudukan warga negara serta jaminan akan kebebasan hati nurani yang merupakan karakter *laïcité*, mereka menolak rancangan tersebut. Bagi mereka, penggunaan jilbab merupakan kebebasan hati nurani umat muslim. Mereka juga menuntut persamaan hak bagi perempuan. Dalam pandangan gadis-gadis ini, pelarangan penggunaan jilbab juga berarti mendiskriminasikan hak-hak kaum perempuan.

Setelah melewati perdebatan yang panjang di tengah-tengah pro-kontra akan rancangan pemerintah Prancis bagi sistem pendidikan, sekularisasi terhadap sekolah-sekolah negeri di Prancis dimatangkan melalui pengesahan undang-undang tertanggal 15 Maret 2004. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mencirikan karakter *laïcité* yaitu tidak adanya pengakuan dari negara terhadap agama apapun. Isi dalam undang-undang ini menetapkan pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah-sekolah negeri di Prancis, baik itu tingkat dasar, menengah, atau lanjutan. Atribut-atribut keagamaan tersebut antara lain adalah *jilbab* (Islam), *salib* (Nasrani), *turban* (Sikh), dan *kippa* (Yahudi). Rusmawati (2009 : 144) mengatakan bahwa pelaksanaan undang-undang ini dititikberatkan pada sekolah-sekolah negeri karena sekolah-sekolah tersebut merupakan lingkungan akulturasi, dimana di sekolah-sekolah ini tidak hanya terdiri dari para

siswa yang merupakan penduduk asli tetapi juga para imigran maupun warga negara asing yang berasal dari berbagai negeri dan bangsa.

Di awal tahun 2013, undang-undang ini sempat membuat seorang mahasiswi berjilbab di universitas di Nantes (*université de Nantes*) dikeluarkan dari kelas oleh dosen sementara (*professeur vacataire*) yang sedang mengajar. Belakangan, pihak manajemen universitas beserta dengan dosen tersebut meminta maaf kepada sang mahasiswi dan mengembalikan haknya untuk mengikuti perkuliahan. Kasus ini menunjukkan bahwa undang-undang pelarangan atribut keagamaan yang diterapkan di sekolah-sekolah negeri tidak dapat diberlakukan di lingkup universitas bagi para mahasiswa. Pada tahun yang sama, sebuah angket yang diadakan oleh IFOP (*Institut français d'opinion publique*) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Prancis justru menginginkan agar undang-undang pelarangan penggunaan atribut keagamaan ini tidak hanya diberlakukan di lembaga milik pemerintah, melainkan juga di lembaga swasta, dan termasuk di dalamnya sekolah swasta (*école privée*).

Dari segi lain, Dewan Pendidikan Prancis mengizinkan dibukanya sekolah untuk umat muslim tingkat lanjutan pada tahun 2003 disusul dengan tingkat menengah di tahun 2008. Persetujuan pemerintah Prancis atas dibukanya kedua sekolah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengabaikan keberadaan dan kebebasan hati nurani umat muslim di Prancis. Pembentukan kedua sekolah ini juga didanai secara mandiri oleh pihak swasta tanpa keterlibatan pemerintah di dalamnya. Meski berlatar belakang agama, sekolah-sekolah ini membuka diri dalam menerima semua siswa tanpa adanya pembedaan. Proyek yang diajukan

adalah mengembangkan sikap toleransi dan rasa hormat terhadap orang lain. Fakta-fakta ini mengindikasikan bahwa pembentukan sekolah-sekolah ini didasarkan pada karakter *laïcité*, yaitu jaminan atas kebebasan hati nurani dan tidak adanya subsidi yang diberikan dari negara kepada lembaga agama apapun.

Sementara itu di tahun 2011, golongan Partai Kiri (*Parti de Gauche*) yang merupakan penjunjung nasionalis dan liberal berupaya untuk memberhentikan subsidi yang diberikan oleh publik kepada sekolah swasta. Golongan ini juga mengamati bahwa masih banyak wilayah di Prancis yang belum mendirikan sekolah negeri (*école publique*). Kondisi ini mendorong mereka untuk memastikan ketersediaan sistem pendidikan sekuler dengan cara mengajukan usulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Senat) republik Prancis.

Penerapan karakter *laïcité* dalam bidang pendidikan terus diperkuat hingga saat ini. Misalnya pada tahun 2012 yang lalu, menteri pendidikan Prancis, Vincent Peillon, mengumumkan rencana pengembangan ajaran moralitas sekuler (*l'enseignement de morale laïque*) dari tingkat sekolah dasar (*école primaire*) hingga sekolah lanjutan (*lycée*). Ajaran moralitas sekuler adalah seperangkat pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip dan aturan dalam republik Prancis yang memungkinkan seluruh masyarakat Prancis untuk hidup bersama dalam cita-cita memperkuat kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan (*liberté, égalité, fraternité*). Pengajaran sekuler ini serupa dengan yang telah diterapkan dalam masa awal sistem pendidikan Prancis selama masa pemerintahan republik ketiga. Pengembangan ini dimaksudkan agar pendidikan moralitas sekuler semakin kuat tertanam dal

Penting untuk dipahami bahwa tujuan dari didirikannya sekolah negeri di Prancis adalah untuk mempersiapkan anak-anak Prancis menjadi warga negara yang memiliki kecerdasan politik yang tinggi. Sekolah negeri juga mempunyai misi untuk menyampaikan nilai-nilai identitas Prancis sebagai sebuah republik *laïque*, mengutamakan pengembangan cara berpikir kritis, serta meniadakan batas dalam proses kebebasan berpikir. Sebagai sekolah yang didukung oleh negara, sekolah negeri harus memastikan bahwa sarana yang digunakannya dapat mencapai keberhasilan dalam tujuan-tujuan tersebut, misalnya melalui pengembangan sumber daya manusia dan material. Itulah sebabnya suasana dalam lingkungan sekolah negeri harus sepenuhnya dibuat sekuler, dari segi isinya, programnya, dan sikap yang ditunjukkan oleh para pengajar di dalamnya. Meskipun sempat mengundang polemik pada saat diumumkan pertama kali, program yang diajukan Peillon ini rencananya akan diterapkan mulai tahun ajaran 2015.

BAB IV

IV.1 Kesimpulan

Prancis adalah satu-satunya negara di Eropa yang benar-benar menerapkan tradisi sekuler (*laïcité*) yang nyata. *Laïcité* merupakan alat yang ditempa dengan susah payah selama lebih dari satu abad dalam kemajuan dan penerimaannya di Prancis sebagai penengah yang tidak berat sebelah, pengatur ketegangan sosial yang menyiratkan kebebasan hati nurani, kebebasan berekspresi, kebebasan beribadah serta praktek keagamaan. Maka Prancis tidak akan mentolerir hal apapun merusak usaha penaklukan yang berharga ini, yaitu pemisahan resmi antara gereja dan negara.

Konsep *laïcité* masuk ke dalam berbagai sektor dalam kehidupan masyarakat Prancis. Dampak yang paling jelas terlihat adalah dalam segi pendidikan karena sebelum terbentuknya Prancis sebagai sebuah republik *laïque*, sistem pendidikan di Prancis diatur sepenuhnya di bawah kekuasaan gereja Katolik. Karakteristik *laïcité* pada dasarnya mencakup tiga prinsip utama, yaitu negara menjamin kebebasan hati nurani, negara tidak mengakui, membayar, atau memberikan bantuan finansial kepada interpretasi agama apapun, serta menjamin persamaan hak dan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum tanpa membedakan latar belakang mereka. Ketiga prinsip dasar ini menjadi landasan bagi seluruh bidang kehidupan di Prancis, terutama dalam bidang pendidikan.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pemerintahan Republik Ketiga telah memperkenalkan sistem pendidikan yang bebas biaya (*gratuite*), sekuler (*laïque*), dan wajib (*obligatoire*) bagi seluruh anak-anak di Prancis. Meskipun demikian, sekolah sekuler (*école laïque*) bukanlah sekolah yang anti-agama, melainkan sekolah yang bersifat netral. Penerapan kenetralan sekolah-sekolah negeri (*école publique*) di Prancis nyata dengan dihilangkannya pendidikan agama dalam kurikulum dan digantikan dengan pengajaran moral sekuler yang mengajarkan nilai-nilai identitas republik Prancis. Sekolah sekuler (*école laïque*) bertujuan untuk memenuhi fungsi republik dalam membentuk anak-anak Prancis sebagai warga negara yang mampu memajukan Prancis sebagai negara demokrasi liberal, menanamkan komitmen dalam hal hukum, keadilan, prinsip kesetaraan, mengajar pola berpikir kritis, dan mencerminkan karakter *laïcité*. Pengajaran moralitas sekuler (*morale laïque*) juga diharapkan dapat menjadi sarana bagi anak-anak di Prancis dalam melatih pikirannya, membentuk mereka sebagai orang dewasa yang mandiri, dan bukan sebagai penjunjung gereja. Itulah sebabnya pengajaran moralitas sekuler terus dikembangkan hingga saat ini, seperti yang direncanakan oleh menteri pendidikan Prancis, Vincent Peillon pada tahun lalu.

Sekularisasi pada sekolah-sekolah negeri di Prancis tidak hanya diberlakukan bagi kurikulum pengajarannya saja, melainkan juga bagi para guru yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut. Pemerintah Prancis menetapkan bahwa para pengajar di sekolah-sekolah negeri harus berasal dari kalangan awam, dan bukan golongan rohaniwan agama tertentu.

Karakter *école laïque* pada dasarnya menjamin martabat dan keyakinan, keharmonisan hubungan sosial, serta perkembangan kepribadian dari masing-masing siswa. Sekolah menganggap seluruh siswa sebagai individu yang merdeka dan bukan sebagai anggota dari komunitas agama tertentu. Namun, prinsip *laïcité* hanya diterapkan di sekolah negeri milik pemerintah (*école publique*), sedangkan sekolah swasta (*école privée*) memiliki hak untuk menerapkan *laïcité* atau tidak.

Selain itu dalam lingkup sekolah negeri, para siswa juga dilarang untuk mengenakan atribut atau simbol-simbol dari suatu keagamaan tertentu melalui undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Prancis pada tahun 2004. Pelaksanaan undang-undang ini difokuskan pada sekolah-sekolah negeri karena sekolah negeri merupakan lingkungan akulturasi, dimana di sekolah-sekolah ini tidak hanya terdiri dari para siswa yang merupakan penduduk asli tetapi juga para imigran maupun warga negara asing yang berasal dari berbagai negeri dan bangsa. Para pendatang ini masih cenderung memegang kuat budaya asli dan ideologi mereka masing-masing sehingga memerlukan waktu untuk dapat beradaptasi dengan karakter *laïcité* di negara Prancis. Namun, hingga saat ini undang-undang ini tidak berlaku bagi para mahasiswa di Prancis dalam wilayah universitas tempat mereka belajar.

Kesimpulan lain yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bahwa pemerintah Prancis memiliki alasan-alasan yang kuat mengapa konsep *laïcité* tetap dipertahankan hingga saat ini meskipun telah menuai berbagai protes dari segala penjuru dunia akibat kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam upaya menerapkan karakter *laïcité* dengan begitu keras dalam dunia pendidikan. Alasan

tersebut diantaranya adalah untuk mempertahankan ideologi (*idéologie*) dan budaya (*culture*) Prancis. Melalui konstitusi pemisahan gereja dan negara tahun 1795 yang kemudian disempurnakan dalam undang-undang tahun 1905, ditetapkan bahwa ideologi negara Prancis adalah sekuler (*laïque*). Pasal 2 dari konstitusi Prancis tahun 1958 juga menyatakan bahwa Prancis ditetapkan sebagai sebuah negara dengan ideologi sekuler. Pemerintah Prancis mengharapkan agar ideologi tersebut menjadi ideologi bagi setiap warga negaranya, baik penduduk asli maupun pendatang yang menetap di Prancis.

Sementara itu, pada awalnya budaya dan latar belakang agama di Prancis adalah Katolik, namun melalui konstitusi 1795 dan undang-undang 1905, maka tradisi atau budaya Prancis adalah sekuler (*laïque*). Pemerintah Prancis juga mengharapkan agar seluruh warga negaranya, baik penduduk asli, warga negara asing maupun kaum imigran mengadaptasi budaya sekuler ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun mengedepankan prinsip *égalité* dalam semboyan yang dianutnya, tentu bukanlah hal yang berlebihan jika Prancis sebagai negara “tuan rumah” menuntut agar warga negaranya menyesuaikan diri dengan ideologi dan budaya yang ditetapkan oleh undang-undang setempat. Jika mengacu kembali pada ketiga karakteristik *laïcité* yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka kebijakan-kebijakan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencerminkan nilai-nilai universal republik Prancis sebagai sebuah negara yang menganut paham sekuler.

Jadi, kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan diatas bukanlah semata-mata karena pemerintah Prancis ingin menekan komunitas imigran di sana, baik yang beragama muslim maupun agama lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut juga bukan merupakan suatu bentuk ketidakadilan berupa tindakan diskriminasi terhadap kaum imigran Prancis. Sebaliknya, *laïcité* merupakan identitas dari negara Prancis yang bertujuan untuk melindungi semua anggota masyarakat di dalamnya. Sebagai sebuah negara multikultural, Prancis memiliki kemajemukan yang ditandai dengan keragaman dalam hal agama dan budaya. Keadaan tersebut berpotensi kuat dalam menciptakan konflik dan memecah belah persatuan negara Prancis. Dalam kondisi seperti inilah *laïcité* berperan dalam menciptakan integrasi dan membuat seluruh masyarakat yang terdiri dari berbagai keragaman dan perbedaan membaaur dalam satu kesatuan. Integrasi ini dapat dimulai dari anak-anak melalui pendidikan yang mereka terima.

IV.2 Implikasi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa jurusan Bahasa Prancis Universitas Negeri Jakarta khususnya menjadi salah satu bahan referensi dalam mata kuliah *Civilisation française*. Selaras dengan harapan tersebut, penelitian ini berupaya untuk menginformasikan tentang sebuah realitas di Prancis, yaitu penerapan paham sekuler *laïcité* yang dipegang teguh oleh masyarakat Prancis dalam sistem pendidikannya. Meskipun telah lebih dari satu abad Prancis mengadopsi paham *laïcité* melalui pengesahan undang-undang pemisahan gereja dan negara tahun 1905, namun perkembangannya dari

waktu ke waktu terus berubah, termasuk dari sudut pandang pendidikan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan juga dapat membantu mahasiswa untuk mampu menilai dan menafsirkan paham *laïcité* itu sendiri, bukan sebagai suatu paham yang menolak atau anti terhadap keberadaan agama, atau bentuk diskriminasi pemerintah Prancis terhadap suatu golongan tertentu, melainkan suatu tradisi, bentuk budaya, dan bahkan identitas dari negara Prancis.

IV.3 Saran

Penelitian ini merupakan suatu bentuk analisis isi berupa dampak paham sekuler *laïcité* pada sistem pendidikan di Prancis. Namun, penelitian ini tentu juga memiliki kekurangan karena sumber-sumber informasi yang dijadikan bahan referensi hanya terbatas pada pustaka literatur tercetak dan elektronik saja. Selain itu, berbagai dampak dari paham sekuler *laïcité* dalam sendi kehidupan pendidikan Prancis yang diteliti hanya bersifat umum. Oleh karena itu, bagi mahasiswa lain yang tertarik mengadakan penelitian serupa di kemudian hari, diharapkan untuk lebih memperkaya studi kepustakaan yang digunakan, misalnya dengan melakukan wawancara atau angket terhadap warga negara Prancis yang tinggal di Indonesia, untuk menanyakan secara langsung bagaimana penerapan konsep *laïcité* yang sesungguhnya di negara mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Kilany, Isma'il. 1992. *Sekularisme – Upaya Memisahkan Agama dari Negara*. Jakarta: Pustaka Alkautsar.
- André, Maurice, dkk. 2004. *Un œil sur La Laïcité*. Mouans-Sartoux (Alpes Maritimes): PEMF.
- Bedouelle, Guy & Paul Costa, Jean. 1998. *Les laïcités à la Française*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Bruley, Yves. 2005. *Histoire de la Laïcité à la Française*. Paris: Académie des Sciences Morales et Politiques.
- Carpentier, Jean & Lebrun, François. 2000. *Histoire de France*. Paris: Romain-Rolland.
- Denny JA, dkk. 2000. *Negara Sekuler – Sebuah Polemik*. Jakarta: Putra Berdikari Bangsa.
- Lazar, Philippe. 2003. *Autrement dit laïque*. Paris: Liana Levi.
- Léon, Antoine & Roche, Pierre. 2003. *Que sais-je ? – Histoire de L'Enseignement en France*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Miles, B. Matthew & Huberman, Michael.A. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Pardoyo. 1993. *Sekularisasi dalam Polemik*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Vasconcellos, Maria. 1993. *Le Système Éducatif*. Condé-sur-l'Escaut: Presses de l'imprimerie Carlo Descamps.

B. Penelitian yang Relevan

Arviani, Nadya. 2010. *Peran Pemerintah Prancis dalam Penyelesaian Kontroversi Penggunaan Atribut Keagamaan di Sekolah Negeri di Prancis Melalui Undang-Undang No.2004-228, 15 Maret 2004*. Skripsi. Jurusan Sastra Prancis, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.

Rusmawati, Roosi. 2009. *Undang-Undang Laïcité 2004 – Sebuah Analisis terhadap Disahkannya Undang-Undang Pelarangan Pemakaian Simbol-Symbol Keagamaan di Sekolah-Sekolah Negeri Prancis*. Laporan Penelitian. Universitas Brawijaya.

Soetedjo, Soegihono. 1991. *Pengaruh École Laïque pada Praktek Keagamaan di Prancis*. Skripsi. Jurusan Sastra Prancis, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.

Tania, Restu Rahajeng. 2012. *Laïcité dalam Majalah Marianne*. Skripsi. Jurusan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta.

C. Halaman Internet

http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=812327&xtmc=le_lycee_musulman_averroes_de_lille&xtr=18 (diakses bulan April 2013)

<http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/03/04/01011-20080304FILWWW00566-ouverture-d-un-college-musulman-a-vitry.php> (diakses bulan April 2013)

<http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/04/04/97001-20110404FILWWW00610-laicite-proposition-de-loi-du-pg.php> (diakses bulan April 2013)

<http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/01/18/97001-20130118FILWWW00418-une-etudiante-voilee-brievement-exclue.php> (diakses bulan Mei 2013)

<http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/03/23/97001-20130323FILWWW00335-les-francais-contre-le-foulard-dans-le-prive.php> (diakses bulan Mei 2013)

<http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/04/22/97001-20130422FILWWW00394-morale-a-l-ecole-retour-prevu-en-2015.php> (diakses bulan Mei 2013)

LAMPIRAN

L'ouverture d'un lycée musulman autorisée à Lille

Publié le 12/07/2003

Source : http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=812327&xtmc=le_lycee_musulman_averroes_de_lille&xtcr=18

Le Conseil supérieur de l'éducation a autorisé, jeudi 10 juillet, l'ouverture d'un lycée privé musulman à Lille (Nord). L'établissement privé hors contrat (sans aide de l'Etat), baptisé lycée Averroès, devrait ouvrir à la rentrée de septembre dans les locaux de la mosquée de Lille-sud avec une classe de seconde d'enseignement général de 25 à 30 élèves et une équipe de douze professeurs issus de l'enseignement public ou privé de la région lilloise.

Ouverture d'un collège musulman à Vitry

Publié le 04/03/2008 à 19:29

Source : <http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/03/04/01011-20080304FILWWW00566-ouverture-d-un-college-musulman-a-vitry.php>

Un collège privé musulman "ouvert à toutes et à tous" devrait ouvrir lundi, à l'occasion de la rentrée des vacances scolaires, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), avec pour commencer une classe de 6ème, ont annoncé mardi les initiateurs de ce projet.

L'ouverture de la classe de 6ème devrait être suivie en septembre de celle d'une seconde classe de 6ème et d'une classe de 5ème, a précisé dans un communiqué l'association Education et Savoir, qui travaille au projet depuis deux ans." Après deux années d'études, d'efforts et d'échanges avec les autorités", l'association, qui regroupe une vingtaine de cadres et chefs d'entreprise de la communauté musulmane, assure avoir "obtenu toutes les autorisations nécessaires" et "remercie" à cet effet le maire de la commune et l'Inspecteur d'académie.

Ce collège privé mixte, "ouvert à toutes et à tous, porte un projet éducatif qui vise la réussite et l'excellence", souligne l'association, qui souhaite inculquer aux élèves "le sens du respect, de la tolérance, de l'ouverture à l'autre et le goût du travail".

Laïcité: proposition de loi du PG

Publié le 04/04/2011, à 17 : 52

Source : : <http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/04/04/97001-20110404FILWWW00610-laicite-proposition-de-loi-du-pg.php>

Le Parti de gauche (PG) a déposé aujourd'hui au Sénat une proposition de loi "relative à la promotion de la laïcité et la clarification des règles de son application concrète", indique la formation de Jean-Luc Mélenchon dans un communiqué. M. Mélenchon, co-président du PG, veut "sortir de la logique des arrangements qui a trop longtemps prévalu à gauche en matière de laïcité", souligne le communiqué. Le PG veut "être à l'offensive en défendant fermement le principe de la laïcité face à la droite et à l'extrême droite".

Cette proposition de loi déposée par la sénatrice CRC-SPG (Communiste et parti de gauche) Marie-Agnès Labarre (Essonne) préconise d'appliquer la loi de 1905 sur l'ensemble du territoire" et notamment en Alsace-Moselle où subsiste le régime du concordat de 1801 et en Guyane "où la législation de Charles X s'applique encore". Autre mesure, supprimer les "avantages publics en matière fiscale" dont bénéficient les religions pour "mettre un terme à leur financement indirect". Le parti de Jean-Luc Mélenchon estime en outre nécessaire de "renforcer la laïcité dans les services publics : les usagers ne pourront pas invoquer un motif religieux pour obtenir un traitement particulier dans un service public". Enfin, "l'application de la laïcité sera aussi étendue dans les crèches, maisons de retraite et plus largement tous les établissements relevant d'une délégation de service public". Concernant l'enseignement, le PG souhaite mettre fin aux subventions publiques aux établissements privés", et "assurer un enseignement public gratuit et laïque sur l'ensemble du territoire de la République française", le PG s'indignant du fait qu'"il existe aujourd'hui plus de 500 communes sans école publique en France".

Mesure en corrélation, l'abrogation de la loi dite "Carle" de 2009 qui a "organisé l'inégalité financière au détriment du service public d'éducation en créant des privilèges en faveur de l'enseignement privé"

Une étudiante voilée brièvement exclue

Publié le 18/01/2013 à 12h17

Source : <http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/01/18/97001-20130118FILWWW00418-une-etudiante-voilee-brievement-exclue.php>

Une étudiante nantaise portant le voile islamique sur les cheveux a été brièvement exclue par erreur, hier, d'un cours par une professeur vacataire, avant d'être réintégrée avec des excuses de la direction, indique aujourd'hui l'université de Nantes.

Confirmant une information du quotidien *Presse-Océan*, l'université a indiqué qu'une enseignante vacataire, "qui enseigne d'ordinaire au lycée", a demandé en début de cours à cette étudiante, ainsi qu'à un jeune homme portant un bonnet, de se découvrir.

Le jeune homme a obtempéré mais pas la jeune femme, qui est allée s'adresser aux responsables de son département, l'UFR Sciences et Techniques. Ceux-ci sont aussitôt venus expliquer son erreur à l'enseignante, indique la même source. La vacataire s'est excusée auprès de l'étudiante, qui a été réintégrée dans le cours.

La loi du 15 mars 2004 sur la laïcité interdit le port de signes religieux "ostentatoires", toutes confessions confondues, dans les écoles, collèges et lycées publics, mais elle ne s'applique pas aux étudiants à l'université.

L'opinion contre le foulard dans le privé

Publié le 23/03/2013 à 09:18

Source : <http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/03/23/97001-20130323FILWWW00335-les-francais-contre-le-foulard-dans-le-privé.php>

Les Français se déclarent à une écrasante majorité (84%) opposés au port du voile ou du foulard islamique par des femmes travaillant dans des lieux privés accueillant du public (commerces, supermarchés, cabinets médicaux, crèches, écoles privées), révèle un sondage Ifop à paraître dans Dimanche Ouest France.

Ce sondage, mené sur un échantillon de 1.004 personnes, représentatif de la population, selon la méthode des quotas, a été réalisé du 19 au 21 mars, après l'annulation par la Cour de cassation du licenciement d'une employée voilée de la crèche privée Baby Loup.

La plus haute juridiction française a rappelé, par cette décision, la distinction qui était opérée dans le droit, conformément à la philosophie du modèle français de laïcité, entre l'espace public d'Etat (et les services publics qui en dépendent) et le secteur privé.

Selon le sondage de l'Ifop, "tout se passe donc comme si la distinction juridique entre espace public et lieu privé accueillant du public, rappelée par la Cour de cassation n'était pas opérante ou pertinente pour une écrasante majorité de la population".

Ainsi, 84% des personnes interrogées sont opposées au port du voile ou du foulard islamique dans des lieux privés accueillant du public. Seules 12 % se montrent indifférentes et 4% favorables.

L'Ifop relève que ces chiffres, "très tranchés, sont quasi identiques à ce que nous mesurons en octobre dernier concernant le port du voile ou du foulard dans les classes d'écoles publiques, auquel 89% des personnes interrogées étaient opposées", et nettement supérieurs à ceux qui concernaient alors leur port dans la rue ("seulement" 63% d'opposés en octobre).

L'opposition au port du voile dans des commerces, crèches ou cabinets médicaux, "transcende les clivages politiques". Si 98% des sympathisants du FN et 92% de ceux de l'UMP sont sur cette position, elle est également partagée par 77% des proches de la gauche, au sein desquels ceux qui n'y sont pas opposés ne sont pas tant favorables (7%) qu'indifférents (16%).

De la même façon, les écarts sont inexistantes entre hommes et femmes (84% d'opposés dans les deux cas) et peu marqués selon les générations (76% parmi les moins de 35 ans contre 86% auprès des 65 ans et plus) ou les catégories sociales (82% d'opposés parmi les CSP+ contre 87% dans les milieux populaires).

L'opinion publique est donc dans ses multiples composantes très majoritairement en demande d'une conception beaucoup plus 'offensive' du principe de laïcité à la française", conclut le sondage.

Morale à l'école: retour prévu en 2015

Publié le 22/04/2013 à 13 : 20

Source : <http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/04/22/97001-20130422FILWWW00394-morale-a-l-ecole-retour-prevu-en-2015.php>

L'enseignement de la morale laïque devrait faire son retour à l'école en France, du CP à la terminale, à la rentrée 2015, annonce le ministre de l'Education nationale, Vincent Peillon, dans un entretien publié aujourd'hui par Le Monde.

Le ministre précise au quotidien les modalités d'un enseignement qu'il avait annoncé à la veille de la rentrée de septembre 2012, provoquant une polémique.

"La morale laïque est un ensemble de connaissances et de réflexions sur les valeurs, les principes et les règles qui permettent, dans la République, de vivre ensemble selon notre idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité", dit-il.

La nécessaire réflexion sur le contenu de cet enseignement et le besoin d'y former les enseignants font qu'il ne pourra être mis en place dès la rentrée prochaine, dit Vincent Peillon. "Le cap est donc plutôt pour la rentrée 2015", ajoute-t-il.

Le Conseil national des programmes définira la mise en oeuvre de cet enseignement, qui bénéficiera d'horaires dédiés et sera évalué. "Ma préconisation, c'est une heure minimum dans le primaire (par semaine, ndlr), une heure minimum au collège, et pour le lycée, au minimum 18 heures annuelles", a précisé le ministre à la presse après la remise d'un rapport sur cet enseignement.

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Art. 5. La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ;

mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Art. 12. La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Art. 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Loi du 16 juin 1881 relative aux titres de capacité de l'enseignement primaire

*Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :*

Art. 1er.- Nul ne peut exercer les fonctions d'instituteur ou d'institutrice titulaire, d'instituteur-adjoint chargé d'une classe ou d'institutrice-adjointe chargée d'une classe, dans une école publique ou libre, sans être pourvu du brevet de capacité pour l'enseignement primaire.

Toutes les équivalences admises par le paragraphe 2 de l'article 25 de la loi du 15 mars 1850 sont abolies.

Art. 2.- Nulle ne peut exercer les fonctions de directrice ou de sousdirectrice de salles d'asile publiques ou libres, sans être pourvue du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile, institué par l'article 20, paragraphe 1er, du décret du 21 mars 1855.

Art. 3.- Les personnes occupant, sans les brevets et certificats sus-énoncés, les fonctions énumérées aux articles précédents, devront, dans le laps d'un an, à partir de la promulgation de la loi, se présenter devant les commissions d'examen instituées pour décerner lesdits brevets et certificats.

Celles qui auront échoué auront le droit de se présenter de nouveau aux sessions ordinaires ou extraordinaires tenues dans le cours des années suivantes, jusqu'à la rentrée des classes du mois d'octobre 1884.

Toutefois, les adjoints qui auront contracté, conformément à l'article 20 de la loi du 27 juillet 1872, l'engagement de se vouer pendant dix ans à la carrière de l'enseignement, et qui viendraient à échouer aux examens ci-dessus, conserveront le bénéfice de la dispense, à titre conditionnel, du service militaire.

Art. 4.- Les prescriptions de la présente loi ne s'appliqueront pas :

1° Aux directeurs d'écoles publiques ou libres qui, au 1er janvier 1881, exerçaient les fonctions de directeurs en vertu des équivalences établies par la loi du 15 mars 1850 ;

2° Aux directrices d'écoles et de salles d'asile publiques ou libres qui, au 1er janvier 1881, comptaient trente cinq ans d'âge et cinq ans au moins de services en qualité de directrices ;

3° Aux adjoints ou adjointes d'écoles publiques ou libres, ainsi qu'aux sous directrices de salles d'asile publiques ou libres qui, au 1er janvier 1881, comptaient trente cinq ans d'âge et cinq ans au moins de services comme adjoints ou adjointes chargés d'une classe ou comme sous-directrices d'une salle d'asile, sans toutefois que cette exemption leur permette d'obtenir ultérieurement la direction d'une école ou d'une salle d'asile en dehors des conditions prescrites par les articles 1er et 2 de la présente loi.

Fac-similé du Journal officiel du 17 juin 1881

Loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire

*Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :*

Art. 1er.- L'enseignement primaire comprend :
L'instruction morale et civique ;
La lecture et l'écriture ;
La langue et les éléments de la littérature française ;
La géographie, particulièrement celle de la France ;
L'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours ;
Quelques notions usuelles de droit et d'économie politique ;
Les éléments des sciences naturelles physiques et mathématiques ; leurs applications à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers ;
Les éléments du dessin, du modelage et de la musique ;
La gymnastique ;
Pour les garçons, les exercices militaires ;
Pour les filles, les travaux à l'aiguille.
L'article 23 de la loi du 15 mars 1850 est abrogé.

Art. 2.- Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.

Art. 3.- Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 14 mars 1850, en ce qu'elles donnent aux ministres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées et dans les salles d'asile, ainsi que le paragraphe 2 de l'article 31 de la même loi qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.

Art. 4.- L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie. Un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles.

Art. 5.- Une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles. Elle se compose du maire, président ; d'un des délégués du canton, et, dans les communes comprenant

plusieurs cantons, d'autant de délégués qu'il y a de cantons, désignés par l'inspecteur d'académie ; de membres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil. A Paris et à Lyon, il y a une commission pour chaque arrondissement municipal. Elle est présidée : à Paris, par le maire, à Lyon, par un des adjoints ; elle est composée d'un des délégués cantonaux, désigné par l'inspecteur d'académie, de membres désignés par le conseil municipal, au nombre de trois à sept par chaque arrondissement. Le mandat des membres de la commission scolaire désignés par le conseil municipal durera jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil municipal. Il sera toujours renouvelable. L'inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort.

Art. 6.- Il est institué un certificat d'études primaires ; il est décerné après un examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de onze ans. Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu le certificat d'études primaires, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer.

Art. 7.- Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l'enfant, le patron chez qui l'enfant est placé, devra, quinze jours au moins avant l'époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s'il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée ; dans ces deux derniers cas, il indiquera l'école choisie. Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou à l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leurs communes, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements. En cas de contestation, et sur la demande soit du maire, soit des parents, le conseil départemental statue en dernier ressort.

Art. 8.- Chaque année, le maire dresse, d'accord avec la commission municipale scolaire, la liste de tous les enfants âgés de six à treize ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants de l'époque de la rentrée des classes. En cas de non déclaration, quinze jours avant l'époque de la rentrée, de la part des parents et autres personnes responsables, il inscrit d'office l'enfant à l'une des écoles publiques, et en avertit la personne responsable. Huit jours avant la rentrée des classes, il remet aux directeurs d'écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un 2 double de ces listes est adressé par lui à l'inspecteur primaire.

Art. 9.- Lorsqu'un enfant quitte l'école, les parents ou les personnes responsables doivent en donner immédiatement avis au maire et indiquer de quelle façon l'enfant recevra l'instruction à l'avenir.

Art. 10.- Lorsqu'un enfant manque momentanément l'école, les parents ou les personnes responsables doivent faire connaître au directeur ou à la directrice les motifs de son absence. Les directeurs et les directrices doivent tenir un registre d'appel qui constate, pour chaque classe, l'absence des élèves inscrits. A la fin de

chaque mois, ils adresseront au maire et à l'inspecteur primaire un extrait de ce registre, avec l'indication du nombre des absences et des motifs invoqués. Les motifs d'absence seront soumis à la commission scolaire. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, décès d'un membre de la famille, empêchements résultant de la difficulté accidentelle des communications. Les autres circonstances exceptionnellement invoquées seront également appréciées par la commission.

Art. 11.- Tout directeur d'école privée qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article précédent sera, sur le rapport de la commission scolaire et de l'inspecteur primaire, déféré au conseil départemental. Le conseil départemental pourra prononcer les peines suivantes : 1° l'avertissement ; 2° la censure ; 3° la suspension pour un mois au plus, et, en cas de récidive dans l'année scolaire, pour trois mois au plus.

Art. 12.- Lorsqu'un enfant se sera absenté de l'école quatre fois dans le mois, pendant au moins une demi journée, sans justification admise par la commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable sera invité, trois jours au moins à l'avance, à comparaître dans la salle des actes de la mairie, devant ladite commission, qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir. En cas de non-comparution, sans justification admise, la commission appliquera la peine énoncée dans l'article suivant.

Art. 13.- En cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première infraction, la commission municipale scolaire ordonnera l'inscription, pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des noms, prénoms et qualités de la personne responsable, avec indication du fait relevé contre elle. La même peine sera appliquée aux personnes qui n'auront pas obtempéré aux prescriptions de l'article 9.

Art. 14.- En cas d'une nouvelle récidive, la commission scolaire ou, à son défaut, l'inspecteur primaire devra adresser une plainte au juge de paix. L'infraction sera considérée comme une contravention et pourra entraîner condamnation aux peines de police, conformément aux articles 479, 480 et suivants du code pénal. L'article 463 du même code est applicable.

Art. 15.- La commission scolaire pourra accorder aux enfants demeurant chez leurs parents ou leur tuteur, lorsque ceux-ci en feront la demande motivée, des dispenses de fréquentation scolaire ne pouvant dépasser trois mois par année en dehors des vacances. Ces dispenses devront, si elles excèdent quinze jours, être soumises à l'approbation de l'inspecteur primaire. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enfants qui suivent leurs parents ou tuteurs, lorsque ces derniers s'absenteront temporairement de la commune. Dans ce cas, un avis donné verbalement ou par écrit au maire ou à l'instituteur suffira. La commission peut aussi, avec l'approbation du conseil départemental, dispenser les enfants employés dans l'industrie, et arrivés à l'âge de l'apprentissage, d'une des deux classes de la

journée ; la même faculté sera accordée à tous les enfants employés, hors de leur famille, dans l'agriculture.

Art. 16.- Les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille doivent, chaque année, à partir de la fin de la deuxième année d'instruction obligatoire, subir un examen qui portera sur les matières de l'enseignement correspondant à leur âge dans les écoles publiques, dans des formes et suivant des programmes qui seront déterminés par arrêtés ministériels rendus en conseil supérieur. Le jury d'examen sera composé de : l'inspecteur primaire ou son délégué, président ; un délégué cantonal ; une personne munie d'un diplôme universitaire ou d'un brevet de capacité ; les juges seront choisis par l'inspecteur d'académie. Pour l'examen des filles, la personne brevetée devra être une femme. Si l'examen de l'enfant est jugé insuffisant et qu'aucune excuse ne soit admise par le jury, les parents sont mis en demeure d'envoyer leur enfant dans une école publique ou privée dans la huitaine de la notification et de faire savoir au maire quelle école ils ont choisie. En cas de non déclaration, l'inscription aura lieu d'office, comme il est dit à l'article 8.

Art. 17.- La caisse des écoles, instituée par l'article 15 de la loi du 10 avril 1867, sera établie dans toutes les communes. Dans les communes subventionnées dont le centime n'excède pas trente francs, la caisse aura droit, sur le crédit ouvert pour cet objet au ministère de l'instruction publique, à une subvention au moins égale au montant des subventions communales. La répartition des secours se fera par les soins de la commission scolaire.

Art. 18.- Des arrêtés ministériels, rendus sur la demande des inspecteurs d'académie et des conseils départementaux, détermineront chaque année les communes où, par suite d'insuffisance des locaux scolaires, les prescriptions des articles 4 et suivants sur l'obligation ne pourraient être appliquées. Un rapport annuel, adressé aux Chambres par le ministre de l'instruction publique, donnera la liste des communes auxquelles le présent article aura été appliqué.

Fac-similé du Journal officiel du 29 mars 1882

Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

*Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :*

TITRE 1er

Dispositions générales

CHAPITRE 1er – *Des établissements d'enseignement primaire.*

Art. 1er- L'enseignement primaire est donné : 1° Dans les écoles maternelles et les classes enfantines ; 2° Dans les écoles primaires élémentaires ; 3° Dans les écoles primaires supérieures et dans les classes d'enseignement primaire supérieur

annexées aux écoles élémentaires et dites « cours complémentaires » ; 4° Dans les écoles manuelles d'apprentissage, telles que les définit la loi du 11 décembre 1880.

Art. 2.- Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c'est-à-dire fondés et entretenus par l'Etat, les départements ou les communes, ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.

Art. 3.- Des règlements spéciaux, délibérés en conseil supérieur de l'instruction publique, détermineront les règles d'après lesquelles seront réparties, entre les diverses sortes d'écoles énumérées à l'article 1er, les matières de l'enseignement primaire, telles que les a fixées la loi du 28 mars 1882, ainsi que les conditions d'admission et de sortie des élèves dans chacune de ces écoles.

Art. 4.- Nul ne peut être directeur ou adjoint chargé de classe dans une école primaire publique ou privée, s'il n'est Français et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacité fixées par la loi du 16 juin 1881 et les conditions d'âge établies par la présente loi. Toutefois, les étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées, et admis à jouir des droits civils en France, peuvent enseigner dans les écoles privées, moyennant une autorisation donnée par le ministre, après avis du conseil départemental. Les étrangers, munis seulement de titres de capacité étrangers, devront obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets français. Un règlement, délibéré en conseil supérieur de l'instruction publique, déterminera les conditions dans lesquelles cette équivalence pourra être prononcée. Dans le cas particulier d'écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité pourront être accordées par le ministre de l'instruction publique, après avis du conseil supérieur, aux étrangers admis à jouir des droits civils en France, qui demanderaient à les diriger ou à y enseigner.

Art. 5.- Sont incapables de tenir une école publique ou privées ou d'y être employés, ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit contraire à la probité ou aux moeurs, ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal, et ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue, en vertu des articles 32 et 41 de la présente loi.

Art. 6.- L'enseignement est donné par des instituteurs dans les écoles de garçons, par des institutrices dans les écoles de filles, dans les écoles maternelles, dans les écoles ou classes enfantines et dans les écoles mixtes. Dans les écoles de garçons, des femmes peuvent être admises à enseigner à titre d'adjointes, sous la condition d'être épouse, soeur ou parente en ligne directe du directeur de l'école. Toutefois, le conseil départemental peut, à titre provisoire, et par une décision toujours révocable : 1° permettre à un instituteur de diriger une école mixte, à la condition qu'il lui soit adjoint une maîtresse de travaux de couture ; 2° autoriser des dérogations aux restrictions du second paragraphe du présent article.

Art. 7.- Nul ne peut enseigner dans une école primaire de quelque degré que ce soit avant l'âge de dix-huit ans pour les instituteurs et dix-sept ans pour les institutrices. Nul ne peut diriger une école avant l'âge de vingt-et-un ans. Nul ne peut diriger une école primaire supérieure ou une école recevant des internes avant l'âge de vingt-cinq ans révolus.

Art. 8.- Il peut être créé des classes primaires pour adultes ou pour apprentis ayant satisfait aux obligations des lois des 19 mai 1874 et 28 mars 1882. Il ne peut être reçu dans ces classes d'élèves des deux sexes. Un règlement ministériel déterminera les conditions d'établissement de ces classes et les conditions auxquelles ces cours publics et gratuits d'adultes ou d'apprentis pourront recevoir une subvention de l'Etat. L'ouverture d'un cours privé pour les adultes et pour les apprentis ci-dessus désignés est soumise aux conditions exigées pour l'ouverture d'une école privée, sauf dispense de tout ou partie de ces conditions par le conseil départemental.

CHAPITRE II.- *De l'inspection*

Art. 9.- L'inspection des établissements d'instruction primaire publics ou privés est exercée : 1° Par les inspecteurs généraux de l'instruction publique ; 2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ; 3° Par les inspecteurs de l'enseignement primaire ; 4° Par les membres du conseil départemental désignés à cet effet, conformément à l'article 50 ; Toutefois les écoles privées ne pourront être inspectées par les instituteurs et institutrices publics qui font partie du conseil départemental ; 5° Par le maire et les délégués cantonaux ; 6° Dans les écoles maternelles, concurremment avec les autorités précitées, par les inspectrices générales et les inspectrices départementales des écoles maternelles ; 7° Au point de vue médical, par les médecins inspecteurs communaux ou départementaux.

L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés par le conseil supérieur. Celle des écoles privées porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces écoles par la loi du 28 mars 1882. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois. Toutes les classes de jeunes filles, dans les internats comme dans les externats primaires publics et privés, tenues soit par des institutrices laïques, soit par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées, sont soumises, quant à l'inspection et à la surveillance de l'enseignement, aux autorités instituées par la loi. Dans tous les internats de jeunes filles tenus par des institutrices laïques ou par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées, l'inspection des locaux affectés aux pensionnaires et du régime intérieur du pensionnat est confiée à des dames déléguées par le ministre de l'instruction publique.

Art. 10.- Nul ne peut être nommé inspecteur primaire, s'il n'est pourvu du certificat d'aptitude à l'inspection, obtenu dans les conditions déterminées par les règlements délibérés en conseil supérieur. Des arrêtés ministériels détermineront le nombre et l'étendue des circonscriptions d'inspection primaire

dans chaque département, ainsi que les attributions, le classement, les frais de tournées et l'avancement des inspecteurs primaires.

TITRE II - De l'enseignement public

CHAPITRE 1er – De l'établissement des écoles publiques.

Art. 11.- Toute commune doit être pourvue au moins d'une école primaire publique. Toutefois, le conseil départemental peut, sous réserve de l'approbation du ministre, autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines, pour l'établissement et l'entretien d'une école. Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine. Cette mesure est prise par délibérations des conseils municipaux des communes intéressées. En cas de divergence, elle peut être prescrite par décision du conseil départemental. Lorsque la commune ou la réunion de communes compte 500 habitants et au-dessus, elle doit avoir au moins une école spéciale pour les filles, à moins d'être autorisée par le conseil départemental à remplacer cette école spéciale par une école mixte.

Art. 12.- La circonscription des écoles de hameau créées par application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1883 pourra s'étendre sur plusieurs communes. Dans le cas du présent article comme dans le cas de l'article précédent, les communes intéressées contribuent aux frais de construction et d'entretien de ces écoles dans les proportions déterminées par les conseils municipaux, et, en cas de désaccord, par le préfet après avis du conseil départemental.

Art. 13.- Le conseil départemental de l'instruction publique, après avoir pris l'avis des conseils municipaux, détermine, sous réserve de l'approbation du ministre, le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques de tout degré qu'il a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune, ainsi que le nombre des maîtres qui y sont attachés. Le conseil départemental pourra, après avis conforme du conseil municipal, autoriser un instituteur ou une institutrice à recevoir des élèves internes en nombre déterminé et dans des conditions déterminées.

Art. 14.- L'établissement des écoles primaires élémentaires publiques créées par application des articles 11, 12 et 13 de la présente loi est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : Le logement de chacun des membres du personnel enseignant attaché à ces écoles ; L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ; L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ; Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des gens de service, s'il y a lieu.

Art. 15.- L'article 7 de la loi du 16 juin 1881 est modifié comme il suit :
Sont mises au nombre des écoles primaires publiques, donnant lieu à une dépense obligatoire pour la commune, à la condition qu'elles soient créées conformément

aux prescriptions de l'article 13 de la présente loi : 1° Les écoles publiques de filles déjà établies dans les communes de plus de 400 âmes ; 2° Les écoles maternelles publiques qui sont ou seront établies dans les communes de plus de 2000 âmes et ayant au moins 1200 âmes de population agglomérée ; 3° Les classes enfantines publiques, comprenant des enfants des deux sexes et confiées à des institutrices.

CHAPITRE II.- *Du personnel enseignant. – Conditions requises.*

Art. 16.- L'enseignement dans les écoles publiques est donné conformément aux prescriptions de la loi du 28 mars 1882, et d'après un plan d'études délibéré en conseil supérieur. Pour chaque département, le conseil départemental arrêtera l'organisation pédagogique des diverses catégories d'établissements par des règlements spéciaux conformes au plan d'études ci-dessus.

Art. 17.- Dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel *laïque*.

Art. 18.- Aucune nomination nouvelle, soit d'instituteur, soit d'institutrice congréganistes, ne sera faite dans les départements où fonctionnera depuis quatre ans une école normale, soit d'instituteurs, soit d'institutrices, en conformité avec l'article 1er de la loi du 9 août 1879. 3 Pour les écoles de garçons, la substitution du personnel laïque au personnel congréganiste devra être complète dans le laps de cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Art. 19.- Toute action à raison des donations et legs faits aux communes antérieurement à la présente loi, à la charge d'établir des écoles ou salles d'asile dirigées par les congréganistes ou ayant un caractère confessionnel, sera déclarée non recevable, si elle n'est pas intentée dans les deux ans qui suivront le jour où l'arrêté de laïcisation ou de suppression de l'école aura été inséré au *Journal officiel*.

Art. 20.- Nul ne peut être nommé dans une école publique à une fonction quelconque d'enseignement s'il n'est muni du titre de capacité correspondant à cette fonction, et tel qu'il est prévu soit par la loi, soit par les règlements universitaires.

Art. 21.- Des décrets et arrêtés rendus en conseil supérieur détermineront les conditions d'obtention du brevet élémentaire et des divers titres de capacité exigibles dans les écoles publiques des différents degrés, savoir : Le brevet supérieur ; Le certificat d'aptitude pédagogique ; Le certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures ; Les diplômes spéciaux pour les enseignements accessoires : dessin, chant, gymnastique, travaux manuels, langues vivantes, etc ; Ainsi que le mode de nomination et de fonctionnement des commissions chargées d'examiner les candidats à ces divers brevets.

Art. 22.- Les instituteurs et institutrices sont divisés en stagiaires et titulaires.

Art. 23.- Nul ne peut être nommé instituteur titulaire s'il n'a fait un stage de deux ans au moins dans une école publique ou privée, s'il n'est pourvu du certificat d'aptitude pédagogique, et s'il n'a été porté sur la liste d'admissibilité aux fonctions d'instituteur dressée par le conseil départemental, conformément à l'article 27. Le temps passé à l'école normale compte, pour l'accomplissement du stage, aux élèves-maîtres à partir de dix-huit ans, aux élèves-maîtresses à partir de dix-sept. Des dispenses de stage peuvent être accordées par le ministre, sur l'avis du conseil départemental. Les titulaires chargés de la direction d'une école contenant plus de deux classes prennent le nom de directeur ou de directrice d'école primaire élémentaire.

Art. 24.- Les instituteurs et institutrices sont secondés, dans les écoles à plusieurs classes, par des adjoints en nombre déterminé par le conseil départemental. Ces adjoints sont ou des stagiaires ou des titulaires. Les instituteurs adjoints dans les écoles primaires supérieures devront avoir vingt-et-un ans et être munis du brevet supérieur. Ils prennent le titre de professeur s'ils sont pourvus du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales.

Art. 25.- Sont interdites aux instituteurs et institutrices publics de tout ordre les professions commerciales et industrielles et les fonctions administratives. Sont également interdits les emplois rémunérés ou gratuits dans les services des cultes. Toutefois cette dernière interdiction n'aura d'effet qu'après la promulgation de la loi relative aux traitements des instituteurs. Les instituteurs communaux pourront exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental.

CHAPITRE III – *Nomination du personnel enseignant – Peines disciplinaires – Récompenses*

Art. 26.- Les instituteurs et institutrices stagiaires enseignent en vertu d'une délégation de l'inspecteur d'académie. Cette délégation peut être retirée par l'inspecteur d'académie, sur l'avis motivé de l'inspecteur primaire. Les stagiaires sont passibles des mêmes peines disciplinaires que les titulaires, sauf la révocation. Ces peines leur sont applicables sous les conditions et garanties prévues par la présente loi.

Art. 27.- Le conseil départemental, après avoir pris connaissance des demandes de tous les candidats qui se sont inscrits à l'inspection académique, dresse chaque année et complète, s'il y a lieu, au cours de l'année, une liste des instituteurs et institutrices admissibles aux fonctions de titulaire, soit pour être chargés d'une école, soit pour être chargés d'une classe, en qualité d'adjoint. La nomination des instituteurs titulaires est faite par le préfet, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, et sur la proposition de l'inspecteur d'académie.

Art. 28.- Les directeurs, directrices et professeurs d'écoles primaires supérieures sont nommés par le ministre de l'instruction publique ; ils doivent être munis du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales. Les instituteurs adjoints munis du brevet supérieur et les maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires sont nommés ou délégués dans ces établissements par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie. Les directeurs et directrices d'écoles manuelles d'apprentissage sont nommés par le ministre de l'instruction publique dans les conditions prévues par la loi du 11 décembre 1880. Le mode de nomination, l'organisation de la surveillance, les garanties de capacité requises du personnel, ainsi que toutes les questions d'exécution intéressant concurremment le ministère de l'instruction publique et le ministère du commerce et de l'industrie seront déterminées par un règlement d'administration publique.

Art. 29.- Le changement de résidence d'une commune à une autre pour nécessités de service est prononcé par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie.

Art. 30.- Les peines disciplinaires applicables au personnel de l'enseignement primaire public sont : 1° La réprimande ; 2° La censure ; 3° La révocation ; 4° L'interdiction pour un temps dont la durée ne pourra excéder cinq années ; 5° L'interdiction absolue.

Art. 31.- La réprimande est prononcée par l'inspecteur d'académie. La censure est prononcée par l'inspecteur d'académie, après avis motivé du conseil départemental. Elle peut être prononcée avec insertion au *Bulletin des actes administratifs*. La révocation est prononcée par le préfet sur la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis motivé du conseil départemental. Dans le cas de la révocation, le fonctionnaire inculqué a le droit de comparaître devant le conseil et d'obtenir préalablement communication des pièces du dossier. Le fonctionnaire révoqué peut, dans le délai de vingt jours, à partir de la 4 signification de l'arrêté préfectoral, interjeter appel devant le ministre. Le pourvoi n'est pas suspensif. Les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures et d'écoles manuelles d'apprentissage, ainsi que les professeurs mentionnés dans l'article 24, sont déplacés ou révoqués par le ministre de l'instruction publique dans les formes déterminées par le troisième paragraphe du présent article.

Art. 32.- L'interdiction à temps et l'interdiction absolue sont prononcées par jugement du conseil départemental. Le fonctionnaire inculqué sera cité à comparaître en personne. Il pourra se faire assister par un défenseur et prendre communication du dossier. La décision du conseil départemental sera motivée. Le fonctionnaire interdit a le droit, dans le délai de vingt jours à partir de la signification du jugement, d'interjeter appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique. Cet appel ne sera pas suspensif. Un décret, rendu en la forme des règlements d'administration publique, déterminera les règles de la procédure pour l'instruction, le jugement et l'appel.

Art. 33.- Dans les cas graves et urgents, l'inspecteur d'académie, s'il juge que l'intérêt d'une école exige cette mesure, a le droit de prononcer la suspension provisoire d'un instituteur pendant la durée de l'enquête disciplinaire, à la condition de saisir de l'affaire le conseil départemental dès sa prochaine session. Cette suspension n'entraîne pas la privation de traitement.

Art. 34.- Les fonctionnaires de l'enseignement primaire public pourront recevoir des récompenses consistant en mentions honorables, médailles de bronze et médailles d'argent. Un arrêté ministériel déterminera les conditions dans lesquelles ces récompenses pourront être accordées. Les instituteurs mis à la retraite peuvent être nommés instituteurs honoraires, d'après un règlement qui sera délibéré par le conseil supérieur de l'instruction publique.

Fac-similé du Journal officiel du 31 octobre 1886

Constitution du 5 Fructidor an III (22 août 1795)

TITRE XIV

Dispositions générales

Article 351. - Il n'existe entre les citoyens d'autre supériorité que celle des fonctionnaires publics, et relativement à l'exercice de leurs fonctions.

Article 352. - La loi ne reconnaît ni voeux religieux, ni aucun engagement contraire aux droits naturels de l'homme.

Article 353. - Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée. - Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. - Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié, que dans les cas prévus par la loi.

Article 354. - Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi. - Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun.

Article 355. - Il n'y a ni privilège, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la liberté de la presse, du commerce, et à l'exercice de l'industrie et des arts de toute espèce. - Toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances la rendent nécessaire, est essentiellement provisoire, et n'a d'effet que pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée.

Article 356. - La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les moeurs publiques, la sûreté et la santé des citoyens ; mais on ne peut faire

dépendre l'admission à l'exercice de ces professions, d'aucune prestation pécuniaire.

Article 357. - La loi doit pourvoir à la récompense des inventeurs ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes ou de leurs productions.

Article 358. - La Constitution garantit l'inviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.

Article 359. - La maison de chaque citoyen est un asile inviolable : pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. - Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités constituées. - Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne ou l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite.

Article 360. - Il ne peut être formé de corporations ni d'associations contraires, à l'ordre public.

Article 361. - Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire.

Article 362. - Aucune société particulière, s'occupant de questions politiques, ne peut correspondre avec une autre, ni s'affilier à elle, ni tenir des séances publiques, composées de sociétaires et d'assistants distingués les uns des autres, ni imposer des conditions d'admission et d'éligibilité, ni s'arroger des droits d'exclusion, ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association.

Article 363. - Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les Assemblées primaires ou communales.

Article 364. - Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités publiques des pétitions, mais elles doivent être individuelles ; nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce n'est les autorités constituées, et pour des objets propres à leur attribution. - Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux autorités constituées.

Article 365. - Tout attroupement armé est un attentat à la Constitution ; il doit être dissipé sur-le-champ par la force.

Article 366. - Tout attroupement non armé doit être également dissipé, d'abord par voie de commandement verbal, et, s'il est nécessaire, par le développement de la force armée.

Article 367. - Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se réunir pour délibérer ensemble ; aucun acte émané d'une telle réunion ne peut être exécuté.

Article 368. - Nul ne peut porter des marques distinctives qui rappellent des fonctions antérieurement exercées, ni des services rendus.

Article 369. - Les membres du Corps législatif, et tous les Fonctionnaires publics, portent, dans l'exercice de leurs fonctions, le costume ou le signe de l'autorité dont ils sont revêtus : la loi en détermine la forme.

Article 370. - Nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout ni en partie, à l'indemnité ou au traitement qui lui est attribué par la loi, à raison de fonctions publiques.

Article 371. - Il y a dans la République uniformité de poids et de mesures.

Article 372. -L'ère française commence au 22 septembre 1792, jour de la fondation de la République.

Article 373. - La Nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 15 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés ; et elle interdit au Corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point. - Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République.

Article 374. - La Nation française proclame pareillement, comme garantie de la foi publique, qu'après une adjudication légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants à être, s'il y a lieu, indemnisés par le Trésor national.

Article 375. - Aucun des pouvoirs institués par la Constitution, n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans aucune de ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre XIII.

Article 376. - Les citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de la sagesse des choix dans les Assemblées primaires et électorales, que dépendent principalement la durée, la conservation et la prospérité de la République.

Article 377. - Le peuple français remet le dépôt de la présente Constitution à la fidélité du Corps législatif, du Directoire exécutif, des administrateurs et des juges ; à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.

**Loi du 9 Décembre 1905 concernant la séparation
des Églises et de l'État**

**TITRE PREMIER
Principes.**

ARTICLE PREMIER. - La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

ART. 2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1^{er} janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.

**TITRE II
Attribution des biens. - Pensions.**

ART. 3.- Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ici-après. Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif:

1° Des biens mobiliers et immobiliers des dits établissements.

2° Des biens de l'État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.

Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative. Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.

ART. 4.- Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

ART. 5.- Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinalan X feront retour à l'État. Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public. En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22. L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi. Les biens revendiqués par l'État, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.

ART. 6.- Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 5. Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre III. Dans le cas où l'État, les départements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes auxdits édifices.

ART. 7.- Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non approbation, il sera statué par décret en Conseil d'État. Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où l'arrêté préfectoral ou le décret approuvant l'attribution aura été inséré au Journal officiel. L'action ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

ART. 8.- Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret. A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre. Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1^{er} du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou

par décret pourra être contestée devant le Conseil d'État, statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait. La demande sera introduite devant le Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois. L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.

ART. 9.- A défaut de toute association pour recueillir les biens d'un établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret à des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée. En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'État, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissements visés au paragraphe 1er du présent article. Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le décret aura été inséré au Journal officiel. L'action ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

ART. 10.- Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

ART. 11.- Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement. Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement. Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser quinze cents francs. En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles, jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit. Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième. Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus

indiquée sera doublée. Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée. Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille. Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par l'État les départements ou les communes. La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante. Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi. Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité. Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la promulgation de la présente loi.

TITRE III **Des édifices des cultes.**

ART. 12.- Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leur dépendances immobilières, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements, des communes. Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.

ART. 13.- Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :

1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :

2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs :

3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance

d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :

4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;

5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques. La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi. Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret. Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1^{er} juin 1905. Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.

ART. 14.- Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi. Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations. La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1^{er} du présent article. La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1^{er}, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'État. A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'État, aux départements ou aux communes. Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association.

ART. 15.- Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer

librement de la propriété de ces édifices. Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.

ART. 16.- Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique. Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit. En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics. Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887. Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'État lui seront restituées.

ART. 17.- Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles. Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie ; 5° à l'État. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal civil. Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France. Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans l'autorisation du Ministre des Beaux-Arts, ni exécuté hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d'une amende de seize à quinze cents francs. Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu'à celles de l'article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d'une amende de cent à dix mille francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques ; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.

TITRE IV

Des associations pour l'exercice des cultes.

ART. 18.- Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.

ART. 19.- Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins : Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ; Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ; Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse. Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation. Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1^{er} juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices. Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet. Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés.

ART. 20.- Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi.

ART. 21.- Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles. Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.

ART. 22.- Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination ; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5.000 fr) de revenu, à trois

fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices. Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.

ART. 23.- Seront punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22. Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance. Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.

ART. 24.- Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'État, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres. Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers. Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l'article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.

TITRE V

Police des cultes.

ART. 25.- Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

ART. 26.- Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.

ART. 27.- Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884. Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de

l'association cultuelle, par arrêté préfectoral. Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.

ART. 28.- Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

ART. 29.- Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police. Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.

ART. 30.- Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe. Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l'article 14 de la loi précitée.

ART. 31.- Sont punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.

ART. 32.- Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

ART. 33.- Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.

ART. 34.- Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 500 francs à trois mille francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement. La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.

ART. 35.- Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

ART. 36.- Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable.

TITRE VI

Dispositions générales.

ART. 37.- L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

ART. 38.- Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

ART. 39. - Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier, conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique.

ART. 40.- Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.

ART. 41.- Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant l'exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.

ART. 42.- Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.

ART. 43.- Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application. Des règlements d'administration publique détermineront

les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies.

Constitution du 27 Octobre 1946

Préambule

Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :

- La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.
- Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.
- Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
- Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
- Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
- Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
- Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
- La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
- Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
- La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.

- La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État.
- La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais de force contre la liberté d'aucun peuple.
- Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix.
- La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.
- L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
- Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.

Des institutions de la République

Titre I : De la souveraineté

Article premier

- **La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.**

Article 2

- L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge à trois bandes verticales d'égales dimensions.
- L'hymne national est La Marseillaise.
- La devise de la République est : "Liberté, Égalité, Fraternité".
- Son principe est : gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.

Article 3

- La souveraineté nationale appartient au peuple français.
- Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

- Le peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum.
- En toutes autres matières, il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret.

Article 4

128

- Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Constitution du 4 Octobre 1958

Préambule

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

Article premier

- **La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.** Son organisation est décentralisée.
- La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

TITRE Ier De la souveraineté

Article 2

- La langue de la République est le français.
- L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
- L'hymne national est la « Marseillaise ».
- La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».

- Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3

- La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
- Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
- Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
- Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 4

- Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
- Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article premier dans les conditions déterminées par la loi.
- La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »

Article 2

La présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;

3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

130

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication.

Article 4

Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation un an après son entrée en vigueur.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 mars 2004.

Jacques Chirac